Laporan Kinerja
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2021

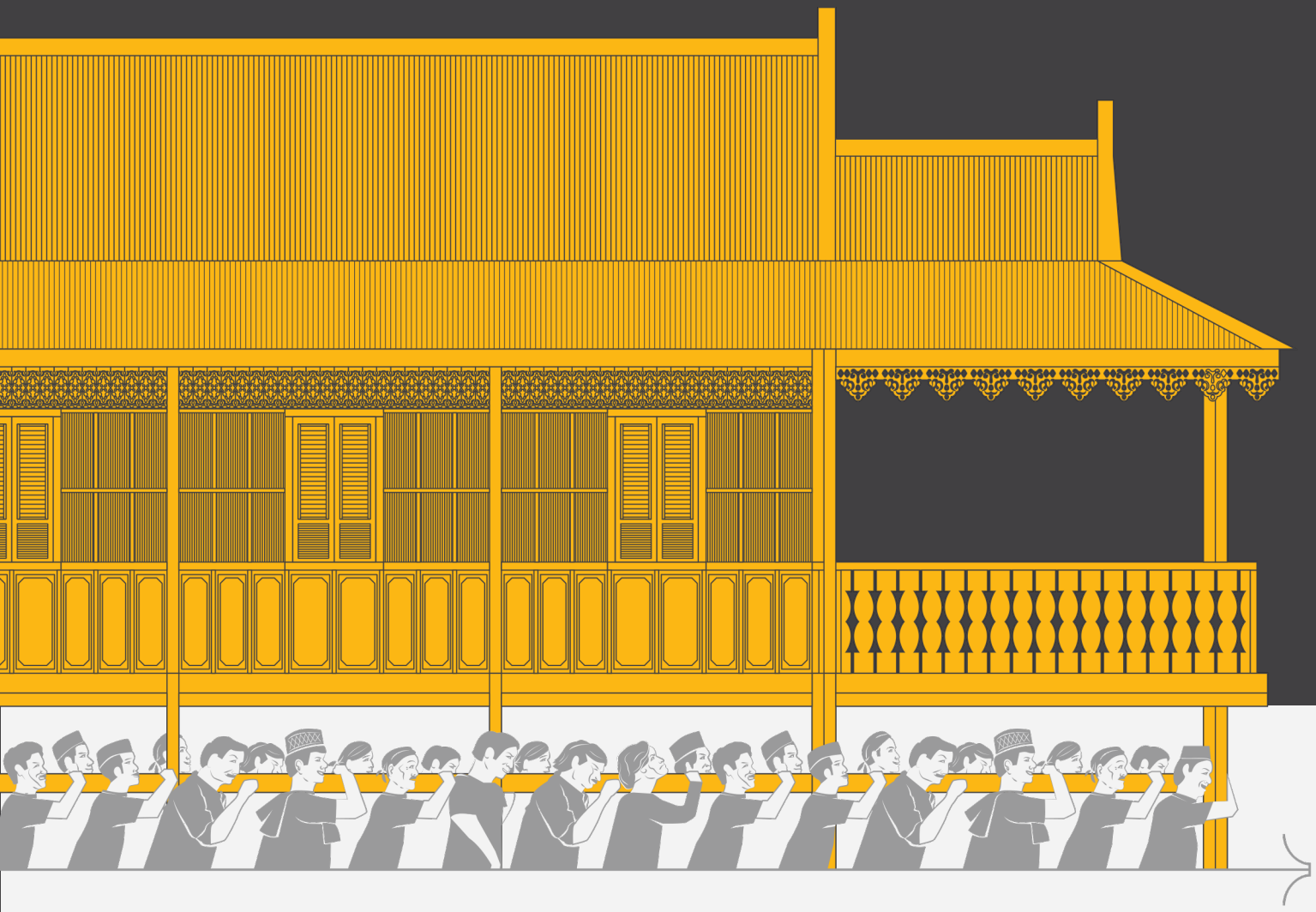

Maju Bersama Menuju Ekonomi yang Lebih Kuat

KEMENTERIAN K
REPUBLIK INDONE

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur pencapaian dan kualitas kinerja tahun 2021 BPPK telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2021 dari total 19 IKU terdapat 1 IKU yang memiliki realisasi *N/A* karena tidak dapat diukur. Sementara itu 18 IKU lainnya memiliki realisasi yang melampaui targetnya (capaian berstatus hijau). Perincian 19 IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat implementasi *learning organization* (realisasi sebesar 93,2 dari target 77).
2. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (realisasi sebesar 89,34% dari target 80%).
3. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya (realisasi sebesar 98,37% dari target 84%).
4. Indeks kepuasan pengguna layanan (realisasi sebesar 4,63 dari target 4,41).
5. Indeks kualitas penelitian (realisasi sebesar 442 dari target 193).
6. Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan (realisasi sebesar 81,47% dari target 75%).
7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik (realisasi sebesar 98,21% dari target 93%).
8. Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital (realisasi sebesar 99,43% dari target 70%).
9. Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran dan validasi program pembelajaran (realisasi sebesar 100 dari target 100).
10. Persentase kualitas program sertifikasi (realisasi sebesar 98,8% dari target 80%).
11. Persentase pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC (realisasi sebesar 116% dari target 100%).
12. Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (realisasi sebesar 115,56% dari target 96,10%).
13. Indeks integritas organisasi (realisasi sebesar 110,53 dari target 95,1).
14. Persentase penyelesaian program IS-RBTK dan *data analytics* (realisasi sebesar 98,16% dari target 85%).
15. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti (realisasi sebesar *N/A* dari target 89,5%).
16. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 (realisasi sebesar 95,79 dari target 90).
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (realisasi sebesar 97,3% dari target 95,5%).

18. Indeks efektivitas komunikasi publik (realisasi sebesar 3,75 dari target 3,55).
19. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK (realisasi sebesar 100% dari target 87%).

Capaian kinerja dari keseluruhan IKU tersebut menyumbang Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK periode tahun 2021 sebesar 112,94. NKO tersebut meningkat dari NKO BPPK periode tahun 2020 yaitu 112,42.

Untuk mewujudkan strategi dan pencapaian kinerja periode tahun 2021, BPPK memiliki 1 program dengan 10 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp507.716.657.000,00. Pagu anggaran tersebut merupakan pagu terakhir setelah dilakukan revisi akibat *refocusing* dan realokasi belanja dari pagu awal sebesar Rp634.677.543.000,00.

Sepanjang tahun 2021 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp448.701.040.515,00 (88,38% dari total pagu) dengan perincian menurut kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Legislasi dan Litigasi dengan realisasi sebesar Rp30.676.500,00 atau tercapai sebesar 66,73% dari pagu anggaran sebesar Rp45.972.000,00.
2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan realisasi sebesar Rp101.041.908.345,00 atau tercapai sebesar 86,23% dari pagu anggaran sebesar Rp117.182.453.000,00.
3. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN) dengan realisasi sebesar Rp131.112.183.911,00 atau tercapai sebesar 98,82% dari pagu anggaran sebesar Rp132.690.680.000,00.
4. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan realisasi sebesar Rp429.719.034,00 atau tercapai sebesar 66,44% dari pagu anggaran sebesar Rp646.786.000,00.
5. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN) dengan realisasi sebesar Rp431.965.007,00 atau tercapai sebesar 82,19% dari pagu anggaran sebesar Rp525.580.000,00.
6. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan realisasi sebesar Rp160.949.739.256,00 atau tercapai sebesar 91,95% dari pagu anggaran sebesar Rp175.042.662.000,00.
7. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN) dengan realisasi sebesar Rp54.635.450.376,00 atau tercapai sebesar 67,25% dari pagu anggaran sebesar Rp81.250.102.000,00.
8. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar Rp15.929.000,00 atau tercapai sebesar 75,04% dari pagu anggaran sebesar Rp21.230.000,00.
9. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN) dengan realisasi sebesar Rp3.915.300,00 atau tercapai sebesar 19,7% dari pagu anggaran sebesar Rp19.877.000,00.
10. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi dengan realisasi sebesar Rp49.553.786,00 atau tercapai sebesar 17,02% dari pagu anggaran sebesar Rp291.315.000,00.

Dari segi capaian *output*, capaian BPPK periode tahun 2021 secara umum sudah cukup baik. Dari total 65 Rincian *Output* (RO) terdapat 17 RO dengan capaian di atas 100%, 44 RO dengan capaian 100%. Sedangkan 4 RO lainnya memiliki capaian kurang dari 100%.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2021 ini kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja BPPK untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan selama periode tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dan tidaklah mudah dihadapi. Kondisi pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia mengharuskan BPPK untuk berkarya dan melayani dengan terus berinovasi dan beradaptasi pada era *new normal*.

Selama tahun 2021 BPPK terus melanjutkan transformasi besar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan melalui konversi kegiatan tatap muka menjadi Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning* yang sudah dimulai sejak wabah pandemi awal tahun 2020. Di sisi lain, BPPK juga masih mengemban amanat lain berupa inisiatif strategis *modern e-learning* sebagai alat utama dalam pengembangan SDM Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja ini memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja. Laporan Kinerja ini berisi pula realisasi anggaran BPPK selama kurun waktu periode tahun 2021 dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini seyogianya tidak hanya memenuhi kewajiban formal. Laporan Kinerja harus mampu memberikan gambaran mengenai progres yang sudah dicapai oleh BPPK dalam merespons perubahan-perubahan. Laporan Kinerja ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan guna peningkatan kinerja BPPK pada periode-periode berikutnya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada *stakeholder*. Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dari para *stakeholder* BPPK akan mampu memberikan manfaat besar kepada Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Salam BPPK,

Andin Hadiyanto
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif **i**

Kata Pengantar **iv**

Daftar Isi **v**

Daftar Tabel **vi**

Daftar Gambar **vii**

1 Pendahuluan **4**
A Latar Belakang 4
B Tugas dan Fungsi 4
C Peran Strategis 5
D Struktur Organisasi 6
E Sistematika Laporan 7

2 Perencanaan Kinerja **12**
A Rencana Strategis 12
B Rencana Kerja 2021 17
C Rencana Kerja dan Anggaran 2021 19
D Penetapan Perjanjian Kinerja 21

3 Akuntabilitas Kinerja **30**
A Capaian Renstra 30
B Capaian Kinerja Organisasi 31
C Realisasi Anggaran 81
D Realisasi *Output* 86
E Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran 91
F Kinerja Lain-Lain 92

4 Penutup **100**

Lampiran **107**
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 108
Komplemen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 117

Daftar Tabel

2.1 Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020–2024 15
2.2 Sasaran Program (*Outcome*) dan IKP Tahun 2021 (alokasi dalam ribuan rupiah) 17
2.3 Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2021 (alokasi dalam ribuan rupiah) 18
2.4 Perincian Perubahan Anggaran BPPK Tahun Anggaran 2021 20
2.5 Perincian Perubahan Anggaran Kegiatan BPPK Tahun Anggaran 2021 21
2.10 Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK 26

3.1 Capaian Renstra BPPK Tahun 2020 dan Tahun 2021 30
3.2 Target, Realisasi, dan Capaian IKU BPPK Tahun 2021 32
3.5 Nilai Komponen Tingkat Implementasi LO 35
3.8 Perincian Hasil Evaluasi Pascapembelajaran Level 4 39
3.14 Perincian Indeks Hasil SKPL 44
3.18 Perincian Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Penelitian 47
3.48 Perincian Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 74
3.55 Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2021 Menurut Jenis Belanja 81
3.56 Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2021 Menurut Kegiatan 84
3.57 Realisasi *Output* BPPK Tahun 2021 86
3.58 Perincian Belanja Penanganan COVID-19 91
3.59 Perincian Realisasi IS *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah Tahun 2021 93
3.60 Perincian Kegiatan Studi Banding/ *Benchmarking* oleh Instansi Lain 94

Daftar Gambar

1.1 Struktur Organisasi BPPK 7

2.1 Peta Strategi BPPK Tahun 2021 22

3.1 Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK 31
3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja 82

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 1 | Pendahuluan

A Latar Belakang 4
B Tugas dan Fungsi 4
C Peran Strategis 5
D Struktur Organisasi 6
E Sistematika Laporan 7

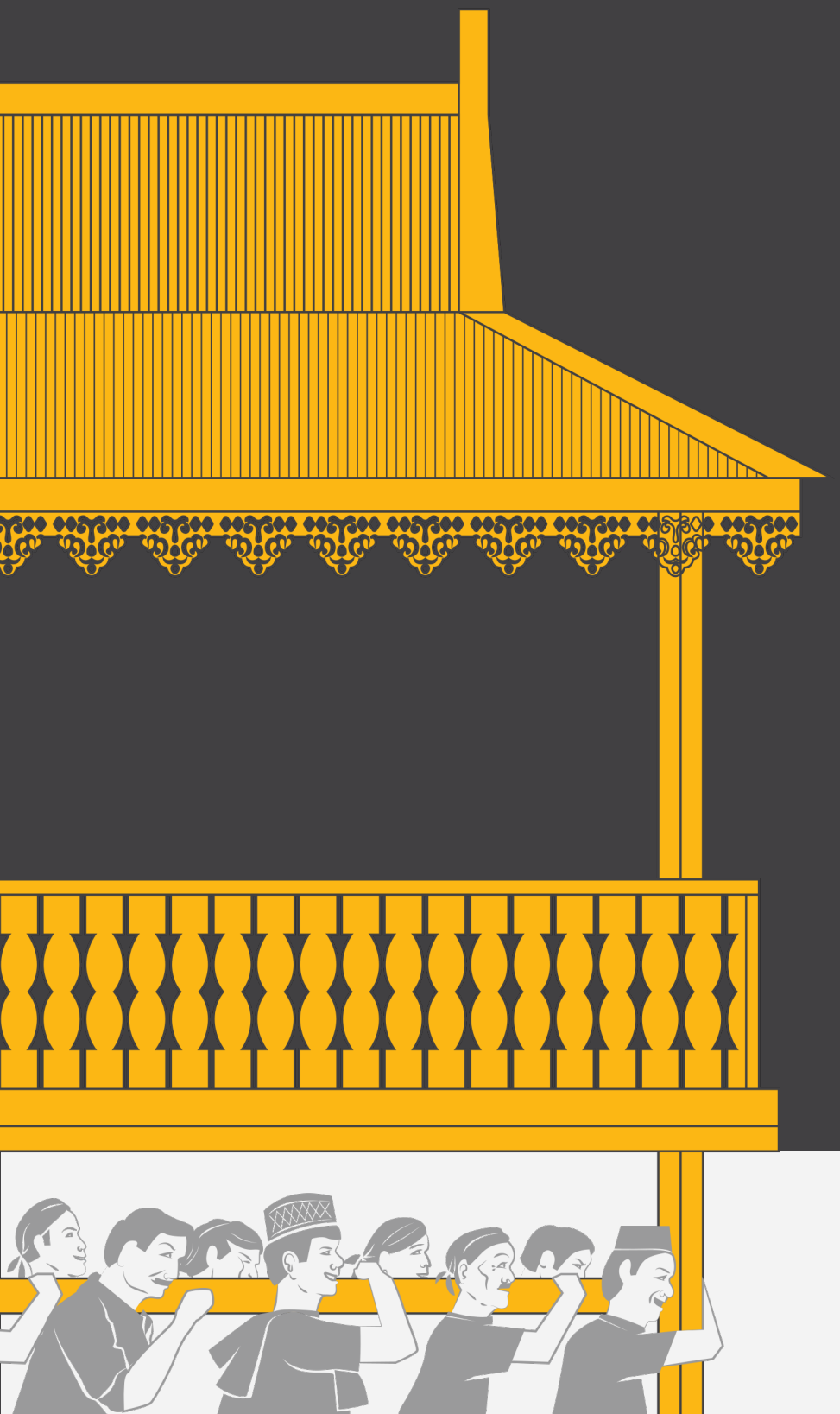

BAB 1 | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Tahun 2021 ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPPK pada periode yang akan datang.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. Peran Strategis

Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara. Peranan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, akuntabel, dan andal. Pembentukan SDM yang memiliki kualitas tersebut dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang *link and match* dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.

Untuk mewujudkan *link and match* antara pengembangan kompetensi SDM dengan tujuan strategis organisasi, Kementerian Keuangan sejak tahun 2016 telah menerapkan strategi *corporate university*. Untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi SDM baik yang bersifat strategis, jabatan, individual, maupun kebutuhan yang sifatnya insidental maka Kementerian Keuangan melakukan pendekatan yang sifatnya proaktif dan tidak lagi reaktif melalui mekanisme pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP).

Adapun BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan strategi Kementerian Keuangan *Corporate University*, BPPK memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi SDM dan menyusun kebijakan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Berikut adalah permasalahan utama yang dihadapi BPPK dalam menjalankan peran tersebut.

a. Pelatihan

- Kementerian Keuangan *Corporate University* belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kementerian Keuangan.
- Minimnya kontrol atas kesesuaian pengiriman peserta dengan pembelajaran.
- Belum terintegrasinya pembelajaran dengan *career path*.
- Pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya dikonsolidasikan melalui BPPK. Masih ada unit eselon I yang menyelenggarakan pelatihan secara mandiri tanpa koordinasi dengan BPPK.
- Belum optimalnya penjaminan mutu pembelajaran.

b. Manajemen Pengetahuan

- Manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan belum sinergi dan efektif.
- Pemanfaatan pengetahuan belum optimal sebagai solusi penyelesaian pekerjaan.
- Budaya belajar dan berbagi pengetahuan masih relatif rendah.

c. Sistem Tata Kelola dan Sumber Daya

- Pengelolaan Teknologi Informasi belum sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh BPPK, masih bergantung (*hosting*) dengan Pusintek.
- Pandemi COVID-19 mendorong terwujudnya kebiasaan baru (*new normal*) dalam proses pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan manajemen pengetahuan.

D. Struktur Organisasi

BPPK terdiri atas Sekretariat Badan, enam pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat), dan Politeknik Keuangan Negara STAN. Keenam pusdiklat tersebut antara lain Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum.

Untuk penyelenggaraan pembelajaran di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri atas sebelas Balai Diklat Keuangan (BDK) dan satu Balai Diklat Kepemimpinan. Kesebelas BDK tersebut antara lain BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.

Struktur organisasi BPPK adalah sebagaimana terlihat dalam **Gambar 1.1** berikut.

Gambar 1.1: Struktur Organisasi BPPK

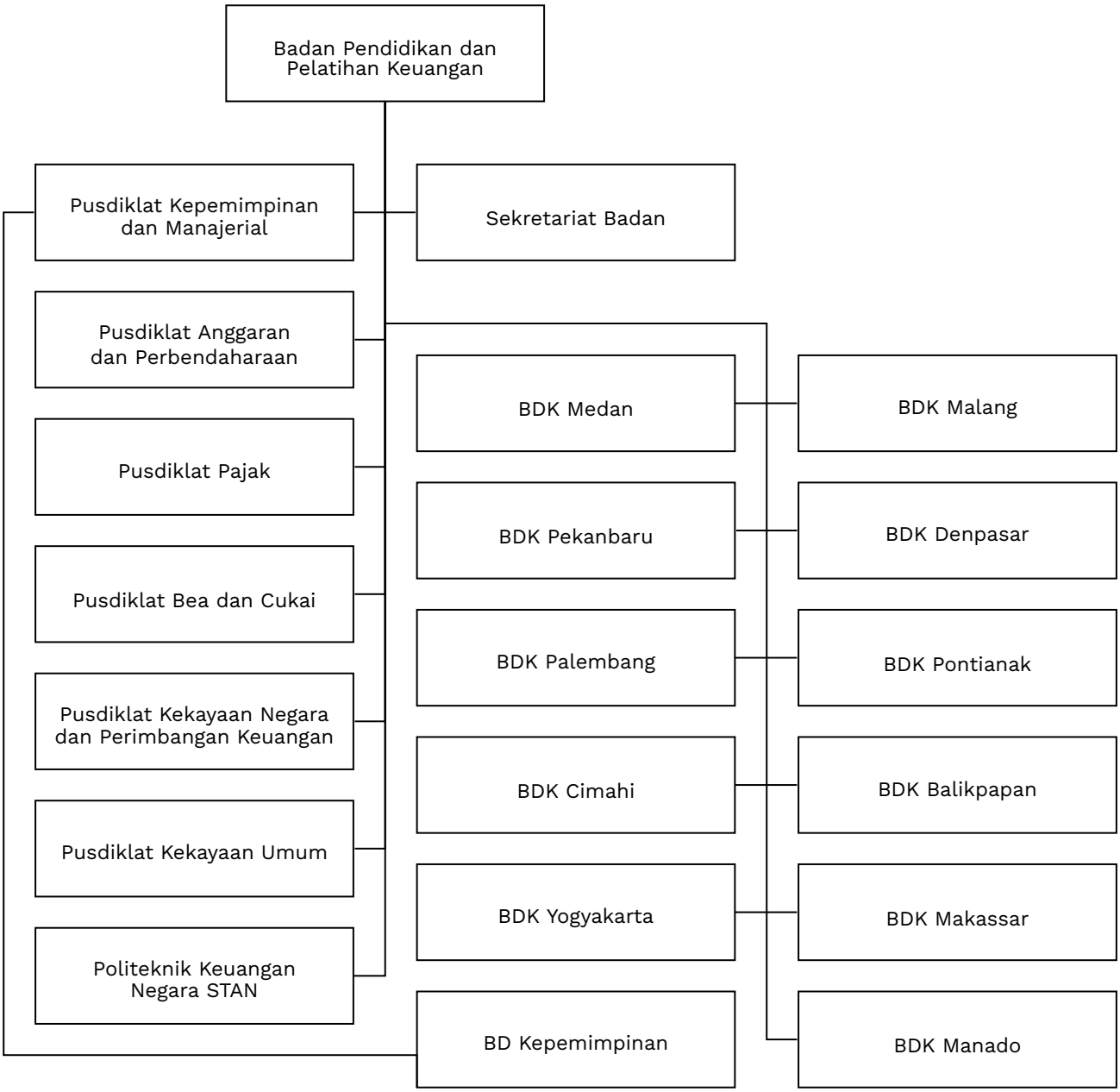

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPPK; peran strategis dan permasalahan utama yang dihadapi BPPK; serta sistematika penyajian.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diuraikan rencana strategis BPPK; rencana kerja BPPK tahun 2021; rencana kerja dan anggaran BPPK tahun 2021; dan penetapan perjanjian kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian rencana strategis BPPK; capaian kinerja BPPK tahun 2021; realisasi anggaran BPPK tahun 2021; realisasi capaian *output* BPPK tahun 2021; dan kinerja lain-lain.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPPK serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BPPK untuk meningkatkan kinerjanya.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 2 | Perencanaan Kinerja

A Rencana Strategis 12

B Rencana Kerja 2021 17

C Rencana Kerja dan Anggaran 2021 19

D Penetapan Perjanjian Kinerja 21

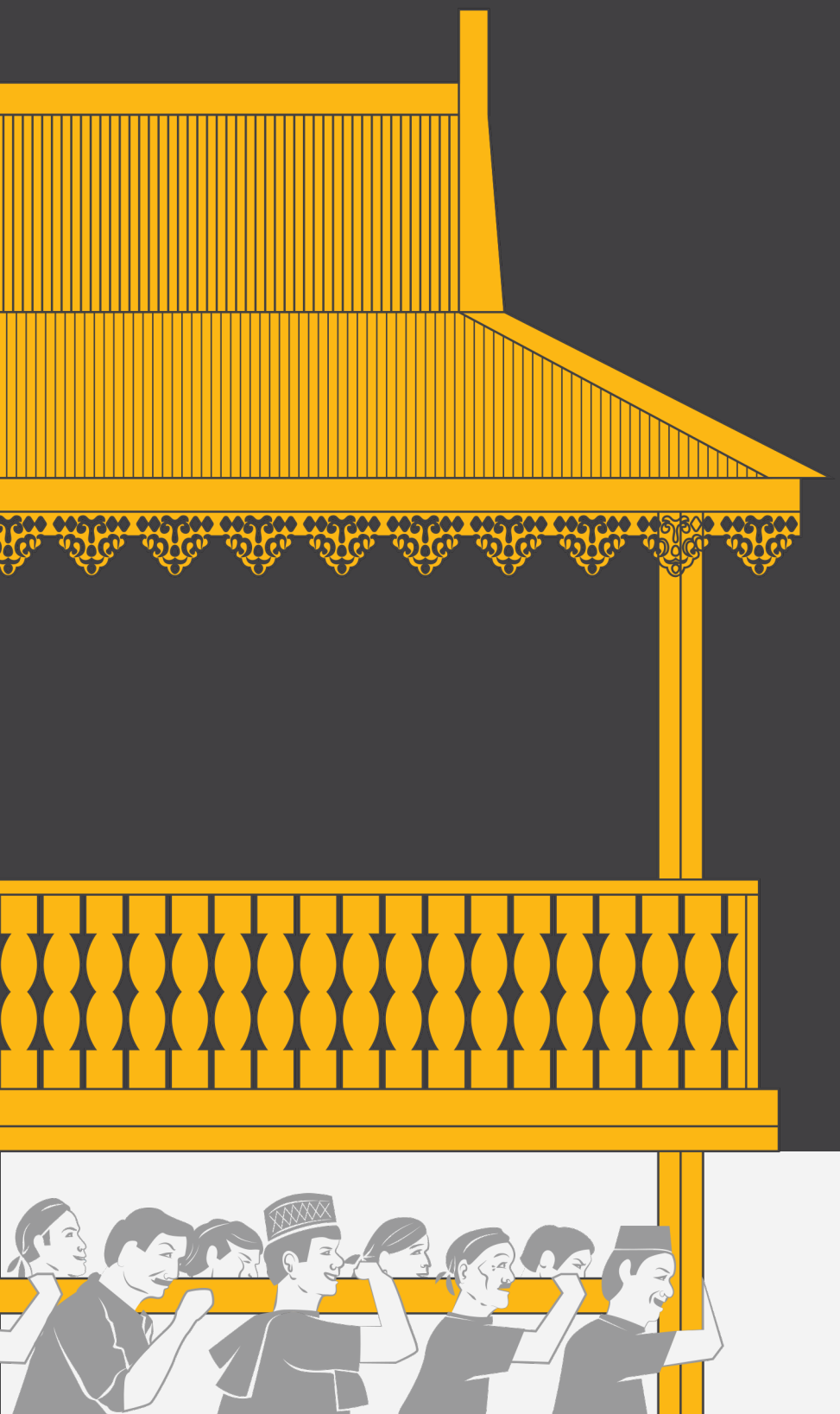

BAB 2 | Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024, seluruh organisasi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun rencana strategis (renstra) 2020–2024. Dalam hal ini BPPK telah menetapkan Renstra Tahun 2020–2024 dengan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2020–2024. Adapun Renstra tersebut berisi tentang visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta target kinerja BPPK selama periode tahun 2020–2024.

1. Visi dan Misi

BPPK telah menetapkan visi tahun 2020–2024 yaitu **Menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"**. Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan juga Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, BPPK juga memperbarui misinya selama periode 2020–2024 agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Dalam mewujudkan visinya tersebut, BPPK mendukung Misi Kementerian Keuangan Nomor 5 "Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi". Adapun misi BPPK ditetapkan sebagai berikut:

a. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
b. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
c. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
d. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
e. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, BPPK menetapkan Tujuan BPPK Tahun 2020–2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 nomor 5, yaitu "Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sasaran strategis Kementerian Keuangan dalam tujuan tersebut yang didukung oleh BPPK adalah organisasi dan SDM yang optimal. Adapun indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah:

a. Tingkat implementasi *learning organization*;
b. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya;
c. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik; dan
d. Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (C*ompetency Gap Index/ CGI*).

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPPK telah menyusun tujuh arah kebijakan dan 18 strategi untuk mendukung pencapaian ketujuh arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Arah Kebijakan 1:
Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purposes* di bidang keuangan negara, termasuk pada penggunaan teknologi informasi

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

a. Penguatan kurikulum pendidikan terapan sesuai dengan kebutuhan pengguna (*link and match)* dan berbasis nilai (*value based education*).
b. Penguatan peran PKN STAN melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.

Arah Kebijakan 2:
Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal

Strategi untuk mewujudkannya adalah:

a. Penyelarasan program beasiswa Kementerian Keuangan dengan kebijakan manajemen talenta.
b. Pengembangan program beasiswa afirmasi untuk pegawai yang berasal dari Indonesia Timur (Papua).

Arah Kebijakan 3:
Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

a. Penguatan pembelajaran yang mengedepankan karakteristik RAIA (*Relevant, Applicable, Impactful*, dan *Accessible*) dan bermuatan etika dengan fokus pada tercapainya tujuan strategis Kementerian Keuangan.

b. Optimalisasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis digital bagi SDM keuangan negara.
c. Optimalisasi pengelolaan pelatihan/ pembelajaran bagi SDM keuangan negara pada KLID.
d. Implementasi sistem penjaminan kualitas pembelajaran.

Arah Kebijakan 4:
Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah melalui:

a. Harmonisasi kebijakan pembinaan kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
b. Penguatan sistem penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan 5:
Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut:

a. Pembangunan kerangka manajemen pengetahuan yang mendukung budaya berbagi pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan bagi solusi kinerja SDM keuangan engara.
b. Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi sistem manajemen pengetahuan.

Arah Kebijakan 6:
Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut antara lain:

a. Penataan organisasi dan pengembangan proses bisnis berbasis digital dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*.
b. Pengembangan pola kerja dan pola pengembangan kompetensi SDM berbasis fungsi yang aplikatif dan berdampak tinggi.
c. Penguatan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi terbaik.
d. Pengelolaan Badan layanan Umum (BLU) yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan 7:
Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut antara lain:

a. Pembangunan infrastruktur dan penguatan implementasi *sharing facilities* berbasis keunggulan komparatif.
b. Penggunaan teknologi informasi termutakhir dalam mendukung pembelajaran.

4. Matriks Target Kinerja

Dalam memastikan ketercapaian setiap sasaran strategis dan program, diperlukan rumusan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang merupakan matriks terukur sebagai panduan dan komitmen kinerja.

Tabel 2.1 berikut menjabarkan indikator-indikator kinerja beserta target-targetnya untuk tahun 2020–2024.

Tabel 2.1: Matriks Kinerja BPPK Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	UIC
1	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik	90%	93%	93%	93%	93%	PKN STAN
2	Indeks kualitas penelitian	90	148	193	238	283	PKN STAN
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	75%	80%	82%	85%	Pusdiklat PSDM
4	Tingkat implementasi *learning organization**	75%	77%	80%	82%	85%	Setban, Seluruh Pusdiklat, dan PKN STAN
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya**	90%	80%	82%	85%	87%	Seluruh Pusdiklat
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	77%	84%	85%	86%	87%	Seluruh Pusdiklat
7	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	90%	93%	-	-	-	Seluruh Pusdiklat, Balai
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	-	-	90%	92%	94%	Seluruh Pusdiklat
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	70%	70%	70%	80%	Seluruh Pusdiklat
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	Seluruh Pusdiklat
11	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	4	5	5	5	Pusdiklat, Balai
12	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	80%	80%	80%	80%	Pusdiklat

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	UIC
13	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%	100%	100%	100%	100%	Pusdiklat
14	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	-	-	2***	2****	3****	Pusdiklat
15	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai*****	-	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Seluruh Pusdiklat
16	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ******	93,67%	94%	94%	94%	94%	Seluruh Pusdiklat dan PKN STAN
17	Persentase kualitas pengelolaan BLU******	80%	80%	80%	80%	80%	PKN STAN
18	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK******	85%	87%	90%	92%	95%	Setban

*: Pada tahun 2020, memiliki lingkup UE1 BPPK. Mulai tahun 2021 lingkup menjadi level Kemenkeu
**: Pada tahun 2021 akan ada reformulasi yang menyebabkan target turun
***: BPPK
****: Kemenkeu
*****: 0,25% persentase jam pelatihan SDM keuangan KLID termasuk ke dalam 4,5% persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu
******: *Mandatory* Kemenkeu

5. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan lima tujuan dan strategi yang ada di renstra Kementerian Keuangan tahun 2020–2024, Kementerian Keuangan menetapkan dua belas program pada tahun 2020 menjadi lima program pada tahun 2021–2024.

Sebelum Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2020)

Pada tahun 2020 BPPK menetapkan program "Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara". Adapun sasaran program (*outcome*)-nya adalah SDM yang Berkinerja Tinggi. Selain itu, ditetapkan sembilan kegiatan di lingkungan BPPK Tahun 2020 sebagai berikut.

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK;
b. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
c. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai;
d. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
e. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
f. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan;
g. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan;

h. Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara; dan
i. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah.

Setelah Dilakukan Restrukturisasi Program (Tahun 2021–2024)

Sementara itu, untuk tahun 2021–2024 dilakukan restrukturisasi program di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga program yang ditetapkan di BPPK adalah "Program Dukungan Manajemen". Adapun sasaran program berupa organisasi dan SDM yang optimal sedangkan indikator program yang ditetapkan adalah tingkat implementasi *learning organization*. Kegiatan-kegiatan pada program ini antara lain:

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM;
b. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum;
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
e. Legislasi dan Litigasi; dan
f. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal.

B. Rencana Kerja 2021

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan dan BPPK Tahun 2021 telah dilakukan pada tahun 2020, sejalan dengan informasi Bappenas terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Renja kemudian digunakan sebagai panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume, dan anggaran yang digunakan serta menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari renja adalah sebagai revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan ke dalam renstra. Hal ini karena adanya kebijakan, kebutuhan, atau kondisi eksternal dan internal yang mungkin berubah atau berbeda dengan kondisi pada saat penetapan renstra.

Tabel 2.2 berikut menggambarkan perincian sasaran program (*outcome*) dan indikator kinerja program beserta alokasi anggaran pada tahun anggaran 2021 sesuai data pada aplikasi KRISNA Bappenas.

Tabel 2.2: Sasaran Program (*Outcome*) dan IKP Tahun 2021 (alokasi dalam ribuan rupiah)

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021	Alokasi 2021
01	**Organisasi dan SDM yang Optimal**		**507.348.955**
01.14	Tingkat implementasi *learning organization*-BPPK	77	

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021	Alokasi 2021
01.15	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan-BPPK	4,05 (skala 5)	
02	**Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi**		**291.315**
02.15	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK-BPPK	87	
03	**Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah**		**76.387**
03.14	Indeks Integritas-BPPK	90,5 (skala 100)	
	Total		**507.716.657**

Sementara itu perincian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersaji dalam **Tabel 2.3** berikut.

Tabel 2.3: Sasaran Kegiatan dan IKK Tahun 2021 (alokasi dalam ribuan rupiah)

Kode	Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2021	Alokasi 2021
4678	**Legislasi dan Litigasi**		**41.564**
1	**Legislasi dan Litigasi yang Optimal**		**41.564**
01.01	Persentase penyelesaian *legal drafting* peraturan, keputusan, dan surat edaran	100	
4679	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum**		**116.403.182**
1	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel**		**116.403.182**
01.01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	
01.02	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100	
4680	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)**		**132.690.680**
1	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel**		**132.690.680**
01.01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	
4681	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik**		**646.786**
1	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan**		**646.786**
01.01	Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik	100	
4682	**Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)**		**525.580**
1	**Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu**		**525.580**

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2021	Alokasi 2021
01.01	Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik	100	
4683	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**		**175.791.061**
1	**Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi**		**175.791.061**
01.01	Persentase alumni pelatihan yang meningkat perilaku kinerjanya	84	
01.02	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93	
4684	**Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)**		**81.250.102**
1	**Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi**		**81.250.102**
01.01	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik	93	
4685	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal**		**56.510**
1	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif**		**56.510**
01.01	Indeks integritas	90,5 (skala 100)	
4686	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)**		**19.877**
1	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif**		**19.877**
01.01	Indeks integritas	90,5 (skala 100)	
4687	**Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi**		**291.315**
1	**Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal**		**291.315**
01.01	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87	

Dari **Tabel 2.3** di atas terlihat bahwa nama-nama kegiatan selain Kegiatan Legislasi dan Litigasi dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi memiliki dua uraian nama kegiatan yang sama. Hal tersebut karena terdapat pemisahan kode untuk fungsi pendidikan yang dimiliki oleh Politeknik Keuangan Negara STAN.

C. Rencana Kerja dan Anggaran 2021

Rencana kerja dan anggaran BPPK tahun 2021 disusun berdasarkan RKP, renja Kementerian Keuangan, renja BPPK, dan aloasi pagu anggaran tahun 2021. Dalam perjalanan tahun 2021, pagu anggaran BPPK mengalami beberapa kali perubahan dan pergeseran, antara lain sebagai berikut.

a. Adanya *refocusing* dan realokasi anggaran belanja yang diusulkan melalui nota dinas Kepala BPPK Nomor ND-5/PP/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Penghematan Belanja BPPK TA 2021 dengan selisih nilai pagu dibandingkan dengan pagu awal adalah sebesar Rp81.739.795.000,00.
b. Terdapat usulan revisi anggaran tahap III melalui nota dinas Kepala BPPK Nomor ND-134/PP/2021 tanggal 14 Juli 2021 hal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka *Refocusing* dan Realokasi Anggaran di Lingkungan BPPK TA 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan beberapa alasan atau pertimbangan revisi sebagai berikut:

    - antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
    - kebutuhan belanja operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 pada unit di lingkungan BPPK;
    - adanya penurunan volume Rincian *Output* (RO) pada RO Pembelajaran Klasikal karena pelatihan secara klasikal kemungkinan tidak dapat diselenggarakan sampai dengan akhir tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19;
    - adanya pemenuhan belanja dalam rangka optimalisasi anggaran.

c. Terdapat usulan revisi anggaran tahap IV melalui nota dinas Kepala BPPK Nomor ND-146/PP/2021 tanggal 27 Juli 2021 hal Usulan Revisi Anggaran BPPK TA 2021 dengan alasan atau pertimbangan revisi adalah dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan. Revisi anggaran ini merupakan pergeseran anggaran dalam rangka penghematan/ *refocusing* yang berdampak pada penurunan volume RO pada beberapa RO.
d. Terdapat revisi kewenangan DJA melalui surat Kepala BPPK Nomor S-84/PP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 untuk merevisi anggaran pagu tetap. Adapun alasan atau pertimbangan revisi adalah karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anggaran satker BDK Yogyakarta, Pusdiklat Pajak, Sekretariat Badan, BDK Malang, dan BDK Manado.

Perubahan pagu anggaran BPPK awal dan pagu anggaran BPPK revisi terakhir tergambar dalam **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4: Perincian Perubahan Anggaran BPPK Tahun Anggaran 2021

	Pagu Awal	Pagu Akhir	Selisih
PNBP Lainnya	1.217.491.000	1.232.491.000	-15.000.000
Pendapatan BLU	27.964.000.000	27.964.000.000	0
Jumlah Pendapatan	**29.181.491.000**	**29.196.491.000**	**-15.000.000**
Belanja Pegawai	94.500.663.000	95.663.321.000	-1.162.658.000
Belanja Barang	412.316.830.000	257.996.114.000	154.320.716.000
Belanja Modal	127.860.050.000	154.057.222.000	-26.197.172.000
Jumlah Belanja	**634.677.543.000**	**507.716.657.000**	**126.960.886.000**

Adapun penjabaran perubahan pagu anggaran program BPPK ke dalam sepuluh kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5: Perincian Perubahan Anggaran Kegiatan BPPK Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Pagu Awal	Pagu Akhir
4678	Legislasi dan Litigasi	125.202.000	45.972.000
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	104.108.133.000	117.182.453.000
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)	120.574.286.000	132.690.680.000
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1.546.942.000	646.786.000
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	1.040.137.000	525.580.000
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	326.108.276.000	175.042.662.000
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	80.127.813.000	81.250.102.000
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	460.872.000	21.230.000
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	21.370.000	19.877.000
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	564.512.000	291.315.000
	Total	**634.677.543.000**	**507.716.657.000**

D. Penetapan Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanaah atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

1. Peta Strategi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Setelah dilakukan beberapa kali pembahasan oleh jajaran pimpinan, BPPK menetapkan peta strategi tahun 2021 yaitu sebanyak 9 SS. Berikut adalah peta strategi BPPK tahun 2021.

Gambar 2.1: Peta Strategi BPPK Tahun 2021

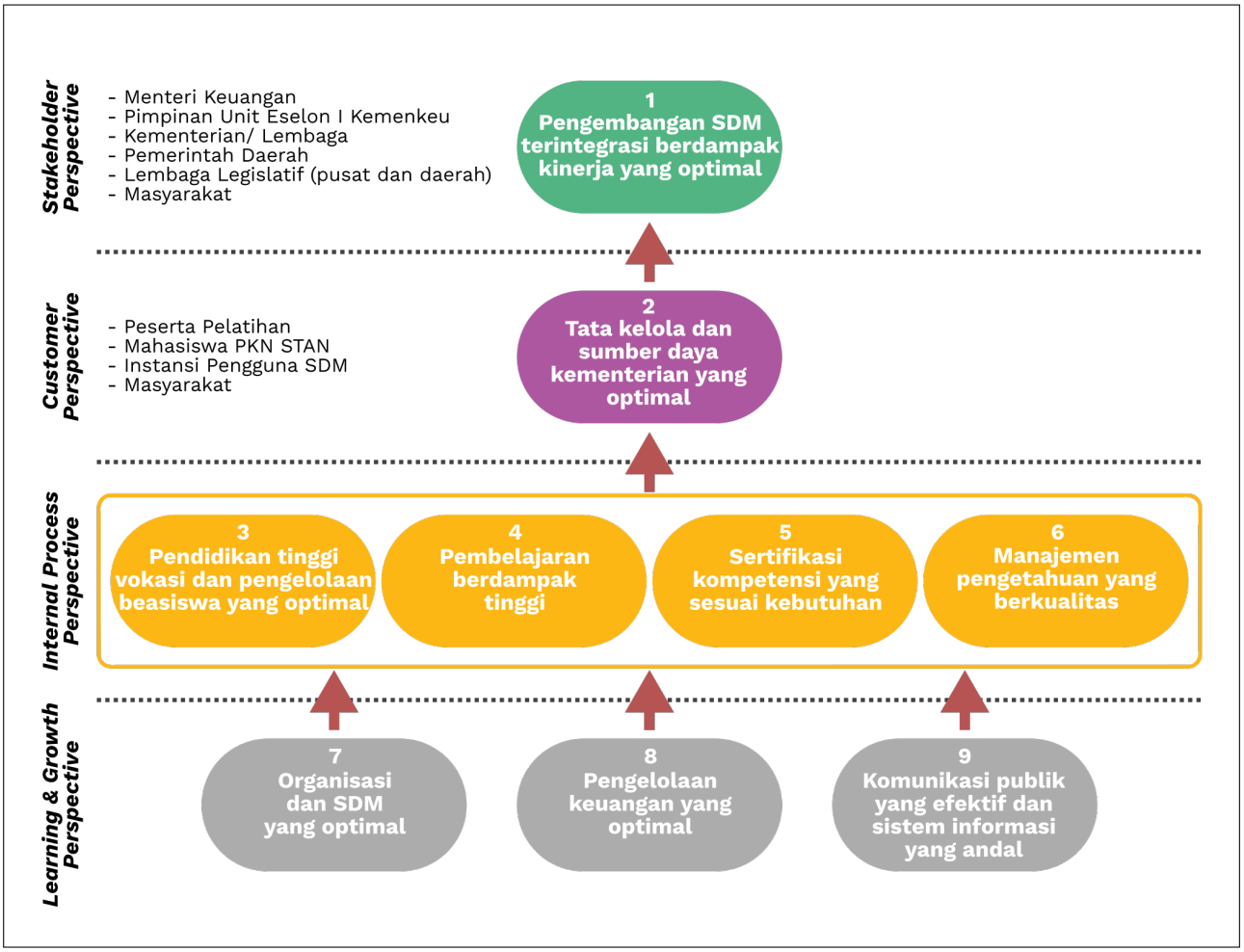

2. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian SS atau kinerja organisasi, maka sesuai dengan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 ditetapkanlah IKU. Adapun jumlah keseluruhan IKU BPPK tahun 2021 adalah sebanyak 19 IKU dengan salah satu IKU memiliki sub-IKU.

Tabel-tabel berikut menjelaskan perbandingan antara SS dan IKU masing-masing perspektif tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Stakeholder Perspective

	Tahun 2020			Tahun 2021	
1	**Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien**		**1**	**Pengembangan SDM Terintegrasi Berdampak Kinerja yang Optimal**	
1a-CP	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	90%	1a-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	77 (skala 100)
			1b-CP	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	80%

Customer Perspective

	Tahun 2020			Tahun 2021	
2	**Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal**		**2**	**Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal**	
2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	85%	2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	84%
2b-N	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik	93%	2b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,41 (skala 5)
2c-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4 (skala 5)			

Internal Process Perspective

	Tahun 2020			Tahun 2021	
3	**Perencanaan Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi**		**3**	**Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pengelolaan Beasiswa yang Optimal**	
3a-N	Persentase Pengembangan *Instructional System Design*	100%	3a-N	Indeks Kualitas Penelitian	193

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

	Tahun 2020			Tahun 2021	
3b-N	Persentase Program Pelatihan yang Mendapatkan Nilai Validasi A	100%	3b-N	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	75%
4	**Program Pembelajaran yang Kreatif**		**4**	**Pembelajaran Berdampak Tinggi**	
4a-N	Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	50%	4a-N	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%
			4b-N	Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	70%
			4c-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran	100
5	**Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas**		**6**	**Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas**	
5a-N	Tingkat Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%	6a-N	Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%
5b-N	Indeks Kualitas Penelitian	90			
6	**Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan**		**5**	**Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan**	
6a-N	Persentase Kualitas Implementasi Program Sertifikasi	80%	5a-N	Persentase Kualitas Program Sertifikasi	80%
7	**Pengendalian Kualitas Pembelajaran yang Efektif**				
7a-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	4 (skala 5)			

Learning and Growth Perspective

	Tahun 2020			Tahun 2021	
8	**Organisasi dan SDM yang Optimal**		**7**	**Organisasi dan SDM yang Optimal**	

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

	Tahun 2020			Tahun 2021	
8a-CP	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	93,67%	7a-CP	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	96,1%
8b-CP	Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi	10%	7b-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,05
8c-CP	Persentase Penyelesaian Program RBTK	85%	7b1-CP	Indeks Integritas	90,1
8d-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,05	7b2-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK	100%
8d1-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK	100	7c-CP	Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*	87,5%
8d2-CP	Indeks Persepsi Integritas	90,1			
8e-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	75 (skala 100)			
9	**Pengelolaan Keuangan yang Optimal**		**8**	**Pengelolaan Keuangan yang Optimal**	
9a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	89%	8a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	89,5%
9b-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	85	8b-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	90
9c-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	8c-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
10	**Sistem Manajemen Informasi yang Andal**		**9**	**Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal**	
10a-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	85%	9a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,55 (skala 4)

3. Inisiatif Strategis

Selain 19 IKU yang diukur, BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memiliki Inisiatif Strategis (IS). IS merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian SS.

Tabel 2.10 berikut menyandingkan IS BPPK tahun 2021 dan tahun sebelumnya.

Tabel 2.10: Perbandingan Inisiatif Strategis BPPK

Tahun	SS/ IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	Biaya
2020	Proses Pembelajaran yang Kreatif/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara	10.500 peserta (Program *Basic E-Learning* Manajemen Keuangan Negara)	122.046.000
2021	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara	300.000 jamlator (10.000 peserta)	501.375.000
2021	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	*Digital Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara	90.000 jamlator (6.000 peserta)	304.475.000

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 3 | Akuntabilitas Kinerja

A Capaian Renstra 30

B Capaian Kinerja Organisasi 31

C Realisasi Anggaran 81

D Realisasi *Output* 86

E Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran 91

F Kinerja Lain-Lain 92

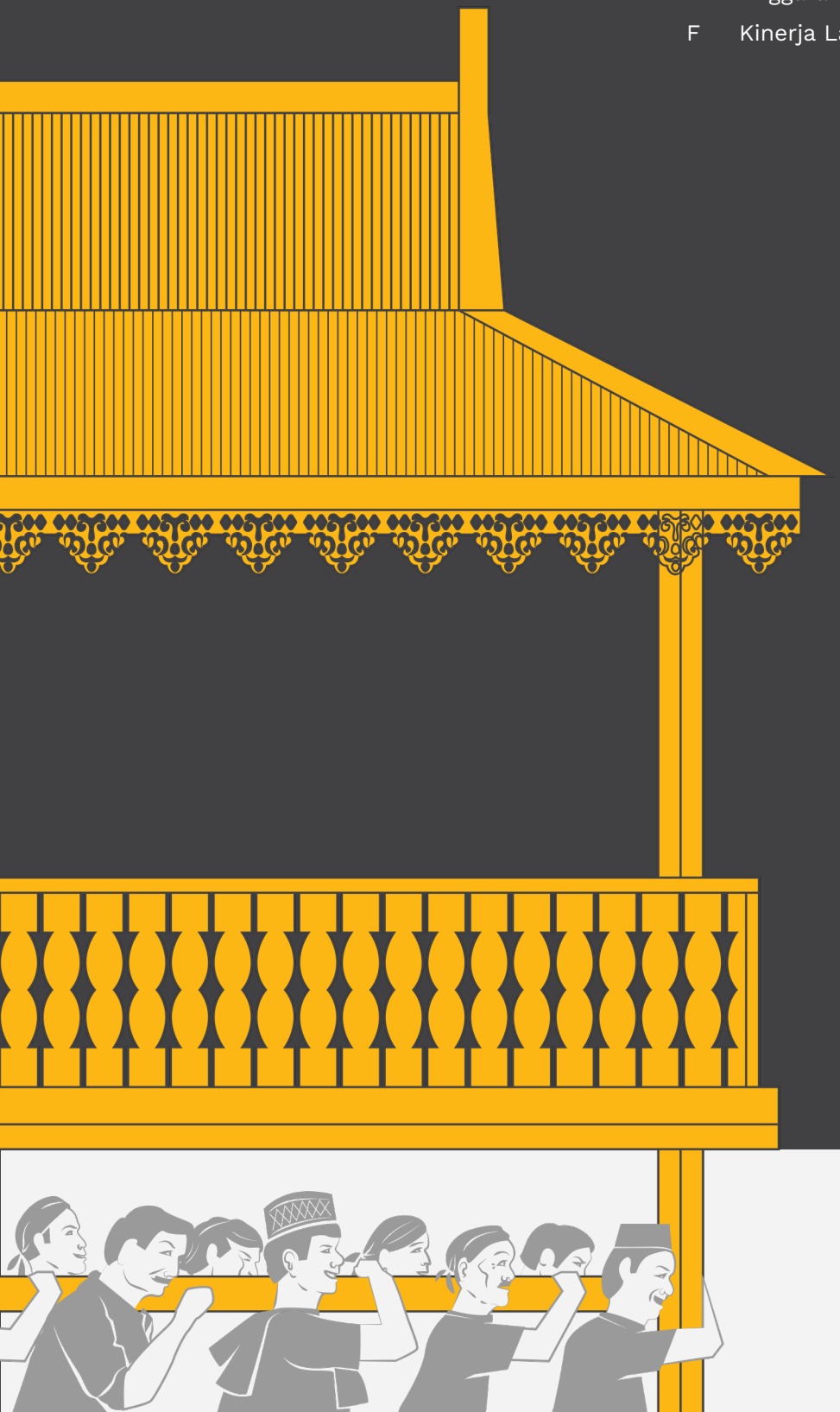

BAB 3 | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Renstra

Capaian renstra BPPK tahun 2021 berikut tahun sebelumnya tergambar pada **Tabel 3.1** berikut.

Tabel 3.1: Capaian Renstra BPPK Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik	90%	99,97%	93%	99,94%
2	Indeks kualitas penelitian	90	238	148	442
3	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	75%	81,47%
4	Tingkat implementasi *learning organization*	75%	95,59	77%	93,2
5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	99,36%	80%	89,9%
6	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	77%	99,51%	84%	98,37%
7	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	90%	96,12%	93%	98,21%
8	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran/CGI	-	-	-	-
9	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	50%	82,52%	70%	99,43%
10	Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kemenkeu	4,5%	0,97%	4,5%	5,2%
11	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	4	5	4	5
12	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	100%	80%	98,8%
13	Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%	111,46%	100%	116%

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
14	Tingkat Kematangan *Knowledge Management*	-	-	-	-
15	Persentase jam pelatihan SDM keuangan negara KLID terhadap jam kerja pegawai	-	-	0,25%	1,6%
16	Persentase pegawai yang telah memenuhi SKJ	93,67%	98,00%	94%	115,56%
17	Persentase kualitas pengelolaan BLU	80%	120%	80%	78,11%
18	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	85%	100%	87%	100%

B. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsinya secara proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja BPPK tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh hasil bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK tahun 2021 adalah sebesar **112,94**.

Perkembangan NKO BPPK dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tergambar pada **Gambar 3.1** berikut. Sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.1** tersebut, dari tahun 2017 s.d. 2021 NKO BPPK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi NKO BPPK kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021.

Gambar 3.1: Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK

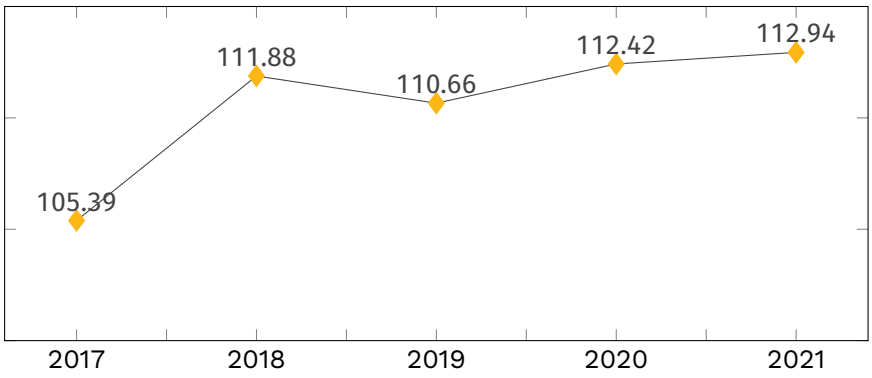

Selama tahun 2021, dari 19 IKU BPPK terdapat 18 IKU berstatus hijau (memenuhi target) dan 1 IKU berstatus abu-abu (capaian tidak dapat dihitung atau *N/A*). Adapun satu buah IKU berstatus abu-abu tersebut adalah IKU "8a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti". IKU tersebut tidak dapat dihitung capaiannya karena pada tahun 2021 tidak terdapat rekomendasi BPK untuk ditindaklanjuti oleh BPPK atas LKPP dan LK BUN.

Capaian dari keseluruhan 19 IKU tersebut ditunjukkan pada **Tabel 3.2** berikut.

Tabel 3.2: Target, Realisasi, dan Capaian IKU BPPK Tahun 2021

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ IKU (bobot)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	
A	***Stakeholder Perspective (25%)***			***115,84***	
1	**Pengembangan SDM Terintegrasi Berdampak Kinerja yang Optimal**			**115,84**	
1a-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	77	93,2	120	
1b-CP	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	80%	89,34%	111,67	
B	***Customer Perspective (15%)***			***109,83***	
2	**Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal**			**109,83**	
2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	84%	98,37%	117,1	
2b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,41	4,63	104,99	
C	***Internal Process Perspective (30%)***			***114,71***	
3	**Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pengelolaan Beasiswa yang Optimal**			**114,31**	
3a-N	Indeks Kualitas Penelitian	193	442	120	
3b-N	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	75%	81,47%	108,63	
4	**Pembelajaran Berdampak Tinggi**			**108,53**	
4a-N	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%	98,21%	105,6	
4b-N	Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	70%	99,43%	120	
4c-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran	100	100	100	
5	**Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan**			**120**	
5a-N	Persentase Kualitas Program Sertifikasi	80%	98,8%	120	
6	**Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas**			**116**	
6a-N	Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%	116%	116	
D	***Learning and Growth Perspective (30%)***			***110,32***	
7	**Organisasi dan SDM yang Optimal**			**116,17**	
7a-CP	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	96,10%	115,56%	120	
7b-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,1	110,53	116,29	
7c-CP	Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*	85%	98,16%	112,18	
8	**Pengelolaan Keuangan yang Optimal**			**104,5**	

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ IKU (bobot)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
8a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	89,5%	*N/A*	*N/A*
8b-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	90	95,79	106,43
8c-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	97,3%	101,88
9	**Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal**			**111,56**
9a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,55	3,75	105,63
9b-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	87%	100%	114,94
	Nilai Kinerja Organisasi			**112,94**

Berikut adalah penjelasan capaian IKU untuk masing-masing SS.

SS-1. Pengembangan SDM Terintegrasi Berdampak Kinerja yang Optimal

Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal adalah pengembangan kompetensi pegawai yang selaras dengan kriteria Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*, dengan bentuk pembelajaran terintegrasi (*structured learning, social learning/ learning from other, learning while working/ from experiences*).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	77	93,2	120
1b-CP	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya	80%	89,34%	111,67

Indeks capaian untuk SS ini adalah **115,84** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “Pengembangan SDM Terintegrasi Berdampak Kinerja yang Optimal” ini adalah sebagai berikut.

1a-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Tingkat implementasi *learning organization* (LO) merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*.

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggoatanya agar mampu terus menerus berkembang dan bertransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Organisasi pembelajar adalah tempat dimana orang-orang pada semua level/tingkat, baik secara individu maupun bersama, melakukan peningkatan kapasitas mereka untuk menghasilkan manfaat yang akan menjadi perhatian mereka atau sesuai keinginan mereka.[1]

Tingkat implementasi *learning organization* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment* yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kementerian Keuangan *Corporate University*.

Tingkat implementasi ini dapat dilihat dari segi *input*, proses, dan *output* pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian yang terdiri atas hal-hal berikut.

- *Strategic fit and management commitment*;
- *Learning function organization*;
- *Learning spaces*;
- *Learning solutions*;
- *Leaders participation in learning process*;
- *Learners*;
- *Learning culture*;
- *Feedback*;
- *Learning value chain*.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut.

a. Penilaian, dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan pusdiklat.
b. *Self Assessment*, dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.
c. Survei, dengan ketentuan:
    - Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK;
    - Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei;
    - Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi sampel.

Adapun formula untuk menghitung capaian kinerja atas IKU "Tingkat Implementasi *Learning Organization*" tertera pada **Rumus 3.1** berikut.

[1]Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-170/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan *Corporate University*

Rumus 3.1: Formula Penghitungan Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Capaian = 40% *Hasil Penilaian* + 30% *Hasil Self Assessment* + 30% *Persepsi Survei*

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1a-CP	SS: Pengembangan SDM Terintegrasi Berdampak Kinerja yang Optimal							
	IKU: Tingkat Implementasi *Learning Organization*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	77	77	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	93,2	93,2	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120	120	

Adapun perincian nilai tiap-tiap komponen pada implementasi LO ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5: Nilai Komponen Tingkat Implementasi LO

No	Komponen	Nilai
1	*Learning solutions*	95,43
2	*Strategic fit and management commitment*	94,72
3	*Learning function organization*	94,51
4	*Feedback*	93,96
5	*Learning value chain*	93,85
6	*Knowledge Management Implementation*	91,62
7	*Learners Performances*	91,53
8	*Learners*	90,94
9	*Learning spaces*	90,88
10	*Leaders' participation in learning process*	89,97

Dari **Tabel 3.5** terlihat bahwa komponen dengan nilai tertinggi adalah komponen "*Learning solutions*". Hal ini menunjukkan bahwa penerapan secara aktif berbagai macam model pembelajaran sudah diimplementasikan, baik yang *self learning*, *social learning*, maupun *learning while working*.

Sedangkan komponen dengan nilai terendah adalah komponen "*Leaders' participation in learning process*". Komponen ini mengukur bagaimana *Leader* dapat membangun iklim yang mendukung proses pembelajaran dan membimbing serta mendorong bawahan dan semua elemen organisasi

untuk selalu belajar baik dari setiap aktivitas formal maupun informal. Dari hasil survei diketahui bahwa komitmen atasan dalam membangun iklim yang mendukung proses pembelajaran dan mendorong bawahan untuk selalu belajar masih dapat ditingkatkan lagi karena *Leader* belum memberikan kesempatan sepenuhnya kepada pegawai untuk mengikuti penugasan pembelajaran tanpa dibebani penugasan kantor secara bersamaan.

Komponen lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah komponen "*Knowledge Management Implementation*". Implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan selama ini sudah cukup baik. Akan tetapi hal tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan menerapkan implementasi komponen manajemen pengetahuan secara utuh. Adapun proses manajemen pengetahuan yang masih bernilai rendah adalah proses pemantauan aset intelektual. Proses pemantauan ini bertujuan untuk menjaga validitas aset intelektual yang berada pada *repository*.

Sementara itu, dalam rangka mencapai target IKU ini, BPPK telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.

a. Membentuk Komite LO;
b. Membentuk Tim Implementasi LO pada setiap unit di lingkungan BPPK untuk mengakselerasi implementasi;
c. Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi LO di Lingkungan Kementerian Keuangan;
d. Telah ditetapkannya KMK Nomor KMK-1/KM.11/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi LO di Lingkungan Kementerian Keuangan;
e. Dalam proses penyusunan Rancangan KMK tentang Penilaian Implementasi LO;
f. Telah dilakukan sosialiasi implementasi LO pada 8 s.d. 9 September 2021 dan sosialiasi pengukuran LO pada 14 September 2021.

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya antara lain sebagai berikut.

a. Melakukan asistensi implementasi LO di lingkungan Kementerian Keuangan;
b. Melakukan penilaian tingkat implementasi LO di lingkungan Kementerian Keuangan.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Tingkat Implementasi *Learning Organization*" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
75	95,59	77%	77	93,2

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target IKU ini pada Renstra masih berupa persentase. Akan tetapi mulai tahun 2020 target berupa persentase ini diubah menjadi nilai dengan skala 100.

Realisasi IKU "Tingkat Implementasi *Learning Organization*" tahun ini menurun dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2020. Hal ini karena berbeda dengan tahun 2020 yang memiliki lingkup unit eselon I BPPK, mulai tahun 2021 lingkup tingkat implementasi LO ini menjadi level Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, capaian kinerja IKU ini tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah sama yaitu sebesar 120 karena pada kedua periode tersebut realisasi yang berhasil dilaksanakan lebih

besar daripada target masing-masing. Di samping itu, baik pada tahun 2021 maupun tahun 2020 BPPK mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra.

1b-CP Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya

IKU ini merupakan bentuk evaluasi pembelajaran Kirkpatrick level 4 (dampak pelatihan). Adapun evaluasi pembelajaran Kirkpatrick memiliki empat level, yaitu

- Level 1: mengukur reaksi peserta terhadap pelatihan yang diikuti.
- Level 2: mengukur tingkat pengetahuan yang didapat peserta pelatihan, pengukuran dilakukan melalui ujian atau *pre-test* dan *post-test*.
- Level 3: mengukur perubahan perilaku melalui implementasi pengetahuan di tempat kerja.
- Level 4: mengukur pencapaian hasil berupa peningkatan kinerja peserta pelatihan.

Pengukuran evaluasi level 4 (evaluasi pascapembelajaran level 4) ini dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian *leading indicator, desired result*, isolasi/ *group control*, *trend lines*, dan penilaian dari atasan. Evaluasi level 4 ini dilakukan setelah tiga s.d. lima bulan semenjak pegawai selesai mengikuti pelatihan.

Sementara itu tujuan dari IKU ini adalah mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. Rendahnya rasio antara alumni yang dapat dievaluasi peningkatan kinerjanya dengan alumni pelatihan disebabkan karena pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan memiliki tusi yang kurang relevan dengan tujuan pelatihan sehingga penyelenggaraan pelatihan menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPPK menentukan pelatihan dan *leading indicator* untuk dievaluasi dampaknya (level 4) bersama dengan Unit Pengguna serta memonitoring pelaksanaan pelatihan dan pengukuran melalui forum gabungan CoP perencanaan dan pengembangan pembelajaran dan CoP evaluasi pembelajaran.

Pemilihan objek pelatihan dikaitkan dengan tujuan organisasi dalam konsep renstra masing-masing unit eselon I yang menjadi mitra utama. Adapun alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan level 4. Alumni pelatihan juga merupakan alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi Kirkpatrick sampai dengan level 3. Alumni pelatihan yang diukur harus pula memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.

Adapun formula untuk menghitung capaian kinerja atas IKU “Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya” ini tertera dalam **Rumus 3.2** berikut.

Rumus 3.2: Formula Penghitungan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya

$$Realisasi = (50\% \times Komponen\ A) + (30\% \times Komponen\ B) + (20\% \times Komponen\ C)$$

Keterangan untuk formula di atas adalah sebagai berikut. Komponen A adalah persentase peserta yang lulus evaluasi level 4 dibandingkan subjek yang dievaluasi level 4. Adapun Komponen B adalah persentase peserta yang lulus evaluasi level 4 dibandingkan dengan subjek yang dievaluasi level 3). Sedangkan Komponen C adalah persentase peserta yang lulus evaluasi level 4 dibandingkan subjek yang lulus evaluasi level 2.

Pada tahun 2021, realiasasi dan capaian IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya" adalah sebagai berikut.

1b-CP	SS: Pengembangan SDM Terintegrasi Berdampak Kinerja yang Optimal							
	IKU: Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Realisasi	*N/A*	92,40%	92,40%	91,9%	91,9%	89,34%	89,34%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	115,5	115,5	114,88	114,88	111,67	111,67	

Program pelatihan yang diukur dampaknya pada tahun 2021 ini berjumlah 17 program pelatihan. Jumlah tersebut sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 18 program pelatihan. Jumlah tersebut juga lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 23 program tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 12 program.

Kondisi pandemi COVID-19 masih mempengaruhi komposisi pelatihan yang dapat dilakukan evaluasi level 4 di tahun 2021 (terdapat keterbatasan dalam metode pelatihan karena belum bisa banyak melakukan pelatihan metode klasikal). Dari segi jumlah alumni yang menjadi subjek evaluasi, tahun 2021 ini pun terjadi penurunan dari jumlah alumni yang menjadi subjek evaluasi di tahun 2020.

Tahun 2021 ini jumlah subjek evaluasi level 4 adalah sebanyak 983 orang sedangkan di tahun 2020 sebanyak 1.244 orang. Dari 983 orang subjek evaluasi tersebut, sebanyak 939 orang menunjukkan peningkatan kinerjanya (95,52%). Hal itu menunjukkan penurunan dari tahun 2020 dimana dari 1.244 orang yang menjadi subjek evaluasi, sebanyak 1.236 orang (99,36%) menunjukkan peningkatan kinerjanya.

Adapun perincian alumni yang meningkat kinerjanya pada tahun 2021 tersaji dalam **Tabel 3.8** berikut.

Tabel 3.8: Perincian Hasil Evaluasi Pascapembelajaran Level 4

No	Pelatihan (Unit)	Subjek Level 2	Subjek Level 3	Subjek Level 4	Meningkat Kinerjanya (%)
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Pusdiklat PSDM)	46	32	32	32 (100,00)
2	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III (Pusdiklat PSDM)	535	387	383	383 (100,00)
3	Pelatihan Perencanaan Penganggaran bagi Kasubbag Umum (Pusdiklat AP)	32	32	32	32 (100,00)
4	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis Semester I (Pusdiklat Pajak)	110	109	108	104 (96,30)
5	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis Semester II (Pusdiklat Pajak)	147	146	145	133 (91,72)
6	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (Pusdiklat Pajak)	139	124	93	77 (82,80)
7	PJJ Pemeriksaan Barang Impor Lanjutan 2020 (Pusdiklat BC)	20	20	17	17 (100,00)
8	PJJ Pelayanan Administrasi Manifes 2020 (Pusdiklat BC)	29	29	17	12 (70,59)
9	PJJ Pemeriksaan Barang Impor Lanjutan 2021 (Pusdiklat BC)	6	6	6	6 (100,00)
10	PJJ Pelayanan Administrasi Manifes 2021 (Pusdiklat BC)	21	21	21	21 (100,00)
11	PJJ Pejabat Lelang bagi Pejabat Struktural DJKN (Pusdiklat KNPK)	12	9	6	6 (100,00)
12	PJJ Kemampuan Menulis Tingkat Lanjutan untuk Jafung AKPD (Pusdiklat KNPK)	16	13	11	11 (100,00)
13	PJJ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Transaksi Lelang Angkatan I Tahun 2021 (Pusdiklat KNPK)	34	25	18	16 (88,89)
14	PJJ Peningkatan Kompetensi Jafung Pelelang Ahli Pertama (Pusdiklat KNPK)	27	27	24	22 (91,67)
15	PJJ Metodologi Survei dan Riset Pasar Properti (Pusdiklat KNPK)	28	27	24	22 (91,67)
16	PJJ Penyusunan Desain Pembelajaran PJJ (Pusdiklat KU)	21	21	15	15 (100,00)
17	PJJ Manajemen Mutu Pembelajaran (Pusdiklat KU)	31	31	31	30 (96,77)
	TOTAL	**1.254**	**1.059**	**983**	**939 (95,52)**

Capaian IKU ini dapat dihitung dengan penjabaran sebagai berikut. Realisasi Komponen A adalah sebesar 95,52% (983 orang subjek evaluasi dibandingkan dengan 939 orang yang meningkat kinerjanya). Realisasi Komponen B adalah sebesar 88,67% (939 orang yang meningkat kinerjanya dibandingkan dengan subjek evaluasi level 3 sebanyak 1.059 orang). Realisasi Komponen C adalah sebesar 74,88% (939 orang yang meningkat kinerjanya dibandingkan dengan subjek evaluasi level 2 sebanyak 1.254 orang). Dengan demikian dengan menggunakan **Rumus 3.2** realisasi IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya" adalah sebesar 89,34% atau memiliki capaian sebesar 111,67 dari target sebesar 80%.

Akar masalah dari pencapaian IKU ini adalah peserta yang mengikuti pelatihan yang dirancang diukur evaluasi pascapembelajaran sampai dengan level 4 ternyata tidak menerapkan pembelajaran di tempat kerjanya, sehingga tidak dapat dilanjutkan proses evaluasinya.

Sebanyak 17 program pelatihan yang dilakukan evaluasi pascapembelajaran sampai dengan level 4 pada periode tahun 2021 ini sudah diselenggarakan evaluasi pascapembelajarannya dan sudah dilaporkan. Adapun rekomendasi rencana aksi untuk periode mendatang adalah sebagai berikut.

a. Penyusunan program pembelajaran (oleh pusdiklat, dilakukan sepanjang tahun);
b. Penyusunan desain dan pengembangan pembelajaran konvensional dan digital (oleh pusdiklat, dilakukan sepanjang tahun);
c. Penyelenggaraan pembelajaran (oleh pusdiklat dan balai diklat, dilakukan sepanjang tahun); dan
d. Pengukuran dampak pembelajaran, mulai dari level 1 s.d. level 4 (dilakukan oleh pusdiklat dan balai diklat dengan periode pelaksanaan secara semesteran).

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
90%	99,36%	80%	80%	89,34%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target IKU ini pada tahun 2021 turun dari tahun 2020. Hal tersebut karena terjadi reformulasi IKU. Realisasi IKU ini pun mengalammi penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun demikian dari segi nilai capaian, tahun 2021 (capaian 111,67) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 (110,40). Baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021 BPPK berhasil meraih target pada Renstra atas IKU ini.

SS-2. Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal

BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja dalam pencapaian SS ini. Adapun pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2a-N	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya	84%	98,37%	117,1
2b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,41	4,63	104,99

Indeks capaian untuk SS ini adalah **109,83** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal" ini adalah sebagai berikut.

2a-N Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya

Berbeda dengan IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya" yang merupakan bentuk evaluasi pembelajaran Kirkpatrick level 4, IKU ini merupakan bentuk evaluasi Kirkpatrick level 3 (*behaviour*). Adapun tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperioleh para alumni dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. Data diperioleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran (EIHP) atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh pusdiklat serta disepakati oleh unit pengguna.

Program pelatihan yang akan dievaluasi ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan desain pembelajaran. Responden dalam kegiatan EIHP adalah alumni, atasan, rekan kerja, bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360 derajat. Adapun responden yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360 derajat adalah apabila jumlah tanggapan responden atas seorang alumni pelatihan minimal memenuhi 50% dari jumlah responden yang disurvei.

Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan data atas persepsi responden terhadap diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan.

Adapun formula pengukurannya tertera dalam **Rumus 3.3** berikut.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

2a-N	SS: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal							
	IKU: Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	84%	84%	84%	84%	84%	84%	
Realisasi	*N/A*	99,65%	99,65%	99,65%	99,65%	98,37%	98,37%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	118,63	118,63	118,63	118,63	117,1	117,1	

Rumus 3.3: Formula Penghitungan IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya

$$Kualitas\ Perilaku\ Kerja\ Alumni\ X = Rata\text{-}rata\ dari \begin{pmatrix} Rata-rata\ dari\ jawaban\ alumni\ X \\ Rata-rata\ dari\ jawaban\ atasan\ alumni\ X \\ Rata-rata\ dari\ jawaban\ rekan\ kerja\ alumni\ X \\ Rata-rata\ dari\ jawaban\ bawahan\ alumni\ X \end{pmatrix}$$

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Alumni\ Pelatihan\ yang\ Mengalami\ Peningkatan\ Kualitas\ Perilaku\ Kerja}{Jumlah\ Alumni\ Pelatihan\ yang\ Diukur\ dalam\ EIHP} \times 100\%$$

Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 61 pelatihan yang telah selesai dilakukan evaluasi pembelajaran sampai dengan evaluasi level 3. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.

a. Terdapat 3.492 alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya;
b. Terdapat 3.550 alumni pelatihan yang diukur s.d. evaluasi level 3;
c. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya adalah sebesar 98,37%;
d. Program pelatihan *full e-learning* yang telah diukur s.d. evaluasi level 3 adalah sebagai berikut:
    - *E-Learning* Pengembangan Aplikasi *Mobile* berbasis Flutter (Pusdiklat KU);
    - *E-Learning* Penyegaran SPAN Seksi Bank (Pusdiklat AP);
    - *E-Learning* Penyegaran SPAN Seksi Verifikasi dan Akuntasi (Pusdiklat AP);
    - *E-Learning Account Representative* Dasar (Pusdiklat Pajak);
    - *E-Learning* Dasar Pemeriksaan Lelang (Pusdiklat KNPK).

Akar masalah dari pencapaian IKU ini adalah peserta yang dikirim untuk mengikuti pelatihan tidak menangani pekerjaan sesuai dengan pembelajarannya. Selain itu, peserta juga tidak mengimplementasikan di tempat kerjanya atas apa yang telah dipelajarinya pada saat mengikuti pelatihan karena bukan merupakan tugas dan fungsi peserta yang bersangkutan.

Selama tahun 2021, BPPK telah mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut.

a. Program pelatihan yang dilakukan evaluasi sampai dengan level 3 periode semester I tahun 2021 sudah selesai dilaporkan.
b. Pada semester I tahun 2021 telah dilakukan penyelenggaraan beberapa pelatihan yang akan dievaluasikan sampai dengan level 3 periode semester II tahun 2021.
c. Program pelatihan yang dilakukan evaluasi sampai dengan level 3 periode semester II tahun 2021 sudah selesai dilaporkan.
d. Pada semester II tahun 2021 telah dilakukan penyelenggaraan beberapa pelatihan yang akan dievaluasikan sampai dengan level 3 periode semester I tahun 2022.

Sementara itu rencana-rencana aksi untuk periode selanjutnya telah disusun. Adapun rencana-rencana aksi tersebut antara lain:

a. Penyusunan program pembelajaran (oleh pusdiklat, dilakukan sepanjang tahun);
b. Penyusunan desain dan pengembangan pembelajaran konvensional dan digital (oleh pusdiklat, dilakukan sepanjang tahun);
c. Penyelenggaraan pembelajaran (oleh pusdiklat dan balai diklat, dilakukan sepanjang tahun); dan
d. Pengukuran dampak pembelajaran, mulai dari level 1 s.d. level 3 (dilakukan oleh pusdiklat dibantu oleh balai diklat dengan periode pelaksanaan secara semesteran).

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
85%	99,51%	84%	84%	98,37%

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 BPPK sama-sama berhasil melaksanakan realisasi IKU ini melebihi target tahun masing-masing. Adapun capaian IKU ini pada tahun 2021 (117,10) sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2020 (capaian 117,07). Dari segi pencapaian target Renstra, dalam dua tahun tersebut BPPK berhasil melampaui target.

2b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau *stakeholders* terhadap layanan Kementerian Keuangan. Adapun tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau *stakeholders* lainnya adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan (SKPL).

Hal yang diukur atas survei ini adalah layanan unggulan yang diberikan oleh pusdiklat, balai diklat, dan PKN STAN yang diperoleh dari survei independen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan bekerja sama dengan tim peneliti independen. Adapun pada tahun 2021 tim peneliti independen yang ditunjuk berasal dari Universitas Padjadjaran.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

2b-N	SS: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal							
	IKU: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	4,41	4,41	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	4,63	4,63	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	104,99	104,99	

Tahun 2021 jenis layanan BPPK yang diukur dalam SKPL berjumlah tiga layanan. Hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan SKPL tahun 2020 di mana jenis layanan BPPK yang disurvei berjumlah dua layanan (Layanan Pelatihan Tatap Muka dan Layanan Pelatihan *E-learning*. Adapun perincian tiga layanan BPPk yang disurvei tahun 2021 berikut indeks hasil penilainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14: Perincian Indeks Hasil SKPL

No	Layanan	Indeks
1	Seleksi Beasiswa	4,68
1	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)	4,61
2	Pelatihan *E-learning*	4,61
	Total	**4,63**

Pada tahun 2020 layanan seleksi beasiswa tidak menjadi layanan yang disurvei karena pada saat pelaksanaan SKPL 2020 sudah dimulai, layanan seleksi beasiswa masih dalam proses pelaksanaan. Adapun layanan PJJ menggantikan layanan pelatihan tatap muka pada tahun 2020 mengingat pada masa pandemi COVID-19 metode pelatihan yang lebih banyak digunakan adalah pelatihan metode PJJ.

Layanan pelatihan *e-learning* pada tahun 2021 mengalami peningkatan kepuasan layanan sebesar 0,14. Hal ini dapat diartikan bahwa secara relatif kinerja layanan ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini juga menunjukkan adanya perubahan yang positif terhadap pemberian layanan *e-learning* oleh BPPK mengingat persiapan yang lebih matang pada tahun 2021 dan juta daptasi pengguna terhadap penggunaan perangkatn *e-learning*.

Seluruh layanan yang diberikan oleh BPPK tahun 2021 melampaui agregat Kementerian Keuangan (skor 4,40). Dengan agregat sebesar 4,63, BPPK juga menjadi unit eselon I dengan skor IKPL tertinggi dibandingkan dengan unit eselon I lain. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa persiapan pemberian layanan tahun 2021 lebih matang dan positif dibanding dengan tahun 2020. Akan tetapi di sini lain hal ini juga menjadi tantangan BPPK untuk tetap menjaga dan mempertahankan capaian ini sehingga di tahun mendatang harus disertai dengan inovasi-inovasi pemberian layanan.

Berikut ini adalah tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPPK sepanjang tahun 2021.

a. Telah mengikuti kegiatan *kick-off* pengukuran kepuasan pengguna layanan pada level Kementerian Keuangan pada tanggal 8 April 2021;
b. Telah dilakukan pengumpulan data *long list* responden pada Juni–Juli 2021;
c. Telah disampaikan laporan SKPL tahun 2021.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilakukan oleh pusdiklat, balai diklat, dan Politeknik Keuangan Negara STAN sepanjang tahun pada periode berikutnya adalah pelaksanaan layanan sesuai dengan SOP dan janji layanan. Adapun rencana layanan BPPK yang akan disurvei pada pelaksanaan SKPL tahun 2022 adalah layanan PJJ, layanan *e-learning*, pengelolaan beasiswa, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
4	4,41	-	4,41	4,63

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pada tahun 2020 menjadi target pada tahun 2021. Meskipun begitu pada tahun 2021 BPPK berhasil melampaui target tersebut. Dengan demikian realisasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

SS-3. Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pengelolaan Beasiswa yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3a-N	Indeks Kualitas Penelitian	193	442	120
3b-N	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	75%	81,47%	108,63

Indeks capaian untuk SS ini adalah **114,31** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pengelolaan Beasiswa yang Optimal" ini adalah sebagai berikut.

3a-N Indeks Kualitas Penelitian

Riset atau penelitian dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas penelitian yang dihasilkan oleh PKN STAN dengan mempertimbangkan kualitas publikasinya. Indeks kualitas penelitian adalah nilai seluruh penelitian PKN STAN yang terpublikasi pada tahun 2021 berdasarkan bobot/ formula berikut.

- Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (Scopus, Thomson, Microsoft Academic Search), mendapatkan poin 7.
- Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang (DOAJ, Ebsco, Proquest, atau sejenisnya), mendapatkan poin 5.
- Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Dikti, mendapatkan poin 3.
- Penelitian dipublikasikan di prosiding terindeks Scopus, mendapatkan poin 2.
- Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN, mendapatkan poin 1.
- Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal, mendapatkan poin 0,5.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

3a-N	SS: Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pengelolaan Beasiswa yang Optimal							
	IKU: Indeks Kualitas Penelitian							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	193	193	
Realisasi	5	79	79	211,5	211,5	442	442	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120	120	

Periode pelaporan IKU ini adalah tahunan. Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, setiap triwulan terjadi kenaikan realisasi atas IKU “Indeks Kualitas Penelitian” ini. Adapun perincian penghitungan nilai capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18: Perincian Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Penelitian

No	Kategori	Bobot	Jumlah	Nilai
1	Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (Scopus, Thomson, dan Microsoft Academic Search)	7	16	112
2	Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang (DOAJ, Ebsco, Proquest, atau sejenisnya)	5	4	20
3	Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Dikti	3	74	222
4	Penelitian dipublikasikan di prosiding terindeks Scopus	2	0	0
5	Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN	1	63	63
6	Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal	0,5	50	25
	Total		**207**	**442**

Dari **Tabel 3.18** terlihat bahwa sampai dengan akhir tahun 2021 telah terealisasi sebanyak 157 penelitian yang telah dipublikasikan dan 50 penelitian diseminarkan dengan pihak eksternal.

Adapun untuk periode mendatang, rencana aksi berikut direkomendasikan untuk dilakukan oleh PKN STAN.

a. Pembuatan proposal penelitian;
b. Pelaksanaan penelitian;
c. Pelaksanaan seminar hasil penelitian.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Kualitas Penelitian” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
90	238	148	193	442

Dari tabel di atas terlihat bahwa baik target maupun realisasi IKU ini pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020. Dalam kedua tahun tersebut pun sama-sama melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

3b-N Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan

Pengelolaan beasiswa yang optimal adalah pengelolaan beasiswa yang selaras dengan manajemen talenta, yang meliputi aspek seleksi dan penempatan studi serta pemanfaatan pascastudi. Oleh karena itu tingkat efektivitas program beasiswa Kementerian Keuangan diukur dari sisi keselarasan dengan manajemen talenta, yang meliputi aspek seleksi dan penempatan studi serta pemanfaatan pascastudi tersebut. Mengingat lingkup kewenangan dan ketepatan proses bisnis yang dilaksanakan

maka pengukuran IKU ini didasarkan pada aspek penempatan, yaitu penempatan *awardee* pada *top 100 universities by world* dan tingkat kelulusannya.

Formula untuk menghitung realisasi IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.4: Formula Penghitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan

$$Realisasi = \begin{matrix}(10\% \times Penempatan\ Awardee\ pada\ Top\ 100\ Universities\ ) + \\ (90\% \times Awardee\ Lulus\ Tepat\ Waktu\ pada\ Top\ 100\ Universities)\end{matrix}$$

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

3b-N	SS: Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pengelolaan Beasiswa yang Optimal							
	IKU: Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	75%	75%	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	81,47%	81,47%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	108,63	108,63	

Terkait dengan capaian IKU "Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan" dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

a. *Awardee* yang lulus tepat waktu sebanyak 54 orang atau sebesar 79,41% dari target 68 orang (merupakan karyasiswa program FETA 4 dan 5);
b. Tingkat penempatan *awardee* sebesar 100% (sebanyak 122 orang karyasiswa memiliki *unconditional LoA* dari 122 karyasiswa yang memulai studi).
c. Dengan demikian realisasi IKU ini menjadi $(90\% \times 79,41\%) + (10\% \times 100\%) = 81,47\%$.

Pada pelaksanaan IKU ini tahun 2021 diketahui bahwa perguruan tinggi tujuan *Top-30 by subject* mensyaratkan aplikasi yang lebih ketat. Ketepatan waktu lulusan pun sangat tergantung pada kinerja akademik para *awardee* yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali BPPK c.q. Pusdiklat KM.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPPK sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Untuk penempatan pada *Top-30 by subject*:

    - Menyusun rancangan program persiapan yang salah satunya ditargetkan untuk mendapat skor bahasa inggris yang lebih tinggi sesuai persyaratan minimal mendaftar pada perguruan tinggi tersebut.

- Menjajaki kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi tujuan dengan target mendapatkan *dedicated seat* bagi *awardee*.

b. Untuk kelulusan tepat waktu:

- Menyusun rencana pembentukan *MoF Scholarship Forum* yang berisi pengelola beasiswa, pengelola SDM dari unit-unit eselon I dan para PIC pada perguruan tinggi tempat studi *awardee*.
- Membentuk mentor dari unit asal *awardee* untuk menjadi mitra diskusi *awardee selama menjalani masa studi, khususnya saat penelitian atau penulisan tugas akhir*.

Sementara itu BPPK telah menyusun rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang dengan UIC Pusdiklat Kepemmimpinan dan Manajerial. Adapun rencana-rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penyusunan rancangan program persiapan (periode triwulan I tahun 2022);
b. Penjajakan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan (periode triwulan I tahun 2022);
c. Penyusunan rencana pembentukan *MoF Scholarship Forum* (periode triwulan I tahun 2022);
d. Pembentukan *Awardee Mentorship Program* (periode triwulan I tahun 2022);
e. Penetapan kurikulum program persiapan tahun 2022 (periode triwulan II tahun 2022);
f. Pembahasan kerja sama denngan perguruan tinggi tujuan (periode triwulan II tahun 2022);
g. Pembentukan *MoF Scholarship Forum* (periode triwulan II tahun 2022);
h. Pelaksanaan *Awardee Mentorship Program* (periode triwulan II tahun 2022);
i. Pelaksanaan program perisapan menggunakan kurikulum program persiapan tahun 2022 (periode triwulan III tahun 2022);
j. Pembahasan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan (periode triwulan III tahun 2022);
k. Pelaksanaan kegiatan *MoF Scholarship Forum* (periode triwulan III tahun 2022);
l. Pelaksanaan *Awardee Mentorship Program* (periode triwulan III tahun 2022);
m. Evaluasi kurikulum program persiapan tahun 2022 (periode triwulan IV tahun 2022);
n. Pembahasan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan (periode triwulan IV tahun 2022);
o. Pelaksanaan kegiatan *MoF Scholarship Forum* (periode triwulan IV tahun 2022); dan
p. Pelaksanaan *Awardee Mentorship Program* (periode triwulan IV tahun 2022);

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
-	-	75%	75%	81,47%

IKU ini baru ada mulai tahun 2021, dan tidak memiliki target kinerja pada Renstra. Karena itulah kolom target dan realisasi tahun 2020 pada tabel di atas IKU ini tidak tercantum nilai. Adapun target

tahun 2021 dengan target pada Renstra memiliki nilai yang sama dan BPPK berhasil melampaui target tersebut.

SS-4. Pembelajaran Berdampak Tinggi

BPPK mengidentifikasikan tiga buah indikator kinerja dalam pencapaian SS ini. Adapun pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4a-N	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%	98,21%	105,6
4b-N	Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	70%	99,43%	120
4c-N	Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran	100	100	100

Indeks capaian untuk SS ini adalah **108,53** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “Pembelajaran Berdampak Tinggi” ini adalah sebagai berikut.

4a-N Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik

Lulusan dengan predikat minimal baik adalah

- lulusan pelatihan teknis yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama;
- lulusan pelatihan fungsional yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama;
- lulusan pelatihan dasar dan kepemimpinan yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama (bukan peserta mengulang);
- lulusan program diploma yang memperoleh IPK minimal 3 (predikat sangat memuaskan adalah nilai IPK 3–3,5);
- lulusan program *pre-departure training* yang memperioleh nilai IBT minimal 79 atau IELTS 6,5.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini juga bermanfaat dalam memberikan umpan balik kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini.

Realisasi IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.5: Formula Penghitungan Realisasi IKU Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ peserta/\ mahasiswa\ yang\ lulus\ ujian\ berpredikat\ minimal\ baik}{Jumlah\ peserta\ yang\ mengikuti\ ujian/\ jumlah\ mahasiswa\ semester\ akhir} \times 100\%$$

4a-N	SS: Pembelajaran Berdampak Tinggi							
	IKU: Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	
Realisasi	97,78%	98,04%	98,04%	98,2%	98,2%	98,21%	98,21%	Max/TLKV
Capaian	105,14	105,42	105,42	105,59	105,59	105,6	105,6	

Pada tahun 2021 terdapat total 61.775 orang peserta yang mengikuti ujian. Dari total tersebut, sebanyak 60.669 orang peserta lulus dengan nilai minimal baik. Dengan demikian dari **Rumus 3.5** didapat realisasi IKU "Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik" ini adalah sebesar 98,21%.

Sepanjang tahun 2021 BPPK telah melaksanakan hal-hal berikut.

a. Penyusunan kerangka naskah soal (KNS);
b. Validasi soal sebelum pelaksanaan ujian;
c. Pelaksanaan ujian pelatihan (PJJ dan *e-learning*).

Adapun rekomendasi rencana aksi yang sudah disusun oleh BPPK untuk dilaksanakan pusdiklat, balai diklat, dan PKN STAN adalah sebagai berikut.

a. Penyelenggaraan pembelajaran;
b. Pengembangan *tools* evaluasi; dan
c. Pelaksanan ujian.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
93%	96,12%	93%	93%	98,21%

Dari tabel diatas diketahui bahwa target IKU ini pada Renstra, tahun 2020, dan tahun 2021 adalah sama besarnya. Adapun pada tahun 2020 dan tahun 2021 BPPK berhasil mencapai target tersebut dengan nilai realisasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

4b-N Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital

Adapun IKu ini bertujuan untuk mengukur kesiapan BPPK dalam mendukung transformasi digital Kementerian Keuangan serta tingkat aksesibilitas dan cakupan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. Sementara itu program pelatihan yang diselenggarakan BPPK terdiri atas program pelatihan klasikal (*full* tatap muka), *blended elarning*, dan *fully e-learning*. Jumlah program mengacu pada kalender pelatihan terbaru.

Program pembelajaran digital yang dimaksud dalam IKU ini adalah seluruh program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK dengan metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), *fully e-learning* termasuk *microlearning* sepanjang tahun 2021. Perhitungan *e-learning* dan *microlearning* adalah sebagai berikut.

- Satu program *e-learning* utuh, walaupun terdiri atas beberapa *microlearning* dihitung sebagai satu program.
- Setiap *microlearning* dihitung sebagai satu program.

Adapun peserta program pembelajaran digital adalah seluruh peserta dari Kementerian Keuangan dan KLID yang menyelesaikan program PJJ, *fully e-learning*, dan *microlearning* dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Peserta *e-learning* (walaupun terdiri atas rangkaian *microlearning*) yang mendapatkan penugasan pada *e-learning* tersebut dihitung satu kali sebagai peserta *e-learning* (bukan peserta *microlearning*);
b. Peserta *microlearning open access* dihitung satu kali untuk setiap *microlearning* yang diikuti.

Formula untuk menghitung realisasi IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.6: Formula Penghitungan Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan *Knowledge* Pada Platform KLC

$$Realisasi = (60\% \times Komponen\ A + 40\% \times Komponen\ B)$$

Adapun Komponen A adalah jumlah program pembelajaran digital yang diselenggarakan dibandingkan dengan jumlah seluruh program yang diselenggarakan. Sedangkan Komponen B adalah jumlah peserta program pembelajaran digital yang diselenggarakan dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta pelatihan.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

4b-N	SS: Pembelajaran Berdampak Tinggi							
	IKU: Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	30%	30%	30%	30%	70%	70%	
Realisasi	41,76%	62,12%	62,12%	87,43%	87,43%	99,43%	99,43%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	120	120	120	120	120	120	

Pada pelaksanaan IKU "Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital" diketahui isu-isu utama sebagai berikut.

a. Telah diselenggarakan 857 program pembelajaran digital dari total seluruh program pembelajaran tahun 2021 sebanyak 865 program.
b. Terdapat 360.190 peserta pembelajaran digital, dari total seluruh peserta pembelajaran tahun 2021 sebanyak 360.366 peserta.
c. Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 99,43%.

Dari hal-hal tersebut terimplikasi bahwa capaian pembelajaran digital pada tahun 2021 sangat besar karena pada kondisi pandemi COVID-19 sangat terbatas sekali pelatihan yang dapat diselenggarakan dengan metode klasikal.

Pelaksanaan IKU ini pada periode berikutnya memiliki akar masalah yaitu masih belum terdapat kepastian dapat terselenggaranya pelatihan klasikal pada tahun 2022. Jika tidak dapat dilakukan pelatihan klasikal pada tahun 2022 atau dapat dilaksanakan dengan terbatas, maka sebagian besar pelatihan tahun 2022 akan dilakukan secara digital (menggunakan metode PJJ, *e-learning*, maupun *microlearning*) sehingga IKU ini menjadi tidak relevan lagi untuk diukur.

Sepanjang tahun 2021 BPPK telah melaksanakan tindakan-tindakan berikut.

a. Penyusunan program dan penyelenggaraan PJJ, *e-learning*, dan *microlearning*;
b. Penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-6/PP/2021 tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Penetapan Surat Edaran Kepala BPPK Nomor SE-4/PP/2021 terkait pelaksanaan pembelajaran klasikal di era *new normal*.

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk dilaksanakan pusdiklat dan balai diklat sepanjang tahun periode berikutnya antara lain:

a. Penyusunan desain pembelajaran;
b. Pelaksanaan *e-learning* dan *microlearning*;
c. Pelaksanaan PJJ.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
50%	82,52%	70%	70%	99,43%

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020 terjadi kenaikan target yang cukup besar (naik sebanyak 20%). Meskipun demikian, BPPK pada tahun 2021 berhasil melaksanakan realisasi melebihi target baik target tahunan maupun target Renstra.

4c-N Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran

IKU ini mengukur dua buah hal, yaitu kualitas pembelajaran dan validasi program. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandardisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran (standar mutu) mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasarkan pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK. Pengukuran kualitas pembelajaran tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-97/PP/2018, KEP-124/PP/2019, dan KEP-50/PP/2020. Apabila terdapat pedoman yang belum ditetapkan maka pelaksanaan penjaminan mutu berpedoman pada peraturan atau keputusan terkait hal-hal berikut.

a. Analisis kebutuhan pembelajaran;
b. Desain pembelajaran;
c. Validasi program;
d. Penyelenggaraan pembelajaran; dan
e. Sarana dan prasarana pembelajaran.

Pelaksanaan penjaminan standar kualitas ini dikoordinasikan oleh Sekretariat BPPK secara semesteran.

Sementara itu validasi program pelatihan adalah pengesahan terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pelatihan dan materi pelatihan dengan kebutuhan peserta pelatihan dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut. Adapun program pelatihan yang divalidasi adalah program pelatihan hasil rancangan pusdiklat. Berikut adalah ketentuan mengenai program pelatihan yang divalidasi:

a. Seluruh program pelatihan baru yang akan diselenggarakan tahun 2021;
b. Seluruh program pelatihan lama yang belum divalidasi dan akan diselenggarakan tahun 2021;
c. Termasuk program *e-learning* dan PJJ;
d. Tetapi tidak termasuk pelatihan insidental.

Program pelatihan yang mendapat nilai validasi A adalah jika nilai tiap komponen mendapatkan nilai minimal 4 serta tidak ada variabel yang mendapat nilai kurang dari 3 dan dinyatakan tervalidasi baik sekali. Kategori penilaian validasi program ini berdasarkan hasil penilaian Tim Validasi Program Pelatihan. Adapun Tim Validasi Program Pelatihan terdiri atas pihak internal dan eksternal BPPK.

Formula untuk menghitung realisasi atas IKU "Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran" adalah sebagai berikut.

Rumus 3.7: Penghitungan IKU Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran

$$Realisasi = (Capaian\ Komponen\ A \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ B \times 50\%)$$

Adapun Komponen A adalah pengukuran atas kualitas pembelajaran dengan kriteria:

- Indeks 5 untuk nilai 90 s.d. 100;
- Indeks 4 untuk nilai 80 s.d. 89,99;
- Indeks 3 untuk nilai 70 s.d. 79,99;
- Indeks 2 untuk nilai 50 s.d. 69,99;
- Indeks 1 untuk nilai 0 s.d. 49,99.

Tahun 2021 target untuk Komponen A ini adalah indeks 5.

Sementara itu Komponen B adalah pengukuran atas validasi program pembelajaran yang dihitung dengan menggunakan formula berikut.

Rumus 3.8: Penghitungan Komponen B IKU Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran

$$Nilai = \frac{Jumlah\ program\ pelatihan\ yang\ mendapat\ nilai\ validasi\ A}{Jumlah\ program\ pelatihan\ yang\ divalidasi} \times 100\%$$

Tahun 2021 target untuk Komponen B ini adalah 100%.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

4c-N	SS: Pembelajaran Berdampak Tinggi IKU: Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	*N/A*	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	100	100	100	100	100	100	

Isu utama dalam pelaksanaan IKU ini tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Penilaian pemenuhan standar kualitas pembelajaran dilakukan secara semesteran pada seluruh pusdiklat dan balai diklat;
b. Validasi program pembelajaran dilakukan secara semesteran pada seluruh program yang diusulkan oleh pusdiklat untuk divalidasi (program baru dan/atau program lama dengan revisi mayor);
c. Standar kualitas pembelajaran periode semester I tahun 2021 di BPPK memiliki indeks 5 dari target 5 (capaian sebesar 100%);
d. Terdapat total 159 program pelatihan yang divalidasi pada periode semester I tahun 2021 dan seluruhnya mendapatkan nilai validasi A;
e. Standar kualitas pembelajaran periode semester II tahun 2021 di BPPK memiliki indeks 5 dari target 5 (capaian sebesar 100%);
f. Terdapat total 180 program pelatihan yang divalidasi pada periode semester II tahun 2021 dan seluruhnya mendapatkan nilai validasi A.

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 ini menyebabkan proses penilaian standar kualitas pembelajaran dan validasi program pelatihan dilakukan dengan metode jarak jauh. Meskipun demikian, proses penilaian kedua komponen tersebut berlangsung dengan lancar dan berhasil.

Berikut adalah tindakan-tindakan yang telah dilakukan BPPK sepanjang tahun 2021.

a. Telah disusun pedoman standar kualitas pembelajaran yang telah mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana terdapat lebih banyak pelatihan digital (PJJ dan *e-learning*) dibandingkan dengan pelatihan klasikal;
b. Telah selesai dilakukan penjaminan kualitas pembelajaran periode semester I tahun 2021;
c. Telah selesai dilakukan proses validasi program periode semester I tahun 2021;
d. Telah selesai dilakukan penjaminan kualitas pembelajaran periode semester II tahun 2021;
e. Telah selesai dilakukan proses validasi program periode semester II tahun 2021.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang telah disusun untuk dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan BPPK secara semesteran pada periode mendatang antara lain:

a. Proses validasi program pelatihan;
b. Proses penjaminan mutu pembelajaran.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
4	5	4	100	100

Baik dalam Renstra maupun tahun 2020, target yang ditetapkan adalah nilai 4 dari skala 5. Sedangkan pada tahun 2021 target merupakan nilai 100 dari skala 100. Hal tersebut dikarenakan baik pada tahun 2020 maupun pada perencanaan pada Renstra indikator yang diukur hanyalah indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran. Sedangkan pada tahun 2021 IKU mengukur

pula indeks pemenuhan validasi program pembelajaran. Apabila dipisahkan perhitungannya, BPPK pada tahun 2021 mendapatkan realisasi indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran sebesar 5. Adapun realisasi indeks pemenuhan validasi program pembelajaran adalah sebesar 100%.

SS-5. Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPPK mengidentifikasikan satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5a-N	Persentase Kualitas Program Sertifikasi	80%	98,8%	120

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan” ini adalah sebagai berikut.

5a-N Persentase Kualitas Program Sertifikasi

IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi dilakukan sesuai janji layanan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu program sertifikasi yang diukur pada IKU ini adalah sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran, Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP), AKPD, Ahli Kepabeanan, dan sertifikasi pada PKN STAN.

Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 4 yang dilakukan ketika ujian sertifikasi berlangsung atau melalui situs web sebagai bentuk konfirmasi mengambil sertifikat. Adapun pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 80% peserta menyatakan puas terhadap layanan program sertifikasi.

Aspen layanan yang dinilai meliputi:

- Penyampaian informasi terkait penyelenggaraan ujian (tempat dan waktu);
- Alokasi waktu ujian;
- Kelayakan tempat dan sarana prasarana ujian;
- Informasi terkait hasil ujian; dan
- Profesionalitas petugas saat ujian.

Sementara itu aspek kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi meliputi:

a. Penyiapan sarana dan prasarana;
b. Penyiapan naskah soal;
c. Penyiapan administrasi ujian;

d. Ketersediaan tim penguji sebelum ujian;
e. Kesesuaian pelaksanaan ujian dengan jadwal;
f. Ketersediaan dokumentasi ujian.

Formula untuk menghitung realisasi IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.9: Formula Penghitungan Realisai IKU Persentase Kualitas Program Sertifikasi

$$Realisasi = (40\% \times Komponen\ A) + (60\% \times Komponen\ B)$$

Adapun Komponen A adalah persentase kepuasan peserta atas penyelenggaraan sertifikasi/ kesesuaian janji layanan. Sedangkan Komponen B adalah persentase kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

5a-N	SS: Sertifikasi Kompetensi yang Sesuai Kebutuhan							
	IKU: Persentase Kualitas Program Sertifikasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	80%	80%	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	98,8%	98,8%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120	120	

Program sertifikasi di BPPK pada tahun 2021 direncanakan akan diselenggarakan oleh Pusdiklat AP, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat KNPK, dan Politeknik Keuangan Negara STAN. Akan tetapi Pusdiklat AP tidak menyelenggarakan sertifikasi pada tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2021 telah diukur sertifikasi pada:

a. Pusdiklat Bea dan Cukai, dengan responden sebanyak 88 orang dengan nilai kesesuaian 100% dan kepuasan 100%;
b. Pusdiklat KNPK, dengan responden sebanyak 88 orang dengan nilai kesesuaian 96,33% dan kepuasan 100%;
c. PKN STAN, dengan responden sebanyak 1.569 orang dengan nilai kesesuaian 100% dan kepuasan 96,49%.

Akar masalah yang masih ditemui pada tahun 2021 dalam kaitannya dengan pelaksanaan IKU ini adalah bahwa kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan proses sertifikasi dilakukan dengan metode jarak jauh (tidak dengan metode tatap muka).

Tindakan yang dilaksanakan BPPK sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-2/PP/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Keuangan Negara di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
b. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan sertifikasi.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilaksanakan oleh Pusdiklat AP, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat KNPK, dan PKN STAN pada periode tahun selanjutnya adalah meliputi:

a. Persiapan proses sertifikasi;
b. Pelaksanaan ujian kompetensi sesuai dengan janji layanan dan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Persentase Kualitas Program Sertifikasi” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
80%	99,74%	80%	80%	98,8%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Meskipun demikian, capaian tahun 2021 tetap memenuhi target tahun 2021 maupun target renstra dengan nilai capaian sebesar 120.

SS-6. Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas

BPPK mengidentifikasikan satu buah indikator kinerja dalam pencapaian SS ini. Adapun pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6a-N	Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC	100%	116%	116

Indeks capaian untuk SS ini adalah **116** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas” ini adalah sebagai berikut.

6a-N Persentase Pemanfaatan *Knowledge* Pada Platform KLC

Kemenkeu *Learning Center* (KLC) merupakan media pembelajaran daring yang berisi berbagai materi tentang pengelolaan keuangan negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai

Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. KLC dapat diakses melalui laman https://klc2.kemenkeu.go.id.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan *knowledge document* atau materi pembelajaran di bidang keuangan negara pata platform KLC. Adapun *knowledge* yang diukur pemanfaatannya dalam IKU ini adalah seluruh materi atau *knowledge document* yang ada pada menu Pusat Pengetahuan (*Knowledge Center*). IKU ini diukur melalui tiga aspek, antara lain sebagai berikut.

a. Efektivitas pengelolaan *Community of Practice* (CoP), diukur berdasarkan jumlah *lesson learned* dari CoP yang aktif dikelola oleh BPPK. Adapun CoP dikatakan aktif apabila memiliki setidaknya satu dokumentasi *lesson learned* yang diunggah ke KLC.
b. *User engagement*, diukur berdasarkan *bounce rate* KLC v2 dan jumlah *unique pageviews*.
c. Kualitas konten, diukur berdasarkan rata-rata *rating* yang diberikan oleh pengunjung terhadap konten yang ada di menu Pusat Pengetahuan (*Knowledge Center*) yang telah mendapatkan penilaian/ *rating* minimal 30 kali.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

6a-N	SS: Manajemen Pengetahuan yang Berkualitas							
	IKU: Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	20%	35%	35%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	83,11%	111%	111%	113,33%	113,33%	116%	116%	Max/TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	116	116	

Isu utama terkait pelaksanaan IKU ini antara lain sebagai berikut.

a. Realisasi *lesson learned* CoP sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100 dari target sebesar 100%.
b. *Bounce rate* KLC v2 adalah sebesar 19,43% (*minimize*) dengan capaian sebesar 120 dari taraget 30%.
c. Jumlah *unique pageview knowledge* adalah 754.820 dengan capaian 120 dari target sebanyak 277.000.
d. Rata-rata *rating knowledge* adalah sebesar 4,85 (skala 5) dengan capaian 120 dari target 4 dari skala 5.

Selama pelaksanaan IKU ini pada tahun 2021 ditemukan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara digital semakin memperkuat pemanfaatan platform KLC. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *unique pageview* dan baiknya *bounce rate*. Meskipun kedua aspek tersebut memmiliki realisasi yang menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (realisasi *unique pageview* sebesar 2.220.511 dan realisasi *bounce rate* sebesar 41,62%), tetapi BPPK tetap mencapai target-target yang telah ditetapkan masing-masing.

Berikut ini adalah tindakan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan IKU ini.

a. Kampanye pemanfaatan KLC sebagai media pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan melalui media sosial.
b. Telah diunggah *knowledge capture* pada KLC dan digunakan sebagai materi suplemen pembelajaran.
c. Sedang dalam proses migrasi dokumen pengetahuan dari KLC v1 ke dalam KLC v2.

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk dapat dilaksanakan oleh pusdiklat dan PKN STAN sepanjang tahun 2022 adalah:

a. Penyusunan *knowledge document*.
b. Penggunaan *knowledge document* yang ada di KLC sebagai pemerkaya materi pembelajaran.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Pemanfaatan *Knowledge* Pada Platform KLC" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
100%	111,46%	100%	100%	116%

SS-7. Organisasi dan SDM yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPPK mengidentifikasikan tiga buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	96,10%	115,56%	120
7b-CP	Indeks Integritas Organisasi	95,1	110,53	116,29
7c-CP	Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*	85%	98,16%	112,18

Indeks capaian untuk SS ini adalah **116,17** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Organisasi dan SDM yang Optimal" ini adalah sebagai berikut.

7a-CP Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah pejabat yang telah sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan penyelesaian *re-Accessment Center* (re-AC) bagi pejabat yang nilai AC-nya telah kedaluwarsa pada tahun 2020. Adapun IKU ini mengukur jumlah pejabat PNS Kementerian

Keuangan yang telah sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (JPM minimal 80%) dan penyelesaian re-AC bagi pejabat PNS Kementerian Keuangan yang nilai AC-nya telah kedaluwarsa pada tahun 2020.

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Adapun *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi manajerial pejabat dengan SKJ untuk kompetensi manajerial.

Formula untuk menghitung realisasi IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.10: Formula Penghitungan Realisasi IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

$$Realisasi = (Komponen\ A \times 50\%) + (Komponen\ B \times 50\%)$$

Adapun Komponen A adalah perbandingan antara jumlah pejabat dengan JPM ≥ 80% dengan jumlah pejabat yang telah mengikuti AC. Sedangkan Komponen B adalah perbandingan antara jumlah pejabat yang nilai AC-nya kedaluwarsa dan telah di-re-AC pada tahun 2021 dengan 75% pejabat yang nilai AC-nya kedaluwarsa tahun 2020.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

7a-CP	SS: Organisasi dan SDM yang Optimal							
	IKU: Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	96,10%	96,10%	
Realisasi	*N/A*	82,08%	82,08%	106,49	106,49	115,56%	115,56%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	120	120	

Isu utama dan implikasi pada pelaksanaan IKU ini tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Adanya rumus penghitungan manual IKU yang baru terkait capaian pemenuhan JPM ini, yaitu tidak hanya JPM minimum saat ini namun juga adanya target pelaksanaan re-AC bagi peagwai dengan hasil AC-nya kedaluwarsa di tahun 2021.
b. Adanya kenaikan target minimum JPM pejabat menjadi JPM minimal 80% (tahun 2020 minimal JPM adalah sebesar 78%) sehingga pejabat yang telah memenuhi JPM tahun lalu namun belum mencapai JPM 80% menjadi target peserta re-AC kembali di tahun 2021.

Akar permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut.

a. Tingkat pemahaman mengenai urgensi perlunya dilakukan re-AC bagi para pegawai dan pemahaman mengenai kamus kompetensi yang baru dan adanya kenaikan minimal JPM pajabat dapat berdampak pada hasil AC baru dan adanya risiko penurunan JPM.
b. Proses re-AC melalui media daring karena kondisi pandemi COVID-19 merupakan hal baru bagi pegawai sehingga masih memerlukan adaptasi dengan metode baru yang dimungkinkan dapat berdampak pada hasil *assessment* pegawai.
c. Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan AC secara daring sehingga belum dapat dilaksanakan untuk seluruh pegawai BPPK yang harus mengikuti kegiatan AC.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. AC untuk jabatan administrator dan pengawas yang mulai diselenggarakan pada Februari 2021 dan April 2021. AC untuk jabatan pengawas sebagian besar telah selesai dilaksanakan s.d. Oktober 2021. Terdapat dua orang pejabat pengawas belum mengikuti AC dengan sembilan kompetensi. AC untuk JPT Madya yang telah mengikuti AC mulai dilaksanakan pada Agustus 2021 s.d. Desember 2021, terdapat lima orang pejabat JPT Madya yanag telah mengikuti AC dengan sembilan kompetensi.
b. Telah diselenggarakan *online group coaching* dan sosialisasi AC kepada para calon peserta AC dalam rangka persiapan re-AC;
c. Pegawai pada jabatan pegawas telah mengikuti *E-Learning* PPKMSK terlebih dahulu sebagai bentuk pengembangan kompetensi sebelum mengikuti kegiatan re-AC.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilakukan pada tahun mendatang oleh Sekretariat BPPK dan seluruh unit di lingkungan BPPK antara lain:

a. Memetakan pegawai yang belum mengikuti AC dengan sembilan kompetensi serta pegawai yang memiliki HAC kurang dari 80%;
b. Menyampaikan kebutuhan *feedback* melalui *online group couching* kepada Biro SDM Sekretariat Jenderal untuk pegawai dengan HAC kurang dari 80%;
c. Menyelenggarakan AC sesuai dengan jadwal;
d. Melakukan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawainya, terutama penyelenggaraan re-AC dengan sembilan kompetensi;
e. Melakukan *monitoring* terhadap realisasi rencana pengembangan kompetensi peagwai dan ketepatan penyampaian HAC dari penyelenggara *assessment* baik dari Biro SDM maupun Pusdiklat KM;
f. Menyediakan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang disediakan untuk mengembangkan kompetensi para pegawai.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
93,67%	98,00%	94%	96,10%	115,56%

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 BPPK berhasil mencapai target IKU ini. Hal ini menandakan terdapatnya komitmen yang tinggi dari BPPK untuk mengembangkan SKJ bagi para pejabatnya.

7b-CP Indeks Integritas Organisasi

IKU ini mengukur dua hal:

a. Pemenuhan kriteria ZI-WBK berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB); dan
b. Survei persepsi publik dan internal atas integritas Kementerian Keuangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal.

Adapun IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kementerian Keuangan (responden eksternal) dan menjadikan *pilot project* perwujudan *good governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Formula untuk menghitung realisasi IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.11: Formula Penghitungan Realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi

$$Realisasi = \frac{(Capaian\ IPI + Capaian\ ZI\ WBK)}{2}$$

IKU “Indeks Integritas Organisasi” ini memiliki dua buah sub-IKU, yaitu:

a. Indeks Penilaian Integritas (IPI)

   Sub-IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kementerian Keuangan (responden eksternal).

   Adapun isu utama pada pelaksanaan sub-IKU ini antara lain:
   - Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/ pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.
   - Responden terdiri atas responden internal (pegawai Kementerian Keuangan, dengan kriteria ASN masa kerja minimal satu tahun di unit sampel) dan responden eksternal (pengguna layanan dan rekanan, dengan kriteria pengguna layanan dalam kurun waktu 12 bulan).

- Komponen penilaian integritas terdiri atas komponen internal (budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran) dan komponen eksternal (transparansi, sistem antikorupsi, dan integritas pegawai).
- Tahun 2021 BPPK mendapatkan realisasi IPI sebesar 91,06 atau nilai capaian 101,07 dari target sebesar 90,1. Nilai IPI tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai IP tahun 2020 sebesar 87,72.

b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

Sub-IKU ini bertujuan untuk menjadikan *pilot project* perwujudan *good governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguasan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri atas subkomponen survei persepsi antikorupsi minimal 13,5 dan subkomponen persentasei TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 15.

Adapun isu utama pada pelaksanaan sub-IKU ini antara lain:

- Target BPPK tahun 2021 adalah satu unit lolos sebagai ZI WBK. Saat ini sudah ada tiga unit di lingkungan BPPK yang memperoleh predikat ZI WBK.
- Nilai ZI WBK BPPK adalah 139,77 dari target 100 sehingga memiliki nilai capaian sebedsar 120. Nilai ini meningkat tipis dari realisasi tahun 2020 sebesdar 139,27.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

7b-CP	SS: Organisasi dan SDM yang Optimal							
	IKU: Indeks Integritas Organisasi							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	95,1	95,1	Max/TLKV
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	110,53	110,53	
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	116,29	116,29	

Akar permasalahan dalam pelaksanaan IKU “Indeks Integritas Organisasi” ini antara lain:

a. *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap hasil PPI tahun 2020 tidak dapat dihadiri oleh para PIC dari unit, hanya diahdiri oleh pegawai (responden) yang dipilih oleh Inspektorat Jenderal

sehingga tidak bisa mendapatkan informasi yang lengkap terhadap hasil konfirmasi isian responden.
b. Survei Penilaian Integritas Tahun 2020 menggunakan format kuesioner yang baru dan berbeda dengan format sebelumnya.
c. Pemilihan unit sampel maupun responden pengisi survei (baik internal maupun eksternal) ditentukan sepenuhnya oleh Inspektorat Jenderal.

Berikut ini adalah beberapa tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPPK dalam tahun 2021.

a. Membuat matriks *positive value* dan rencana aksi tindak lanjut atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2020.
b. Penyampaian data dukung SPI BPPK ke Inspektorat Jenderal dengan nota dinas Sekretaris BPPK nomor ND-1807/PP.1/2021 tanggal 28 Mei 2021.
c. *Benchmarking Positive Value* SPI yang dilaksanakan pada 4 Juni 2021 ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SPI tahun 2020.
e. Penilaian ZI WBK level Kementerian Keuangan oleh Inspektorat Jenderal.
f. Sudah dilakukan survei IPI pada unit-unit sampel di BPPK dan akan ditindaklanjuti dengan FGD.

Adapun rencana aksi yang direkomendasikan akan dilaksanakan oleh Sekretariat BPPK dan seluruh unit di lingkungan BPPK sepanjang tahun 2022 antara lain:

a. *Monitoring* hasil tindak lanjut IPI tahun 2021.
b. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait pemilihan unit sampel dan metode penilaian.
c. Menyampaikan informasi kepada unit sampel terkait mekanisme pelaksanaan PPI tahun 2022.
d. *Monitoring* pelaksanaan PPI tahun 2022.
e. Mengikuti pelaksanaan konfirmasi hasil survei pada FGD dan *in depth interview* antara unit yang menjadi responden dan Inspektorat Jenderal untuk mendapatkan data perbaikan yang lebih komprehensif.
f. Menyusun konsep pedoman penguatan integritas di lingkungan BPPK.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Integritas Organisasi” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
95,05	108,68	-	95,1	110,53

7c-CP Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*

Transformasi digital merupakan bagian dari misi Kementerian Keuangan yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen

transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut, dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 4 Desember 2020 telah ditetapkan 26 Inisiatif Strategis (IS) Program RBTK (IS RBTK), termasuk di antaranya 5 IS terkait *data analytics*.

Adapun IKU ini bertujuan untuk me-*monitor* dan memastikan implementasi IS RBTK (termasuk di dalamnya proyek *data analytics*) terlaksana sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi waktu maupun kualitas.

BPPK dan Sekretariat Jenderal bertanggung jawab pada *digital transformation initiative* nomor 6, yaitu *Modern E-learning* sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM. Adapun pengukuran atas realisasi IKU ini dilakukan oleh *Central Transformation Office* (CTO) Kementerian Keuangan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas BPPK dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, BPPK menginisiasi peningkatan penyelenggaraan pembelajaran *e-learning* di Kementerian Keuangan secara lebih masif melalui platform KLC. BPPK kemudian menginisiasi IS "*Modern E-learning* Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM" pada tahun 2019. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain:

a. Penyediaan infrastruktur TIK dan pembelajaran multimedia oleh Pusintek;
b. Implementasi *full e-learning* dengan target 70%;
c. Digitalisasi materi pembelajaran (kualitas dan kuantitas);
d. Peningkatan fungsionalitas dan integrasi *Learning and Knowledge Management System* (LKMS) Kementerian Keuangan;
e. *Change management* implementasi dan budaya *e-learning*.

Selain itu, BPPK mengemban peran penting dalam menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang kompeten untuk menunjang keberhasilan visi misi Kementerian Keuangan. Dalam rangka menjalankan peran tersebut, BPPK terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan. Pemanfaatan *data analytics* untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran serta pengembangan kapasitas SDM peserta pelatihan menjadi salah satu strategi yang ditempuh BPPK.

Saat ini BPPK telah memiliki dan memanfaatkan platform KLC sebagai media pembelajaran daring. Meskipun telah tersedia beragam layanan dalam KLC tersebut, BPPK memandang perlu fitur kemampuan untuk mengenai pelatihan sesuai peminatan dan kebutuhan setiap pegawai Kementerian Keuangan. Layanan tersebut diperlukan agar memberikan kemudahan serta pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Hal tersebut mendorong BPPK menginisiasi pemanfaatan *data analytics* dalam pengembangan SDM Kementerian Keuangan yang tergabung dalam IS "*Data Analytics* Tema Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien (Sentral)" yang terdiri atas sejumlah proyek *data analytics*.

Dalam IS tersebut, salah satu proyek *data analytics* yang dikembangkan oleh BPPK pada tahun 2021 adalah *Data Analytics to Improve Learning Process* yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar pegawai pada platform KLC. Tahapan pada proyek ini yang telah diselesaikan pada tahun 2021 adalah integrasi dengan sistem KLC dan implementasi aplikasi.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

7c-CP	SS: Organisasi dan SDM yang Optimal							
	IKU: Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	6,07%	15,95%	15,95%	26,02%	26,02%	85%	85%	
Realisasi	17,92%	45,22%	45,22%	69,81%	69,81%	98,16%	98,16%	Max/TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	112,18	112,18	

Isu utama dan implikasi akan pelaksanaan IKU ini adalah bahwa dua buah aplikasi yang dikembangkan oleh BPPK, yaitu aplikasi Semantik dan KLC v2 menyimpan data-data yang sama atau sejenis, yaitu bertemakan tentang pelatihan, serta belum ada interkoneksi yang menghubungkan keduanya.

Di samping itu, akar masalah yang ada selama ini adalah belum tersedianya konsep *data analytics* yang menyediakan rekomendasi data pengawai untuk dapat ditugaskan dalam suatu pelatihan (dengan parameter-parameter tertentu).

Adapun tindakan-tindakan yang sudah dilaksanakan antara lain:

a. Telah dilakukan koordinasi dengan Pusintek dan Biro SDM untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan data untuk melengkapi *data warehouse*.
b. Telah dilakukan pengembangan aplikasi *Machine Learning* Pembelajaran dengan modul *data analytics* rekomendasi pegawai untuk mengikuti pelatihan menggunakan *framework* Apriori dan bahasa pemrograman Python dan dapat diakses melalui tautan https://mcl.klc.kemenkeu.go.id.
c. Telah dibuat konsep dasar rencana implementasi *data warehouse* untuk KLC dan Semantik dalam rangka integrasi data pelatihan.
d. Menginterkoneksikan *data warehouse* BPPK dan hasil rekomendasi peserta pelatihan dari aplikasi *Machine Learning* Pembelajaran ke dalam aplikasi *Dashboard Pembelajaran* untuk Pengelola Unit Eselon I (DAEBAK UE1).
e. Telah menyelesaikan pengembangan *data warehouse* BPPK.
f. Penyusunan rencana *data analytics* pengembangan kompetensi SDM.
g. Penyusunan rencana *data analytics to improve learning process*.
h. Penyusunan laporan penetapan fitur *data analytic*.

Output dari IS *Modern E-learning* tahun 2021 adalah berupa pelaksanaan 99,43% program pembelajaran secara *full e-learning* (pembelajaran digital) yang terdiri atas 857 program dan diikuti oleh 360.190 orang peserta dengan capaian *output* 5.950.498 jamlator dan berhasil menghemat anggaran penyelenggaraan pelatihan sebesar 92,76% dan belanja perjalanan dinas pelatihan sebesar 99,73%. Penghematan anggaran penyelenggaraan pelatihan diperoleh dengan membandingkan antara realisasi anggaran penyelenggaraan tahun 2021 sebesar Rp18.308.691.618,00 dengan realisasi tahun 2018 (tahun sebelum implementasi IS *Modern E-learning*) sebesar Rp252.735.610.265,00 (terdapat penurunan biaya sebesar Rp234.426.918.647,00 atau sebesar 92,76%). Adapun penghematan anggaran perjalanan dinas pada *output* pelatihan di lingkungan BPPK diperoleh dengan membandingkan realisasi biaya perjalanan dinas dalam negeri

tahun 2021 sebesar Rp129.445.622,00 dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp48.114.068.752,00 (terjadi penurunan biaya perjalanan dinas sebesar Rp47.984.623.130,00 atau sebesar 99,73%). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dengan perubahan metode pembelajaran dari klasikal ke digital telah berdampak pada turunnya anggaran perjalanan dinas.

Outcome dari implementasi IS *Modern E-learning* yaitu perubahan budaya belajar pegawai yang semakin mandiri dan mengarah pada *digital learning* serta pemenuhan gap kompetensi individu. Hal tersebut dapat terlaksana dengan ketersediaan materi pembelajaran digital yang dapat diakses melalui KLC untuk memenuhi kebutuhan kekurangan kompetensi pegawai.

Sementara itu, *output* dari IS *Data Analytics* adalah rekomendasi pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan pada aplikasi KLC. Hasil dari algoritma di *machine learning* digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi pelatihan di KLC. Adapun *outcome* dari IS *Data Analytics* yaitu peningkatan pengalaman dan *performance* pembelajaran peserta pelatihan. Rekomendasi pelatihan yang diberikan kepada pegawai pada KLC nantinya akan mengarah ke *personalized learning* yang dapat berbeda pola rekomendasi pembelajaran pada masing-masing pegawai. Hal tersebut memberikan pengalaman baru pada proses pembelajaran yang sebelumnya belum ada di KLC.

Sementara itu rekomendasi rencana aksi pada periode tahun 2022 adalah pengembangan fitur *expert locator* pada aplikasi *Knowledge Management System* (KMS). Adapun UIC untuk rekomendasi rencana aksi ini adalah Sekretariat BPPK (Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
85%[2]	93,42%	-	85%	98,16%

SS-8. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

BPPK mengidentifikasikan tiga buah indikator kinerja dalam pencapaian SS ini. Adapun pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	89,5%	*N/A*	*N/A*
8b-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	90	95,79	106,43

Berlanjut ke halaman berikutnya »

[2]Tahun 2020 belum memperhitungkan penyelesaian *data analytics*

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8c-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	97,3%	101,88

Indeks capaian untuk SS ini adalah **104,5** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS "Pengelolaan Keuangan yang Optimal" ini adalah sebagai berikut.

8a-CP Persentase Rekomendasi BPK Atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Adapun IKU ini mengukur tindak lanjut pemerintah terhadap temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang perlu diselesaikan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi atas temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/ rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan auditor BPK.
b. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

8a-CP	SS: Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	IKU: Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	30%	30%	30%	30%	89,5%	89,5%	
Realisasi	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	

LKPP dan LK BUN tahun 2019 telah diaudit oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rekomendasi yang disampaikan oleh BPK ditindaklanjuti oleh masing-masing unit sesuai dengan

kewenangannya. Adapun penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti tersebut diukur secara semesteran dengan taraget akumulatif pada semester I adalah 30% dan semester II adalah 89,5%.

Baik pada periode semester I maupun semester II tahun 2021 IKU ini tidak dapat dihitung capaiannya karena tidak ada rekomendasi *outstanding* pada LKPP dan LK BUN tahun 2019 yang perlu ditindaklanjuti oleh BPPK.

Dengan demikian akar masalah pelaksanaan IKU ini adalah tidak terdapatnya rekomendasi *outstanding* pada LKPP dan LK BUN tahun 2019 dan 2020 dengan BPPK sebagai UIC-nya menyebabkan IKU ini tidak dapat diukur realisasinya (capaian *N/A*, atau berstatus abu-abu).

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPPK adalah melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) Sekretariat Jenderal.

Sedangkan rekomendasi rencana aksi untuk periode Januari s.d. Maret 2022 dengan UIC Sekretariat BPPK (Bagian Keuangan) adalah melakukan koordinasi dengan Rocankeu dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait hasil pemeriksaan BPK tahun 2021.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Persentase Rekomendasi BPK Atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
89%	92,52%	-	89,5%	*N/A*

8b-CP Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15

IKU ini diukur dari dua buah komponen, yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015. Adapun IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh BPK dan mendorong peningkatan atau perbaikan LK BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tingkat penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada empat kriteria. Keempat kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/ nilai berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK terhadap LK Kementerian Keuangan (BA 015). Adapun indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20 bahwa BPPK memantau pelaskanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran atau

rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

8b-CP	SS: Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	IKU: Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	70	70	70	70	90	90	
Realisasi	*N/A*	70	70	70	70	95,79	95,79	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	100	100	100	100	106,43	106,43	

Isu utama dan implikasi atas pelaksanaan IKU ini adalah sebagai berikut.

a. Pada semester II tahun 2021 realisasi IKU "Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15" ini diperoleh dari unsur nilai opini BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga mendapatkan nilai 100% × 70 = 70.
b. Adapun untuk perhitungan IKU pada semester II akan diperhitungkan pula unsur penyelesaian rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.
c. Sementara itu terdapat rekomendasi temuan pemeriksaan BPK yang belum selesai dengan 3 poin utama sebagai berikut.
    - Belum adanya progres realisasi penyetoran piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL (BDK Manado, Pusdiklat KNPK, PKN STAN, dan BDK Pekanbaru).
    - Belum adanya progres realisasi penyetoran piutang oleh penyedia barang/jasa pada Pusdiklat KM.
    - Kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa (Pusdiklat Pajak).
d. Tindak lanjut temuan LK BA 015 tahun 2020 pada PKN STAN sudah disampaikan ke Rocankeu pada tanggal 24 Agustus 2021.

Akar masalah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan IKU ini antara lain:

a. Kurangnya koordinasi antara satuan kerja (satker) di lingkungan BPPK dengan mitra KPKNL terkait proses penagihan piutang.
b. Kurangnya koordinasi antara satker dengan penyedia barang/jasa terkait pembahasan penyelesaian rekomendasi temuan.
c. Belum tercapainya kesepakatan antara auditor (baik internal maupun eksternal) dan *auditee* terkait besaran kelebihan bayar yang harus dikembalikan kepada Kas Negara.
d. Kurangnya pemahaman satker tentang pengelolaan piutang.

Adapun tindakan-tindakan berikut telah dilakukan oleh BPPK untuk menunjang pencapaian IKU ini.

a. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan tingkat Satker dan UE1.

b. Memfasilitasi permintaan dokumen BPK secara lengkap dan tepat waktu.
c. Menyampaikan informasi terkait progres pemeriksaan BPK kepada Inspektorat Jenderal.
d. Melakukan koordinasi dengan Rocankeu terkait tindak lanjut temuan BPK.
e. Melakukan koordinasi dengan satker terkait mengenai perkembangan tindak lanjut temuan BPK.
f. Meminta satker terkait untuk melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait proses penagihan piutang.

Sementara itu BPPK telah menyusun rekomendasi rencana aksi sebagai berikut.

a. Melakukan asistensi dan bimbingan kepada satker dalam penyusunan Laporan Keuangan berikutnya agar sesuai dengan rekomendasi dan kebijakan.
b. Melakukan koordinasi dengan satker terkait progres penagihan piutang yang telah diserahkan ke PUPN.
c. Melaksanakan pembahasan TLRHP semester II tahun 2021 dengan BPK.
d. Melakukan koordinasi dengan Rocankeu dan Inspektorat Jenderal terkait hasil reviu Inspektorat Jenderal atas tindak lanjut temuan BPK.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
85	94,43	-	90	95,79

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 baik target maupun realisasi yang berhasil diperoleh BPPK atas pelaksanaan IKU ini semakin meningkat. BPPK berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya dengan menjaga indeks kualitas pelaporan keuangannya.

8c-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dieprtanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Angaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Formula untuk menghitung realisasi atas pelaksanaan IKU ini adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

Rumus 3.12: Penghitungan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Realisasi Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Realisasi Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Realisasi Triwulan IV = (40% × *Capaian IKPA Januari s.d. Desember*) + (60% × *Capaian SMART*)

8c-N	SS: Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	IKU: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	95,50%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	
Realisasi	95,35%	94,06%	94,06%	95,8%	95,8%	97,3%	97,3%	Max/TLKV
Capaian	99,84	98,49	98,49	100,31	100,31	101,88	101,88	

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada periode triwulan I s.d. triwulan II capaian atas IKU ini masih di bawah nilai 100. Artinya pada periode tersebut BPPK belum berhasil merealisasikan targetnya. Akan tetapi mulai periode triwulan III nilai capaian atas IKU ini sudah berada di atas nilai 100.

Berikut adalah perincian perhitungan realisasi atas IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" ini.

Tabel 3.48: Perincian Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Bobot	Nilai	Realisasi
A	**Nilai IKPA**			**97,47**
1	Pengelolaan UP	8	4,09	0,35
2	Data Kontrak	10	4,17	0,42
3	Kesalahan SPM	5	3,96	0,22
4	Retur SP2D	5	99,98	0,21
5	Halaman III DIPA	5	3,99	0,22
6	Revisi DIPA	5	4,16	0,23
7	Penyelesaian Tagihan	10	4,17	0,42

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Uraian	Bobot	Nilai	Realisasi
8	Capaian Output	17	4,16	0,73
9	Rekon LPJ	5	4,17	0,21
10	Renkas	5	4,17	0,21
11	Realisasi	15	3,70	0,56
12	Pagu Minus	5	4,17	0,21
13	Dispensasi SPM	5	4,17	0,21
B	**Nilai SMART**			**97,18**
	Realisasi IKU PKPA			**97,30**

Isu utama dan implikasi pada tahun 2021 terkait pelaksanaan IKU ini antara lain:

a. Pada triwulan I sampai dengan triwulan III realisasi IKU PKPA berdasarkan nilai IKPA, sedangkan pada triwulan IV selain nilai IKPA juga akan memperhitungkan nilai SMART;
b. Berdasarkan nota dinas nomor ND-6/MK.1/2021 perihal Penyesuaian IKU PKPA Tingkat Satker TA 2021, terdapat perubahan nilai efisiensi SMART, nilai tersebut tidak diakomodir dalam aplikasi, sehingga nilai efisiensi tingkat Satker dihitung menggunakan kertas kerja;
c. Realisasi IKU PKPA triwulan IV Eselon I BPPK 97.30 dari target 95.5, namun masih terdapat indikator IKPA maupun SMART yang belum maksimal;
d. Adapun nilai unsur IKPA BPPK yang masih belum maksimal adalah Pengelolaan UP, Kesalahan SPM, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Konfirmasi Capaian Output dan Realisasi. Sedangkan untuk nilai SMART yang belum maksimal, yaitu Penyerapan, Konsistensi, dan Nilai Kinerja Anggaran Satker.

Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPPK sehubungan dengan pencapaian target IKU ini.

a. Melakukan koordinasi serta mengadakan *Forum Group Discusion* (FGD) terkait tata cara pengakuan dan pengukuran Rincian *Output* (RO) dengan seluruh satker, Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian lain di Sekretariat BPPK sebagai tindak lanjut FGD dengan Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Melakukan *video conference coaching clinic* dan *forum Community of Practice* pengelolaan keuangan BPPK secara rutin untuk monitoring, koordinasi dan asistensi satker dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu BPPK telah menyusun rekomendasi rencana aksi untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh pengelola keuangan di lingkungan BPPK pada tahun 2022 sebagai berikut.

a. Melakukan reviu rencana kegiatan, rencana umum pengadaan, rencana penarikan dana, dan menghitung kembali proyeksi anggaran serta melakukan revisi jika diperlukan;
b. Memastikan satker agar melakukan verifikasi SPM dan dokumen pendukung dengan teliti (uraian uraian SPM, nomor DIPA, jenis SPM, kode akun belanja, kode akun potongan, kode akun pajak, hitungan tagihan, hitungan pajak, kebenaran nomor kontrak, nomor BAST, BAPP, kuitansi, nomor rekening, NPWP, jaminan pemeliharaan, kesesuaian dengan faktur pajak,

karwas kontrak dan dokumen pendukung lainnya) serta memastikan kesesuaian data *supplier* di OMSPAN;

c. Memastikan satker agar memonitor tanggal karwas UP di modul pembayaran di omspan agar tidak terjadi keterlambatan pengajuan SPM UP serta mengupayakan adanya alokasi waktu lebih dalam mengajukan SPM UP, sehingga jika SP2D lama terbit maka tidak terjadi keterlambatan;
d. Mendorong satker agar melakukan koordinasi intensif dengan pemilik kegiatan (Bagian, Bidang, Seksi) untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana (RUP dan RPD) dan melakukan updating RPD jika ada perubahan;
e. Mengimbau kepada satker untuk segera melakukan input capaian output baik progress maupun volume di aplikasi SAKTI setiap awal bulan dengan benar dan memastikan bahwa inputan tersebut terkonfirmasi oleh KPPN serta memonitor progress capaian output satker dan melakukan konfirmasi terkait kepastian capaian volume output di akhir tahun;
f. Memastikan PPK, Staf PPK, PPSPM, staf PPSPM, BP, dan BPP memproses tagihan APBN dengan benar, sesuai batas waktu yang ditetapkan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
95%	98,24%	-	95,5%	97,3%

Seperti terlihat dalam tabel di atas bahwa realisasi IKU ini pada tahun 2021 menurun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan beberapa akar masalah sebagai berikut.

a. Kesalahan SPM di triwulan IV terjadi karena adanya data kontrak yang tidak sinkron pada SPM dengan data terakhir yang terdaftar di KPPN (nomor register kontrak) dan adanya perbedaan data supplier yang terdaftar pada SPAN KPPN;
b. Keterlambatan Pengelolaan UP dan TUP terjadi karena pengajuan SPM berdekatan dengan batas waktu, sehingga SP2D terbit saat sudah melewati batas waktu tersebut;
c. Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan konsistensi belum maksimal karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana dan pekerjaan renovasi *guest house* yang tidak terealisasi pada Pusdiklat Bea dan Cukai;
d. Indikator Revisi DIPA belum maksimal karena adanya pembangunan turap di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang mendesak harus segera dilaksanakan sehingga harus dilakukan revisi DIPA;
e. Terdapat RO yang tidak tercapai targetnya, yaitu RO Gedung dan Bangunan dikarenakan rekanan wanprestasi, RO Peralatan Fasilitas Perkantoran yang tidak terealisasi, RO Penerimaan Mahasiswa Baru dikarenakan perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa baru, serta RO Jurnal dikarenakan beberapa paper ditolak akibat ketidaksesuaian topik dan metode penelitian serta paper yang sesuai dan mendapat catatan dari reviewer sampai berakhirnya TA 2021 belum selesai ditindaklanjuti oleh penulis. Ketidaktercapaian target output RO ini mempengaruhi nilai konfirmasi capaian output;
f. Nilai realisasi penyerapan anggaran belum maksimal dikarenakan mayoritas pelatihan masih diselenggarakan dengan menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning*, perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa PKN STAN baik pendaftar maupun

jumlah mahasiswa yang diterima dan tidak dapat dilakukan revisi anggaran karena diperlukan mekanisme APBN-P, adanya kontrak yang tidak selesai pada kegiatan renovasi *guest house* Pusdiklat Bea dan Cukai, serta adanya efisiensi dari pengadaan barang dan jasa.

SS-9. Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPPK mengidentifikasikan dua buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,55	3,75	105,63
9b-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	87%	100%	114,94

Indeks capaian untuk SS ini adalah **111,56** . Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal” ini adalah sebagai berikut.

9a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi Publik

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait tema APBN 2021 dan menyediakan program komunikasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) Sekretariat Jenderal yang mendukung strategi komunikasi Kementerian Keuangan tahun 2021.

IKU ini terbagi menjadi dua buah komponen, yaitu:

a. Efektivitas Komunikasi Publik

Objek penelitian ini adalah kampanye komunikasi publik dengan tema APBN 2021. Adapun kampanye komunikasi publik ini disusun melalui suatu strategi komunikasi yang meliputi tiga saluran taktik, di antaranya:

- Aktivitas media massa;
- Publikasi media sosial;
- *Event* (daring/ luring).

b. Komunikasi Kolaboratif dalam Mendukung Strategi Komunikasi 2021

Program komunikasi dari masing-masing unit kehumasan di unit eselon I perlu berjalan sinergis/ kolaboratif dalam mendukung Strategi Komunikasi 2021. Dukungan program komunikasi diberikan pada agenda isu proaktif maupun respon terhadap isu negatif/ sensitif. Program komunikasi dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti:

- Aktivitas media massa;
- Publikasi media sosial;
- *Event* (daring/ luring).

Adapun pelaksanaan program komunikasi disesuaikan dengan keterkaitan topik dengan unit tertentu. Sementara itu penghitungan merujuk pada dokumen perencanaan (dokumen Agenda Setting yang dikeluarkan oleh Biru KLI).

Formula untuk menghitung realisasi atas pelaksanaan IKU ini tertera pada **Rumus 3.13** berikut.

Rumus 3.13: Formula Penghitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Publik

$$Realisasi = \begin{matrix}(Capaian\ efektivitas\ komunikasi\ publik \times 80\%) + \\ (Capaian\ program\ komunikasi\ kolaboratif \times 20\%)\end{matrix}$$

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

9a-CP	SS: Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal							
	IKU: Indeks Efektivitas Komunikasi Publik							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	
Realisasi	*N/A*	3,84	3,84	3,84	3,84	3,75	3,75	Max/Average
Capaian	*N/A*	108,17	108,17	108,17	108,17	105,63	105,63	

Hal-hal berikut merupakan isu utama dan implikasi dalam pelaksanaan IKU "Indeks Efektivitas Komunikasi Publik".

a. Objek penelitian ini adalah kampanye komunikasi publik dengan tema APBN 2021.
b. Kampanye komunikasi publik disusun melalui strategi komunikasi yang meliputi tiga saluran takti, di antaranya
   - Aktivitas media massa;
   - Publikasi media sosial;
   - *Event* (daring/ luring).
c. BPPK mendukung strategi komunikasi 2021 dengan menyelenggarakan program edukasi keuangan engara seperti Kemenkeu *Corpu Talk* (KCT), video edukasi Senologi, mini-dokumenter, *Sharing via WhatsApp*, *Podcast E-Clair*, dan media sosial.

Sementara itu akar masalah yang dijumpai adalah sebagai berikut.

a. Terdapat beberapa narasi tahun 2021 yang redaksionalnya masih sangat luas sehingga apabila diimplementasikan dengan program edukasi keuangan BPPK harus memerlukan tema/ narasi yang lebih spesifik.

b. BPPK tidak memiliki tupoksi secara langsung atau yang berhubungan langsung dengan pesan kunci/ narasi utama.

Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPPK terkait pencapaian target IKU ini.

a. Melakukan harmonisasi ke unit-unit pusdiklat khususnya terkait dengan kegiatan KCT guna menyesuaikan tema yang mendukung Strategi Komunikasi 2021.
b. Berkoordinasi dengan Biro KLI jika ada perubahan atas dokumen strategi komunikasi dan/atau dokumen perencanaan implementasi taktik.
c. Melakukan beberapa kegiatan program edukasi selain KCT yang sesuai dengan pesan kunci Strategi Komunikasi 2021.
d. Membuat program edukasi keuangan untuk semester II yang sesuai dengan pesan kunci Strategi Komunikasi 2021, yaitu Kemenkeu *Learning Festival*.
e. Melakukan koordinasi dengan pusdiklat terkait kegiatan KCT untuk semester II.
f. Melakukan koordinasi dengan Biro KLI terkait pengukuran.

Rekomendasi rencana aksi berikut akan dilaksanakan oleh Sekretariat BPPK melalui Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan sepanjang tahun 2022.

a. Amplifikasi agenda setting.
b. Kolaborasi program edukasi keuangan.
c. Koordinasi dengan unit eselon I lain terkait strategi komunikasi.

Perbandingan target dan realisasi IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi Publik” dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
-	-	3,5 (skala 4)	3,55	3,75

IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi Publik” ini merupakan IKU baru di tahun 2021. Adapun target tahun 2021 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Meskipun demikian BPPK berhasil memperoleh realisasi melebihi target tersebut.

9b-CP Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat *downtime* yang seminimal mungkin serta penyelesaian proyek strategis TIK yang terdapat dalam IS RBTK maupun yang tidak termasuk dalam IS RBTK. Adapun proyek strategis TIK adalah proyek TIK pada unit eselon I/ non-eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kementerian Keuangan dan/atau unit eselon I/non-eselon I) dan/atau dianggap strategis oleh unit eselon I/ non-eselon I yang bersangkutan.

Adapun realisasi atas IKU ini dapat dihitung dengan rata-rata penyelesaian *milestone* proyek strategis TIK.

Pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

9b-CP	SS: Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal							
	IKU: Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK							
T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	**Y**	**Pol/KP**
Target	-	-	-	-	-	87%	87%	
Realisasi	*N/A*	75%	75%	80%	80%	100%	100%	Max/TLKV
Capaian	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	114,94	114,94	

Proyek strategis TIK yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan bagian dari pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun tahun 2020. Adapun isu utama dan implikasi sehubungan dengan pencapaian IKU ini antara lain:

a. Belum terdapatnya *data warehouse* yang menggabungkan data pada aplikasi Semantik dan KLC sehingga untuk data pelatihan tidak dapat diperoleh secara menyeluruh.
b. Data-data pelatihan BPPK sejauh ini hanya dimanfaatkan untuk mendukung data histori pelatihan pegawai pada aplikasi HRIS (pengelola SDM Kementerian Keuangan pusat) dan belum ada pemanfaatan lebih jauh dan parsial ke pengelola SDM unit eselon I seperti misalnya me-*monitor* pelatihan yang sedang berjalan, merekomendasikan pegawai untuk mengikuti pelatihan, dan me-*monitor* histori pelatihan unit/ pegawai. Akibatnya data-data tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk Kemenkeu-*Wide*.

Akar masalah dalam pelaksanaan IKU “Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK” adalah:

a. Belum dibuat *data warehouse* untuk aplikasi Semantik dan KLC.
b. Belum tersedianya platform aplikasi yang mampu memanfaatkan data-data pelatihan BPPK untuk menunjang proses pengelolaan pengembangan pegawai di unit eselon I Kementerian Keuangan.

Adapun tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh BPPK tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Telah dibuat konsep dasar rencana implementasi *data warehouse* untuk aplikasi Semantik dan KLC.
b. Telah diselesaikan *step-by-step* SDLC pengembangan SIPP UE1 (*Dashboard* Pembelajaran untuk Pengelola SDM UE1) berupa perencanaan aplikasi, analisis kebutuhan dan spesifikasi aplikasi, serta perancangan aplikasi.
c. Telah diselesaikan tahap pengembangan *back end* SIP UE1.
d. Pengujian VA/VT aplikasi SIPP EU1 telah memenuhi kriteria dari Pusintek.
e. Penyelesaian tahap pengembangan *front end* dan *user interface* SIPP UE1.
f. Implementasi hasil pengembangan SIPP UE1.

g. Sosialisasi hasil pengembnagan SIPP UE1.
h. Serah terima hasil pengembangan SIPP UE1 dari Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPPK.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk dilaksanakan pada periode berikutnya antara lain:

a. Pengembangan *Knowledge Management System* (KMS) modul *monitoring* dan evaluasi untuk pelaporan dan analisis implementasi KM, rekomendasi penyusun aset intelektual (*expert locator*), modul kolaborasi pada KMS (forum/ *chatting*), dan modul *advanced search* pada KMS.
b. Pengembangan KLC berupa migrasi fitur aplikasi Semantik dan penerbitan sertifikat pelatihan.

Perbandingan target dan realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK" dari waktu ke waktu tergambar dalam tabel berikut.

Target 2020	Realisasi 2020	Target Renstra	Target 2021	Realisasi 2021
85%	100%	87%	87%	100%

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran BPPK Tahun Anggaran 2021

Selama tahun 2021 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp448.701.040.515,00 atau 88,38% dari total pagu anggaran akhir sebesar Rp507.716.657.000,00. Sebagai perbandingan, tahun 2020 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp457.953.218.886,00 atau 85,91% dari total pagu anggaran sebesar Rp533.047.579.000,00.

Tabel 3.55 berikut menunjukkan realisasi anggaran BPPK menurut jenis belanja.

Tabel 3.55: Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2021 Menurut Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	95.663.321.000	93.911.169.216	98,17
52	Belanja Barang	257.996.114.000	210.738.859.670	81,68
53	Belanja Modal	154.057.222.000	144.051.011.629	93,50
	Total	**507.716.657.000**	**448.701.040.515**	**88,38**

Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran BPPK selama beberapa tahun terakhir tersaji dalam **Gambar 3.2** berikut.

Secara umum, realisasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja-belanja berikut.

Gambar 3.2: Perbandingan Pagu (▬) dan Realisasi (▬) Anggaran Menurut Jenis Belanja

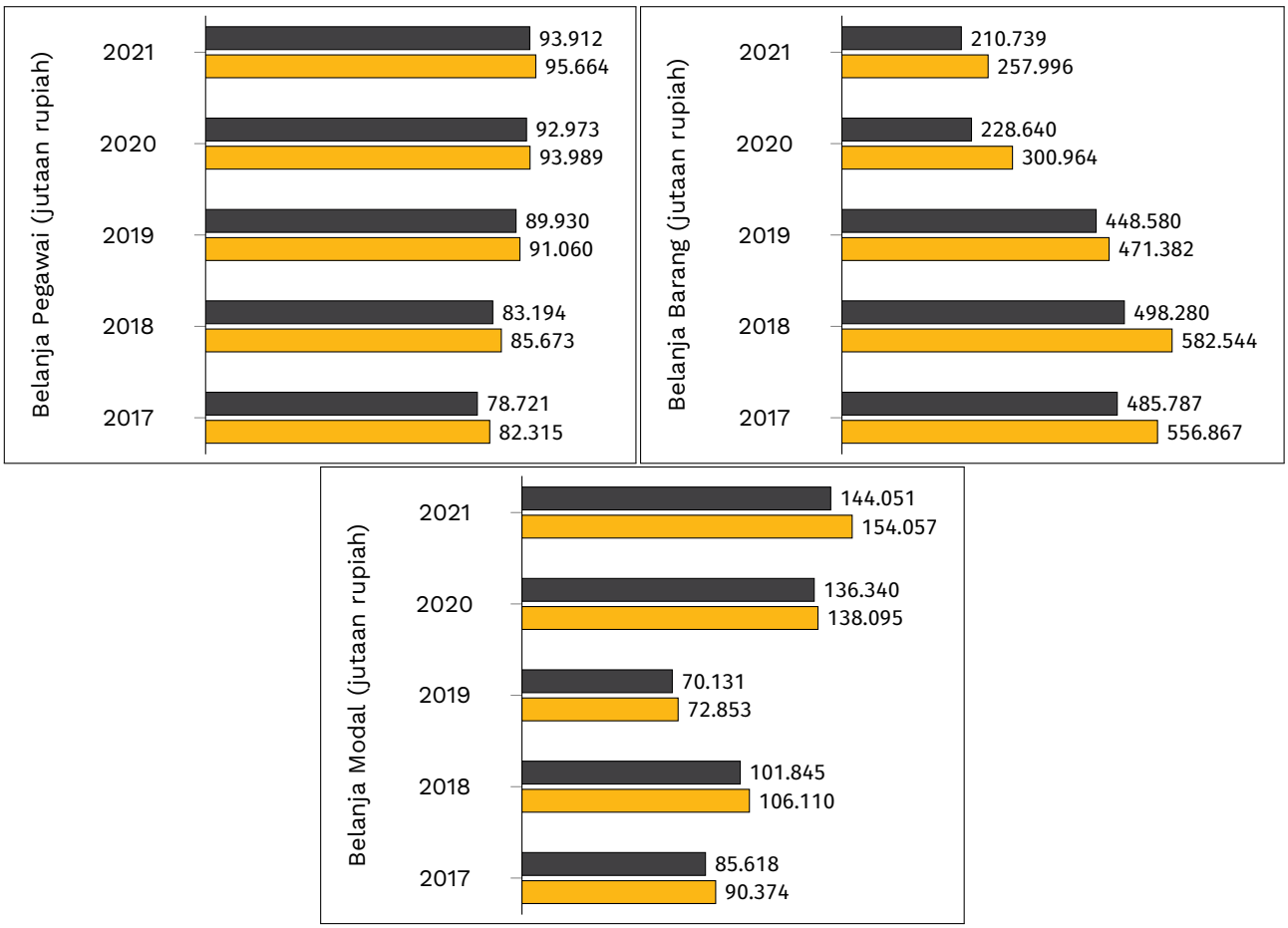

Belanja Pegawai

Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai lingkup BPPK, termasuk gaji ketiga belas dan keempat belas.

Belanja Barang

Digunakan untuk kegiatan rutin yang menunjang pelaksanaan tugas, terdiri atas belanja-belanja sebagai berikut.

a. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Belanja ini digunakan antara lain untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Adapun belanja terkait penanggulangan COVID-19 di antaranya adalah belanja perlengkapan *new normal* (masker, *hand sanitizer*), belanja perlengkapan poliklinik, belanja terkait dengan pelaksanaan *Rapid Test* dan *PCR SWAB Test*, isolasi/karantina mandiri pegawai yang terdampak COVID-19, serta belanja untuk bantuan komunikasi pegawai lingkup BPPK. Selain itu, digunakan untuk pengadaan seragam di beberapa satker dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

b. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional lingkup BPPK digunakan sebagian besar untuk kegiatan pelatihan yang selama pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan realisasi karena pelatihan sebagian besar dilaksanakan secara daring tanpa tatap muka langsung. Selain itu, terdapat juga realisasi dari program beasiswa atau karyasiswa pegawai Kementerian Keuangan, penyelenggaran Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

c. Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan sebagian besar digunakan untuk keperluan pelatihan, sebagian untuk keperluan perkantoran, dan obat-obatan pada Poliklinik. Belanja ini mengalami penurunan yang disebabkan Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, yang mengakibatkan kegiatan pelatihan tidak dilaksanakan dengan metode tatap muka langsung (klasikal) sehingga belanja terkait persediaan ATK pelatihan tidak terealisasi secara optimal, dan penerapan Work From Home (WFH) sehingga ATK perkantoran juga berkurang.

d. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan di lingkungan BPPK. Adapun beberapa pemeliharaan yang dilakukan di antaranya adalah pemeliharaan rutin, pemeliharaan jaringan, pengecatan gedung, pemeliharaan gedung, pemeliharaan taman, pemeliharaan lift, pemeliharaan kendaraan, pelapisan ulang aspal, perawatan PC, perawatan *notebook*, perawatan *printer*, *genset*, dan pemeliharaan lainnya.

e. Belanja Jasa

Belanja Jasa ini digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan, pembayaran sewa, pembayaran jasa atas pekerjaan, pembayaran langganan daya dan jasa.

f. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri BPPK sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas diklat peserta pelatihan dan perjalanan dinas pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas. Selama tahun 2021 ini Belanja Perjalanan Dinas tidak terserap optimal, hal ini disebabkan kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan pelatihan secara klasikal belum dapat dilaksanakan selama Pandemi COVID-19. Belanja Perjalanan Dinas yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 terkait dengan pelaksanaan tugas pegawai dan mutasi pegawai.

g. Belanja Barang BLU

Belanja barang BLU dimiliki oleh PKN STAN yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN dan beberapa kegiatan rutin lainnya.

Belanja Modal

Adapun realisasi belanja modal adalah sebagai berikut.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Beberapa Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sudah terealisasi diantaranya adalah pengadaan kendaraan, pengadaan *meubelair* studio PJJ, pengadaan sofa, pengadaan *laptop end user*, pengadaan *laptop development*, pengadaan AC, pengadaan alat pengolah data, pengadaan mesin cuci asrama, pengadaan *bed* susun asrama, pengadaan *genset*, dan pengadaan alat pendingin udara.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Beberapa realisasi belanja modal antara lain lanjutan pembangunan gedung pendidikan PKN STAN, renovasi gedung BDK Pontianak, renovasi gedung BDK Malang, pekerjaan *shelter genset* Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, pekerjaan renovasi *guest house* Pusdiklat Bea Cukai, dan pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan gedung asrama Pusdiklat Keuangan Umum.

c. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya ini berupa pengadaan *e-book* perpustakaan BPPK Tahap I, pengadaan *software* Articulate BPPK tahap I dan II, pengadaan *software Knowledge Capture*, pengadaan *software* Microsoft Office. Sedangkan pada tahun sebelumnya digunakan untuk pembelian *software*.

Sementara itu, realisasi anggaran BPPK tahun anggaran 2021 menurut kegiatan tersaji dalam **Tabel 3.56** berikut.

Tabel 3.56: Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2021 Menurut Kegiatan

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4678	Legislasi dan Litigasi	45.972.000	30.676.500	66,73
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	117.182.453.000	101.041.908.345	86,23
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)	132.690.680.000	131.112.183.911	98,82
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	646.786.000	429.719.034	66,44
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	525.580.000	431.965.007	82,19
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	175.042.662.000	160.949.739.256	91,95
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	81.250.102.000	54.635.450.376	67,25
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	21.230.000	15.929.000	75,04

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	19.877.000	3.915.300	19,7
4687	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	291.315.000	49.553.786	17,02
	Total	**507.716.657.000**	**448.701.040.515**	**88,38**

Dari **Tabel 3.56** tersebut terlihat bahwa pagu terbesar adalah pada kegiatan "Pengelolaan Organisasi dan SDM (4683)". Hal tersebut karena di dalam anggaran kegiatan tersebut terdapat anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPPK yaitu pelaksanaan pendidikan (melalui karyasiswa beasiswa), pelatihan (termasuk di dalamnya pelaksanaan *digital learning*), dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan. Dari nilainya, kegiatan ini pula yang memiliki nilai realisasi anggaran yang paling besar, yaitu sebesar Rp160.949.739.256,00.

Adapun dari segi persentase capaian penyerapan anggaran, kegiatan "Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN) (4680)" memiliki nilai yang paling tingga yaitu sebesar 98,81%. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran terkait pengelolaan keuangan, BMN, umum, termasuk pengelolaan kinerja internal pada Politeknik Keuangan Negara STAN memiliki efektivitas yang tinggi.

2. Permasalahan/ Kendala yang Dihadapi

Berikut adalah permasalahan atau kendala yang dihadapi BPPK dalam melaksanakan realisasi anggaran tahun 2021.

a. Perubahan metode pelaksanaan pada beberapa pelatihan dari metode klasikal menjadi metode digital;
b. Pengajuan beberapa tagihan keuangan terkait pelatihan mengalami keterlambatan;
c. Sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka;
d. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran COVID-19 menyebabkan belanja perjalanan dinas dilaksanakan secara sangat terbatas;
e. Ketersediaan barang elektronik dalam pengadaan barang dari distributor terbatas selama masa pandemi COVID-19;
f. Pelaksanaan pengaturan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) berpengaruh terhadap penyerapan belanja barang operasional;
g. Perubahan kebijakan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN.

3. Penjelasan Atas Realisasi Anggaran yang Tidak Mencapai Target

Realisasi anggaran BPPK tahun 2021 masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut.

a. Penyesuaian kegiatan yang sebelumnya luring (*offline*) menjadi daring (*online*) sebagai dampak adanya perubahan kebijakan metode penyelenggaraan pelatihan akibat kondisi pandemi;

b. Perubahan kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN mengakibatkan target terkait tidak dapat direalisasikan, serta tidak dapat melakukan revisi anggaran karena diperlukan mekanisme APBN-Perubahan;
c. Adanya kontrak yang tidak selesai pada kegiatan Renovasi *Guest House* Pusdiklat Bea dan Cukai yang berdampak pula pada peralatan dan mesin yang tidak dapat terealisasi sesuai target;
d. Adanya efisiensi dari realisasi belanja modal.

D. Realisasi *Output*

1. Realisasi *Output* BPPK Tahun 2021

Realisasi *Output* Kegiatan BPPK tahun anggaran 2021 dapat ditunjukkan pada **Tabel 3.57** berikut.

Tabel 3.57: Realisasi *Output* BPPK Tahun 2021

Kode	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
4678	***Legislasi dan Litigasi***				
4678.EAG	**Layanan Hukum**				
EAG.001	Advokasi Hukum	1	Perkara	1	100,00
4679	***Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum***				
4679.EAB	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal**				
EAB.001	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit Eselon I	5	Dokumen	5	100,00
EAB.002	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	6	Dokumen	6	100,00
4679.EAC	**Layanan Umum**				
EAC.001	Operasionalisasi Kantor	228	Bulan Layanan	228	100,00
EAC.002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	132	Bulan Layanan	132	100,00
EAC.003	Kerumahtanggaan	228	Bulan Layanan	228	100,00
EAC.004	Kearsipan	7	Laporan	7	100,00
4679.EAD	**Layanan Sarana Internal**				
EAD.001	Kendaraan Bermotor	11	Unit	11	100,00
EAD.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.369	unit	5.369	100,00
EAD.003	Peralatan Fasilitas Perkantoran	2.125	unit	2.089	99,00

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
EAD.004	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45	Unit	45	100,00
4679.EAE	**Layanan Prasarana Internal**				
EAE.001	Gedung/Bangunan	7.420	m2	6.292	85,00
EAE.002	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	219.035	m2	219.035	100,00
4679.EAN	**Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal**				
EAN.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	11	Laporan	11	100,00
EAN.002	Dokumen Perbendaharaan Unit Eselon I	1	Dokumen	3	300,00
EAN.003	Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Eselon I	16	Laporan	16	100,00
4680	***Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)***				
4680.EAB	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal**				
EAB.002	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1	Dokumen	1	100,00
4680.EAC	**Layanan Umum**				
EAC.001	Operasionalisasi Kantor	12	Bulan layanan	12	100,00
EAC.002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	Bulan layanan	12	100,00
EAC.003	Kerumahtanggaan	12	Bulan Layanan	12	100,00
4680.EAD	**Layanan Sarana Internal**				
EAD.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000	unit	2.000	100,00
EAD.003	Peralatan Fasilitas Perkantoran	87	unit	102	118,00
4680.EAE	**Layanan Prasarana Internal**				
EAE.001	Gedung/Bangunan	22.450	m2	22.450	100,00
EAE.002	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.790	m2	224.790	100,00
4680.EAN	**Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal**				
EAN.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	2	Laporan	2	100,00
EAN.003	Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Eselon I	1	Laporan	1	100,00

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
4681	***Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik***				
4681.BMB	**Komunikasi Publik**				
BMB.001	Jurnal	2	Volume	1	50,00
BMB.002	Corpu TV	1	Liputan	1	100,00
BMB.003	Publikasi	1	Kegiatan	1	100,00
BMB.004	Strategi Komunikasi	1	Strategi	1	100,00
4682	***Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)***				
4682.BME	**Komunikasi Publik**				
BMB.001	Jurnal	5	Volume	5	100,00
BMB.005	Layanan Kepustakaan	1	layanan	1	100,00
4683	***Pengelolaan Organisasi dan SDM***				
4683.AAG	**Peraturan Menteri**				
AAG.001	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi	1	Peraturan Menteri	2	200,00
4683.AAH	**Peraturan lainnya**				
AAH.001	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	3	Peraturan lainnya	3	100,00
AAH.002	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi	2	Peraturan lainnya	2	100,00
4683.ABA	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**				
ABA.001	Kajian Akademis	21	Kajian	25	120,00
4683.EAF	**Layanan SDM**				
EAF.001	Gaji dan Tunjangan	1.148	Pegawai	1.148	100,00
EAF.002	Administrasi Kepegawaian	447	Pegawai	447	100,00
EAF.003	Pengelolaan Jafung	273	Pejabat Fungsional	414	152,00
EAF.004	Pengembangan SDM	1.092	Pegawai	1.099	101,00
EAF.005	Program dan Materi pembelajaran	125	Program	256	205,00
EAF.006	Digital Learning Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara	90.000	Jamlator	188.850	210,00
EAF.007	Digital Learning Manajemen Keuangan Negara	300.000	Jamlator	302.250	101,00
EAF.008	Pembelajaran Digital	4.324.000	Jamlator	5.572.809	129,00
EAF.009	Pembelajaran Klasikal	19.202	Jamlator	32.829	171,00
EAF.015	Sertifikasi Kompetensi	171	Peserta	337	198,00

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
EAF.016	Alat Uji	3	Alat Uji	3	100,00
EAF.017	Manajemen Pengetahuan	573	Aset Intelektual	723	127,00
EAF.018	Karyasiswa Beasiswa	264	Peserta	268	102,00
4683.EAH	**Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**				
EAH.001	Penjaminan Mutu	1	Laporan	1	100,00
EAH.002	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan Negara	1	Akreditasi	1	100,00
EAH.003	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1	Rekomendasi	1	100,00
4683.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**				
FAE.001	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	1	Rekomendasi	1	100,00
4684	***Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)***				
4684.EAF	**Layanan SDM**				
EAF.001	Gaji dan Tunjangan	263	Pegawai	263	100,00
EAF.002	Administrasi Kepegawaian	263	orang	263	100,00
EAF.004	Pengembangan SDM	150	Pegawai	150	100,00
EAF.010	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	250	Peserta	383	154,00
EAF.011	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa	60	Penelitian	107	179,00
EAF.012	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	7.443	Mahasiswa	7.443	100,00
EAF.013	Penerimaan Mahasiswa Baru	64.000	Peserta	8.294	13,00
EAF.014	Program Pengabdian Masyarakat	40	Program	67	168,00
4684.EAH	**Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**				
EAH.001	Penjaminan Mutu	1	Laporan	1	100,00
4685	***Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal***				
4685.EAK	**Layanan Pengawasan Internal**				
EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1	Rekomendasi	1	100,00
4686	***Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)***				
4686.EAK	**Layanan Pengawasan Internal**				

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	4	Rekomendasi	4	100,00
4687	***Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi***				
4687.FAB	**Sistem Informasi Pemerintahan**				
FAB.001	Kemenkeu Learning Center (KLC) Sebagai Bagian dari Program PEN	1	Sistem	1	100,00

Dari **Tabel 3.57** di atas dapat dilihat bahwa secara umum tahun 2021 BPPK telah berhasil mencapai target. Bahkan ada beberapa Rincian *Output* (RO) yang capaiannya di atas 100%. Meskipun demikian terdapat empat RO yang realisasi *output*-nya tidak memenuhi target.

Perincian atas keempat RO yang capaiannya kurang dari 100% tersebut adalah sebagai berikut.

a. RO Gedung/ Bangunan (4679.EAE.001)

   Tidak tercapainya RO ini dikarenakan terjadinya wanprestasi pekerjaan renovasi *Guest House* Pusdiklat Bea dan Cukai oleh kontraktor sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sepenuhnya sampai dengan akhir tahun 2021.

b. RO Peralatan Fasilitas Perkantoran (4679.EAD.003)

   Dikarenakan pekerjaan renovasi *Guest House* Pusdiklat Bea dan Cukai tidak dapat diselesaikan, maka beberapa barang peralatan fasilitas perkantoran yang semula akan digunakan untuk melengkapi *Guest House* tersebut menjadi tidak dapat direalisasikan.

c. RO Jurnal (4681.BMB.001)

   Tidak tercapainya RO ini dikarenakan beberapa artikel yang masuk ke redaksi Jurnal BPPK ditolak akibat ketidaksesuaian topik dan metode penelitian. Demikian pula terdapat beberapa artikel yang sudah sesuai dan mendapatkan catatan dari pereviu tetapi sampai dengan akhir tahun 2021 belum selesai ditindaklanjuti oleh penulis. Hal ini mengakibatkan *output* Jurnal di Sekretariat BPPK hanya dapat terealisasi sebanyak 1 volume dari target 2 volume.

d. RO Penerimaan Mahasiswa Baru (4684.EAF.013)

   Perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN menyebabkan jumlah pendaftar dan mahasiswa baru yang diterima tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

E. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana telah disebutkan dalam **Subbab D**, BPPK berhasil mencapai sebagian besar target RO-nya. Bahkan terdapat tujuh belas RO yang capaiannya di atas 100%. Ketujuh belas RO tersebut antara lain:

a. Digital Learning Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara;
b. Digital Learning Manajemen Keuangan Negara;
c. Program dan Materi pembelajaran;
d. Pembelajaran Digital;
e. Pembelajaran Klasikal;
f. Sertifikasi Kompetensi;
g. Manajemen Pengetahuan;
h. Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama;
i. Peralatan Fasilitas Perkantoran;
j. Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi;
k. Kajian Akademis;
l. Pengelolaan Jafung;
m. Pengembangan SDM;
n. Karyasiswa Beasiswa;
o. Dokumen Perbendaharaan Unit Eselon I;
p. Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa; dan
q. Program Pengabdian Masyarakat.

Dengan menilik realisasi penyerapan anggaran sebesar 88,38%, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target.

2. Efektivitas dan *Refocusing* Penggunaan Anggaran

Refocusing anggaran BPPK sebagian besar digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan BPPK. Adapun realisasi terkait dengan belanja penanganan pandemi COVID-19 dapat dilihat pada **Tabel 3.58** berikut.

Tabel 3.58: Perincian Belanja Penanganan COVID-19

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.783.967.000	3.436.017.902	90,81
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.863.882.000	4.571.980.141	94,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	455.459.000	309.556.527	67,97

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	764.813.000	370.204.623	48,41
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	9.000.000	8.896.250	98,85
	Total	**9.877.121.000**	**8.696.655.443**	**88,05**

Realisasi belanja BPPK terkait penanganan COVID-19 tersebut digunakan antara lain sebagai berikut.

a. Akun 521131 digunakan untuk pembelian perlengkapan pelindung diri (masker, *face shield*, sarung tangan, dan APD), perlengkapan kebersihan (*hand sanitizer*, sabun cuci tangan, disinfektan), biaya PCR SWAB Test, SWAB Antigen Test, bantuan komunikasi pegawai, biaya lisensi aplikasi, pembelian obat dan vitamin, serta isolasi/karantina mandiri pegawai yang terdampak COVID-19;
b. Akun 521241 digunakan untuk bantuan biaya komunikasi untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mahasiswa PKN STAN;
c. Akun 521841 digunakan untuk pembelian perlengkapan pelindung diri (masker, *face shield*, sarung tangan, dan APD), perlengkapan kebersihan (*hand sanitizer*, sabun cuci tangan, disinfektan) yang dimaksudkan sebagai persediaan;
d. Akun 522192 digunakan untuk pembayaran jasa penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor, pembayaran honorarium Tim Tes Swab PCR, biaya tes kesehatan pegawai (Rapid Test, PCR Swab Test, Swab Antigen Test, dan lain- lain);
e. Akun 523114 digunakan untuk pengadaan bahan tenda semipermanen untuk SWAB PCR Test dalam rangka penanggulangan COVID-19.

F. Kinerja Lain-Lain

1. Inisiatif Strategis BPPK

Pada tahun 2021 BPPK memiliki dua buah IS, antara lain:

Digital Learning Manajemen Keuangan Negara Menengah

Pelatihan ini diperuntukkan bagi seluruh ASN yang telah lulus program *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Tingkat Dasar Tahun 2020. Tujuannya adalah agar para lulusan dapat memahami pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Pelatihan *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah terdiri atas empat buah *e-learning* yang dapat diikuti secara sekuens. **Tabel 3.59** menjabarkan perincian berikut dengan capaian *e-learning* masing-masing.

Tabel 3.59: Perincian Realisasi IS *Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah Tahun 2021

No	Nama Pelatihan	Target Peserta	Rencana Peserta	Realisasi Peserta	Capaian
1	*E-Learning* Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	5.400	5.765	5.558	96,41
2	*E-Learning* Manajemen Kas Satuan Kerja	5.400	5.082	4.998	98,35
3	*E-Learning* Manajemen Komitmen	5.400	4.873	4.818	98,87
4	*E-Learning* Pelaporan dan Pertanggungjawaban	5.400	4.830	4.776	98,88
	Total	**21.600**	**20.550**	**20.150**	**98,05**

Realisasi IS ini adalah 302.250 jamlator dari target sebanyak 300.000 jamlator. Dengan demikian capaian atas IS ini adalah 100,75%. Sementara itu dari penggunaan anggarannya, realisasi anggaran IS ini selama tahun 2021 adalah sebesar Rp38.650.000,00 atau 15,38% dari pagu anggaran Rp251.375.000,00.

Dari sisi realisasi jamlator, capaian IS "*Digital Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah" telah mencapai target meskipun belum maksimal. Akan tetapi dari sisi penggunaan anggaran, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp212.725.000,00 atau senilai 84,62%. Hal ini menunjukkan telah terjadi penghematan dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target IS ini.

***Digital Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara**

Digital learning ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN dan pejabat fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan *digital learning* ini terdiri atas *E-Learning* Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan Negara. Realisasi jumlah peserta *e-learning* ini adalah sebesar 6.293 orang atau 93,94% dari rencana peserta (pemanggilan peserta) sebesar 6.699 orang.

Realisasi IS "*Digital Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara" ini adalah 118.850 jamlator atau sebesar 132,05% dari target sebanyak 90.000 jamlator. Adapun realisasi anggaran IS ini adalah sejumlah Rp104.150.000,00 atau sebesar 67,42% dari pagu anggaran Rp154.475.000,00.

Dari sisi realisasi jamlator, IS ini sudah tercapai di atas target secara maksimal. Dari sisi penggunaan anggaran, sepanjang tahun 2021 pelaksanaan IS ini terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp50.325.000,00 (32,58%). Hal ini menandakan telah terjadi penghematan dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target IS ini.

2. Studi Banding/ *Benchmarking* Oleh K/L Lain

Sepanjang tahun 2021 BPPK menerima kunjungan baik secara virtual maupun langsung dari berbagai instansi dalam rangka studi banding dan penolokukuran (*benchmarking*) terkait

implementasi *corporate university* di Kementerian Keuangan, implementasi pembelajaran *e-learning* di BPPK, maupun implementasi pengelolaan SDM secara umum.

Tabel 3.60 berikut adalah perincian pelaksanaan studi banding/ *benchmarking* tersebut.

Tabel 3.60: Perincian Kegiatan Studi Banding/ *Benchmarking* oleh Instansi Lain

No	Nama Instansi	Pelaksanaan	Materi
1	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia	5 Januari 2021	*Corporate University*
2	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1 Februari 2021	Pengelolaan SIM Diklat dan KLC
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Februari 2021	*Corporate University*
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	17 s.d. 18 Maret 2021	*Corporate University*
5	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	17 Maret 2021	*Corporate University*
6	Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda - Kementerian Pemuda dan Olahraga	22 Maret 2021	*Corporate University*
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	30 Maret 2021	*Learning Organization*
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	6 s.d. 9 April 2021	Bimtek *Corporate University*
9	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	8 April 2021	*Corporate University*
10	BPSDM Pemprov DKI Jakarta	12 dan 14 April 2021	Penyusunan Analisa Kesenjangan Kompetensi Berbasis *Corporate University*
11	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan - Kementerian Perdagangan	14 April 2021	KLC, *E-Learning* di BPPK (Pelatihan di Masa Pandemi), AKP, dan Implementasi *Corporate University*
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Industri - Kementerian Perindustrian	15 April 2021	*Corporate University*
13	RSCM Kementerian Kesehatan	20 April 2021	Manajemen Talenta
14	BI Institute	21 April 2021	Studio Pembelajaran Digital
15	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Mei 2021	*Corporate University*

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Nama Instansi	Pelaksanaan	Materi
16	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	5 Mei 2021	*Corporate University*
17	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5 Mei 2021	*Corporate University*
18	Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN - Lembaga Administrasi Negara (LAN)	11 Mei 2021	Kegiatan FGD VirtuaL ASN *Corporate University* LAN (tentang KMS dan LMS)
19	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, BPSDM ESDM - Kementerian ESDM	25 dan 27 Mei 2021	AKP
20	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3 Juni 2021	*E-Learning* (Modul-modul *E-Learning*)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional	8 Juni 2021	Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)
22	Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Juni 2021	*Knowledge Management System* (KMS)
23	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	16 Juni 2021	*E-Learning*
24	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)	23 Juni 2021	Pelatihan Teknis Fungsional Berjenjang dan Sistem Pelatihan *Full E-Learning*
25	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	15 Juli 2021	FGD ASN *Corporate University* Nasional
26	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	19 Juli 2021	FGD Penyusunan *Balance Scorecard* (BSC)
27	Badan Informasi Geospasial (BIG)	21 Juli 2021	*Corporate University*
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara - Badan Pemeriksa Keuangan	20 Agustus 2021	FGD *Training Needs Analysis* (TNA)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) - Kementerian Dalam Negeri	24 Agustus 2021	Kelembagaan dan Tata Kelola serta Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Keuangan *Corporate University*
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara - Badan Pemeriksa Keuangan	25 Agustus 2021	FGD Standar Penilaian Hasil Pembelajaran Diklat

Berlanjut ke halaman berikutnya »

« Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Nama Instansi	Pelaksanaan	Materi
31	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	13 September 2021	Pengembangan Kemenkeu *Corporate University* dan *Knowledge Management System*
32	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri	2 Desember 2021[3]	Kemenkeu *Corporate University*, Penyusunan Kurikulum, Desain Pembelajaran, serta Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Penerapan *Corporate University*
33	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan	13 Desember 2021	Kemenkeu *Corporate University*
34	Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	21 Desember 2021	Tunas Integritas

[3]Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta (dengan penerapan protokal kesehatan dan keselamatan dalam bekerja)

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 4 | Penutup

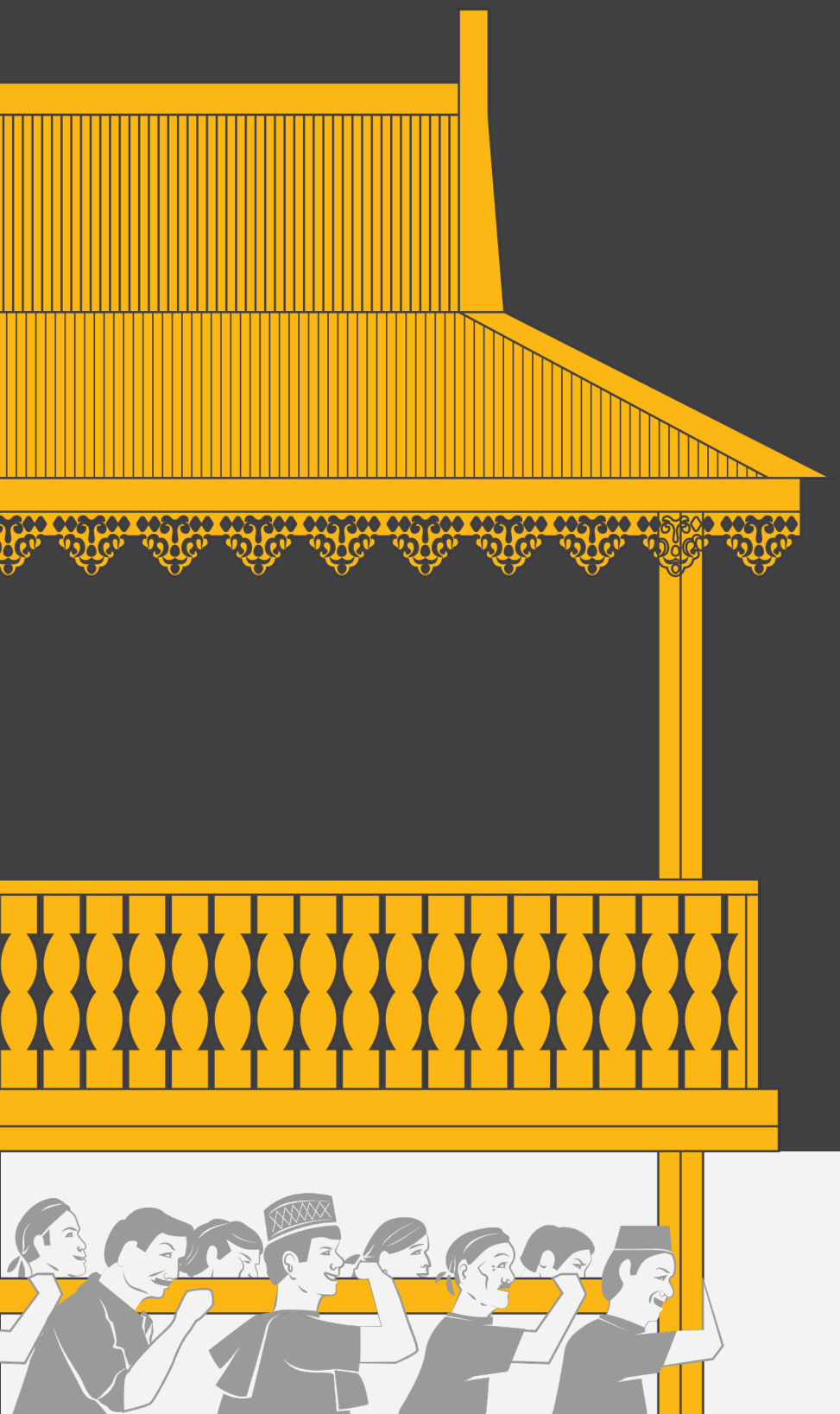

BAB 4 | Penutup

Laporan Kinerja BPPK Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi BPPK menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPPK Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Keuangan. Untuk menjalankan perannya tersebut BPPK didukung oleh anggaran yang memadai. Besarnya anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2021 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp448.701.040.515,00 atau 88,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp507.716.657.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya terkandung 65 rincian *output* (RO) dalam 10 kegiatan sebagai berikut.

a. Kegiatan Legislasi dan Litigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp45.972.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp30.676.500,00 atau tercapai sebesar 66,73%.
b. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp117.182.453.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp101.041.908.345,00 atau tercapai sebesar 86,23%.
c. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp132.690.680.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp131.112.183.911,00 atau tercapai sebesar 98,82%.
d. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp646.786.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp429.719.034,00 atau tercapai sebesar 66,44%.
e. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp525.580.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp431.965.007,00 atau tercapai sebesar 82,19%.
f. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran sebesar Rp175.042.662.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp160.949.739.256,00 atau tercapai sebesar 91,95%.

g. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp81.250.102.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp54.635.450.376,00 atau tercapai sebesar 67,25%.
h. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp21.230.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp15.929.000,00 atau tercapai sebesar 75,04%.
i. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp19.877.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp3.915.300,00 atau tercapai sebesar 19,7%.
j. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi memiliki pagu anggaran sebesar Rp291.315.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp49.553.786,00 atau tercapai sebesar 17,02%.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK selama tahun 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Sebanyak 18 IKU dari total 19 IKU pada tahun 2021 telah tercapai dan melampaui targetnya. Hanya satu IKU yang memiliki capaian *N/A* karena pada periode tahun 2021 tidak dapat diukur. Kesembilan belas IKU tersebut antara lain:

a. Tingkat Implementasi *Learning Organization*, dengan realisasi sebesar 93,2 dari target 77 sehingga capaiannya adalah sebesar 120.
b. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kinerjanya, dengan realisasi sebesar 89,34% dari target 80% sehingga capaiannya adalah sebesar 111,67.
c. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkat Kualitas Perilaku Kerjanya, dengan realisasi sebesar 98,37% dari target 84% sehingga capaiannya adalah sebesar 117,1.
d. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, dengan realisasi sebesar 4,63 dari target 4,41 sehingga capaiannya adalah sebesar 104,99.
e. Indeks Kualitas Penelitian, dengan realisasi sebesar 442 dari target 193 sehingga capaiannya adalah sebesar 120.
f. Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan, dengan realisasi sebesar 81,47% dari target 75% sehingga capaiannya adalah sebesar 108,63.
g. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik, dengan realisasi sebesar 98,21% dari target 93% sehingga capaiannya adalah sebesar 105,6.
h. Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital, dengan realisasi sebesar 99,43% dari target 70% sehingga capaiannya adalah sebesar 120.
i. Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran dan Validasi Program Pembelajaran, dengan realisasi sebesar 100 dari target 100 sehingga capaiannya adalah sebesar 100.
j. Persentase Kualitas Program Sertifikasi, dengan realisasi sebesar 98,8% dari target 80% sehingga capaiannya adalah sebesar 120.
k. Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC, dengan realisasi sebesar 116% dari target 100% sehingga capaiannya adalah sebesar 116.
l. Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, dengan realisasi sebesar 115,56% dari target 96,10% sehingga capaiannya adalah sebesar 120.
m. Indeks Integritas Organisasi, dengan realisasi sebesar 110,53 dari target 95,1 sehingga capaiannya adalah sebesar 116,29.

n. Persentase Penyelesaian Program IS-RBTK dan *Data Analytics*, dengan realisasi sebesar 98,16% dari target 85% sehingga capaiannya adalah sebesar 112,18.
o. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti, dengan realisasi sebesar *N/A* dari target 89,5% sehingga capaiannya adalah sebesar *N/A*.
p. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15, dengan realisasi sebesar 95,79 dari target 90 sehingga capaiannya adalah sebesar 106,43.
q. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dengan realisasi sebesar 97,3% dari target 95,5% sehingga capaiannya adalah sebesar 101,88.
r. Indeks Efektivitas Komunikasi Publik, dengan realisasi sebesar 3,75 dari target 3,55 sehingga capaiannya adalah sebesar 105,63.
s. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK, dengan realisasi sebesar 100% dari target 87% sehingga capaiannya adalah sebesar 114,94.

Secara kumulatif besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK tahun 2021 adalah 112,94. Nilai ini mengalami kenaikan dari NKO BPPK tahun 2020 yang sebesar 112,42. Baik besarnya tingkat pencapaian target IKU maupun kenaikan NKO dari tahun sebelumnya tersebut merupakan cerminan upaya peningkatan kinerja BPPK ke arah yang lebih baik. Berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan transformasi kelembagaan, serta upaya aktif antikorupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap sumber daya yang dimiliki.

Meskipun sebagian besar IKU BPPK telah terealisasi dan tercapai targetnya, BPPK secara berkelanjutan berusaha untuk terus mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan pencapaian IKU dan indikator-indikator kinerja lainnya. BPPK berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus guna meningkatkan kinerjanya di masa-masa mendatang. Adapun upaya yang akan dilakukan BPPK guna meningkatkan kinerjanya tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Melakukan asistensi dan penilaian tingkat implementasi *learning organization* di lingkungan Kementerian Keuangan;
b. Menyusun program pembelajaran, desain pembelajaran, dan penyelenggaraan pembelajaran serta melakukan pengukuran dampak pembelajaran;
c. Melakukan pengembangan *tools* evaluasi pembelajaran;
d. Menyusun rencana pembentukan, melakukan pembentukan, dan pelaksanaan kegiatan *MoF Scholarship Forum*;
e. Menyusun rencana pembentukan, melakukan pembentukan, dan pelaksanaan kegiatan *Awardee Mentorship Program*;
f. Melaksanakan proses validasi program pembelajaran dan penjaminan mutu pembelajaran;
g. Menyusun dan menggunakan dokumen pengetahuan (*knowledge document*) yang ada di KLC sebagai pemerkaya materi pembelajaran;
h. Menyusun konsep pedoman penguatan integritas di lingkungan BPPK;
i. Melakukan koordinasi terkait tata cara pengakuan dan pengukuran RO dengan seluruh unit di lingkungan BPPK;
j. Melakukan kolaborasi program edukasi keuangan dan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan terkait strategi komunikasi;
k. Melakukan pengembangan pada *Knowledge Management System* (KMS) (modul *monitoring* dan evaluasi untuk pelaporan dan analisis implementasi *knowledge management*, modul

rekomendasi penyusun aset intelektual/ *expert locator*, modul kolaborasi, dan modul *advanced search*);

l. Melakukan pengembangan pada KLC berupa migrasi fitur aplikasi Semantik dan penerbitan sertifikat pelatihan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 108
Komplemen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 117

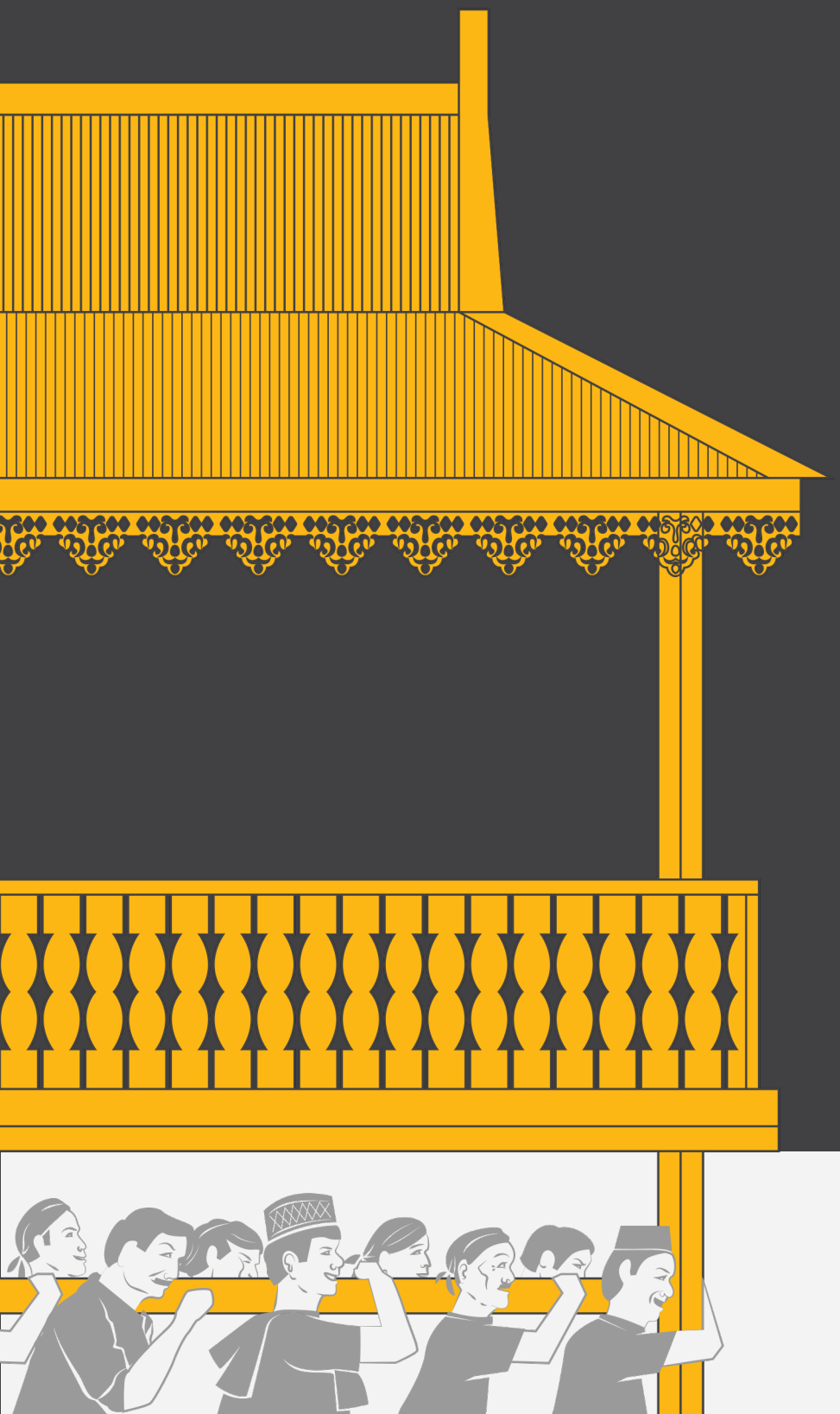

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 11/KK/2021
KEPALA BADAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapan pun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

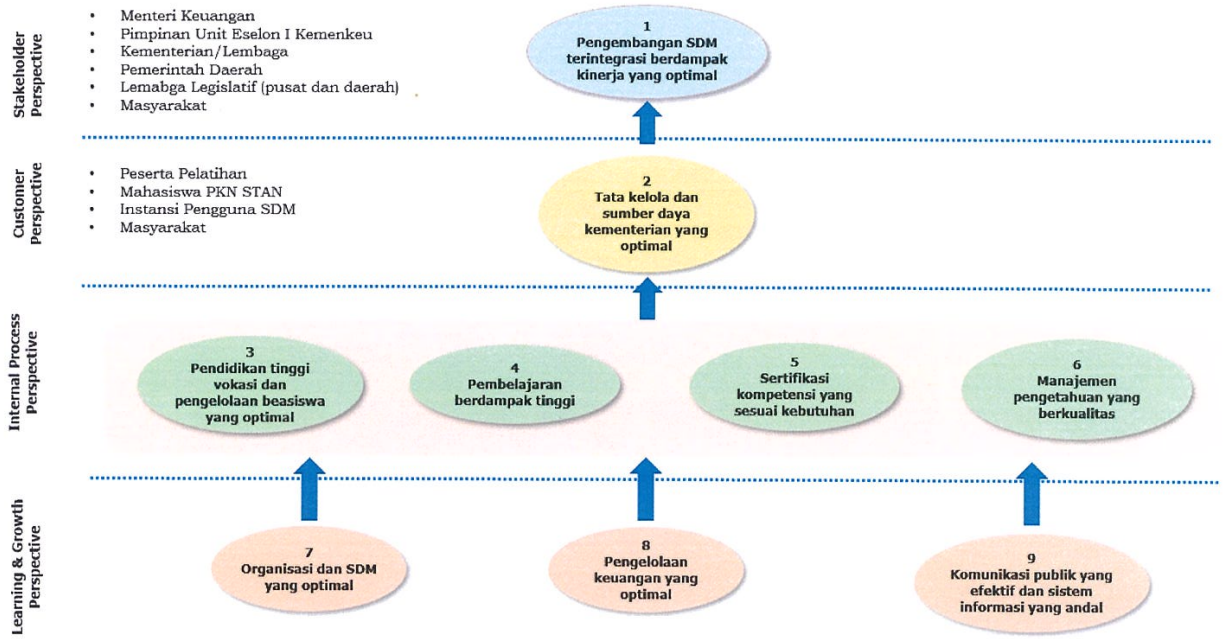

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal	1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	77 (skala 100)
		1b-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	80%
2.	Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%
		2b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41
3.	Pendidikan tinggi vokasi dan pengelolaan beasiswa yang optimal	3a-N	Indeks kualitas penelitian	193
		3b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	75%
4.	Pembelajaran berdampak tinggi	4a-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
		4b-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%
		4c-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran dan validasi program pembelajaran	100
5.	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan	5a-N	Persentase kualitas program sertifikasi	80%
6.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas	6a-N	Persentase pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%
7.	Organisasi dan SDM yang optimal	7a-CP	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	96,1%
		7b-CP	Indeks integritas organisasi	95,05
		7b1-CP	Indeks integritas	90,10
		7b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
		7c-CP	Persentase penyelesaian program IS-RBTK dan *data analytics*	87,5%
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%
		8b-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90
		8c-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
9.	Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (skala 4)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9b-CP Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%

Kegiatan		Anggaran
1.	Legislasi dan litigasi	Rp 125.202.000,00
2.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp 104.108.133.000,00
3.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp 120.574.286.000,00
4.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 1.546.942.000,00
5.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 1.040.137.000,00
6.	Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp 326.108.276.000,00
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp 80.127.813.000,00
8.	Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp 460.872.000,00
9.	Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp 21.370.000,00
10.	Pengelolaan sistem informasi dan teknologi	Rp 564.512.000
		Rp 634.677.543.000,00

Jakarta, 29 Januari 2021

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Rionald Silaban

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal							
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	-	-	-	-	-	77	77 (skala 100)
1b-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	80%	80%	-	80%	80%	80%
2.	Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal							
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	84%	84%	-	84%	84%	84%
2c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4,41	4,41 (skala 5)
3.	Pendidikan tinggi vokasi dan pengelolaan beasiswa yang optimal							
3a-N	Indeks kualitas penelitian	-	-	-	-	-	193	193
3b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-	75%	75%
4.	Pembelajaran berdampak tinggi							
4a-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
4b-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	-	30%	30%	-	30%	70%	70%
4c-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran dan validasi program pembelajaran	-	100	100	-	100	100	100
5.	Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal							
5a-N	Persentase kualitas program sertifikasi	-	-	-	-	-	80%	80%

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Persentase pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	20%	35%	35%	70%	70%	100%	100%
7.	Organisasi dan SDM yang optimal							
7a-CP	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	-	-	-	-	-	96,1%	96,1%
7b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	95,05	95,05
7b1-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	90,10	90,10
7b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100%	100%
7c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK dan *data analytics*	6,07%	15,95%	15,95%	26,02%	26,02%	87,5%	87,5%
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal							
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	89,5%	89,5%
8b-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	70	70	-	70	90	90
8c-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9.	Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal							
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55 (skala 4)
9b-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	-	-	-	-	-	87%	87%

Jakarta, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,

Rionald Silaban

INISIATIF STRATEGIS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Juta Rp)
				Kegiatan	*Output*			
1.	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah	300.000 jamlator (10.000 peserta)	1. Perencanaan a. Pembentukan Tim Wali Program b. Penyusunan dan Pembahasan Kurikulum c. Penyusunan dan Pembahasan *Learning* Material d. Uji Coba Program	1. Kementerian Keuangan 2.500 peserta 2. Kementerian /Lembaga 7.500 peserta	Januari – April 2021	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	501,375
				2. Persiapan Program Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		Januari – April 2021		
				3. Pelaksanaan Program Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		April – November 2021		
				4. *Monitoring* dan Evaluasi Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah		Mei – Desember 2021		

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Juta Rp)
				Kegiatan	*Output*			
2.	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara	90.000 jamlator (6.000 peserta)	1. Perencanaan a. Penyusunan Program dan Kurikulum b. b. Penyiapan Bahan Ajar dan Video	1. Kementerian Keuangan 2.500 peserta 2. Kementerian /Lembaga 7.500 peserta	Januari – April 2021	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	304,475
				2. Persiapan Program Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		Januari – April 2021		
				3. Pelaksanaan Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		April – November 2021		
				4. *Monitoring* dan Evaluasi Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara		Mei – Desember 2021		

Jakarta, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,

Rionald Silaban

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Sri Mulyani Indrawati	1	Nama	Rionald Silaban
2	NIP	-	2	NIP	19660423 199010 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3	Pangkat/ Gol. Ruang	IV/e/Pembina Utama
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4	Jabatan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5	Unit Kerja	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ *OUTPUT*	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Mewujudkan *learning organization*		77 (skala 100)	100	12	-
2.	Meningkatkan kinerja alumni pelatihan		80%	100	12	-
3.	Meningkatkan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan		84%	100	12	-
4.	Meningkatkan kepuasan pengguna layanan		4,41	100	12	-
5.	Memenuhi indeks kualitas penelitian		193	100	12	-
6.	Memenuhi tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan		75%	100	12	-
7.	Menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan dari Kemenkeu dengan predikat minimal baik		93%	100	12	-
8.	Menyelenggarakan pembelajaran digital		70%	100	12	-
9.	Memenuhi standar kualitas pembelajaran dan menghasilkan program pelatihan dengan nilai validasi A		100	100	12	-
10.	Meningkatkan kualitas implementasi program sertifikasi		80%	100	12	-
11.	Meningkatkan pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC		100%	100	12	-
12.	Memenuhi persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan		96,1%	100	12	-
13.	Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi		95,05	100	12	-
14.	Menyelesaikan program RBTK dan *data analytics*		87,5%	100	12	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ *OUTPUT*	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
15.	Menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN		89,5%	100	12	-
16.	Memenuhi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15		90	100	12	-
17.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran		95,5%	100	12	634,677 M
18.	Memenuhi efektivitas komunikasi publik		3,55 (skala 4)	100	12	-
19.	Memenuhi persentase penyelesaian proyek strategis TIK		87%	100	12	-

Jakarta, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,

Sri Mulyani Indrawati

PNS yang dinillai,

Rionald Silaban

NIP 19660423 199010 1 001

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 11.1/KK/2021
KEPALA BADAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapan pun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

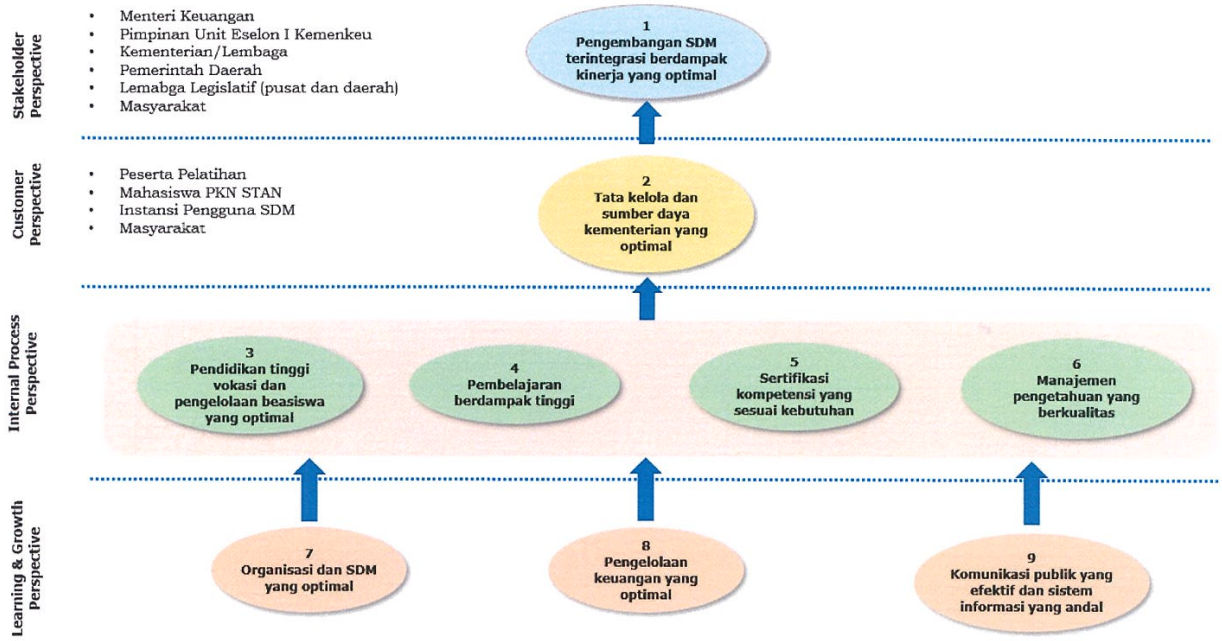

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal	1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	77 (skala 100)
		1b-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	80%
2.	Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	84%
		2b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41
3.	Pendidikan tinggi vokasi dan pengelolaan beasiswa yang optimal	3a-N	Indeks kualitas penelitian	193
		3b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	75%
4.	Pembelajaran berdampak tinggi	4a-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
		4b-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	70%
		4c-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran dan validasi program pembelajaran	100
5.	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan	5a-N	Persentase kualitas program sertifikasi	80%
6.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas	6a-N	Persentase pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	100%
7.	Organisasi dan SDM yang optimal	7a-CP	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	96,1%
		7b-CP	Indeks integritas organisasi	95,05
		7b1-CP	Indeks integritas	90,10
		7b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
		7c-CP	Persentase penyelesaian program IS-RBTK dan *data analytics*	87,5%
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%
		8b-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90
		8c-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
9.	Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (skala 4)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9b-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%

Program/Kegiatan		Anggaran
Dukungan Manajemen	Rp	634.677.543.000,00
1. Legislasi dan litigasi	Rp	125.202.000,00
2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp	224.682.419.000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	2.587.079.000,00
4. Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp	406.236.089.000,00
5. Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp	482.242.000,00
6. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi	Rp	564.512.000

Jakarta, 31 Maret 2021

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Andin Hadiyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Pengembangan SDM terintegrasi berdampak kinerja yang optimal							
1a-CP	Tingkat implementasi *learning organization*	-	-	-	-	-	77	77 (skala 100)
1b-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	80%	80%	-	80%	80%	80%
2.	Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal							
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	84%	84%	-	84%	84%	84%
2c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4,41	4,41 (skala 5)
3.	Pendidikan tinggi vokasi dan pengelolaan beasiswa yang optimal							
3a-N	Indeks kualitas penelitian	-	-	-	-	-	193	193
3b-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-	75%	75%
4.	Pembelajaran berdampak tinggi							
4a-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	93%	93%	93%	93%	93%	93%
4b-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	-	30%	30%	-	30%	70%	70%
4c-N	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran dan validasi program pembelajaran	-	100	100	-	100	100	100
5.	Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal							
5a-N	Persentase kualitas program sertifikasi	-	-	-	-	-	80%	80%

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas							
6a-N	Persentase pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC	-	35%	35%	70%	70%	100%	100%
7.	Organisasi dan SDM yang optimal							
7a-CP	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	-	-	-	-	-	96,1%	96,1%
7b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	95,05	95,05
7b1-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	90,10	90,10
7b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100%	100%
7c-CP	Persentase penyelesaian program RBTK dan *data analytics*	-	9,88%	9,88%	19,95%	19,95%	81,43%	81,43%
8.	Pengelolaan keuangan yang optimal							
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	89,5%	89,5%
8b-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	70	70	-	70	90	90
8c-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9.	Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal							
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55 (skala 4)
9b-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	-	-	-	-	-	87%	87%

Jakarta, 31 Maret 2021
PNS yang dinilai,

Andin Hadiyanto

INISIATIF STRATEGIS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Juta Rp)
				Kegiatan	*Output*			
1.	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah	300.000 jamlator (10.000 peserta)	1. Perencanaan a. Pembentukan Tim Wali Program b. Penyusunan dan Pembahasan Kurikulum c. Penyusunan dan Pembahasan *Learning* Material d. Uji Coba Program	1. Kementerian Keuangan 2.500 peserta 2. Kementerian /Lembaga 7.500 peserta	Januari – April 2021	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	501,375
				2. Persiapan Program Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		Januari – April 2021		
				3. Pelaksanaan Program Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		April – November 2021		
				4. *Monitoring* dan Evaluasi Digital *Learning* Manajemen Keuangan Negara Menengah		Mei – Desember 2021		

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Juta Rp)
				Kegiatan	*Output*			
2.	Pembelajaran Berdampak Tinggi/ Persentase Penyelenggaraan Pembelajaran Digital	Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara	90.000 jamlator (6.000 peserta)	1. Perencanaan a. Penyusunan Program dan Kurikulum b. b. Penyiapan Bahan Ajar dan Video	1. Kementerian Keuangan 2.500 peserta 2. Kementerian /Lembaga 7.500 peserta	Januari – April 2021	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	304,475
				2. Persiapan Program Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		Januari – April 2021		
				3. Pelaksanaan Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara a. Kementerian Keuangan b. Kementerian/Lembaga		April – November 2021		
				4. *Monitoring* dan Evaluasi Digital *Learning* Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara		Mei – Desember 2021		

Jakarta, 31 Maret 2021

PNS yang dinilai,

Andin Hadiyanto

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Sri Mulyani Indrawati	1	Nama	Andin Hadiyanto
2	NIP	-	2	NIP	19650609 199012 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3	Pangkat/ Gol. Ruang	IV/e/Pembina Utama
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4	Jabatan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5	Unit Kerja	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ *OUTPUT*	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Mewujudkan *learning organization*		77 (skala 100)	100	10	-
2.	Meningkatkan kinerja alumni pelatihan		80%	100	10	-
3.	Meningkatkan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan		84%	100	10	-
4.	Meningkatkan kepuasan pengguna layanan		4,41	100	10	-
5.	Memenuhi indeks kualitas penelitian		193	100	10	-
6.	Memenuhi tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan		75%	100	10	-
7.	Menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan dari Kemenkeu dengan predikat minimal baik		93%	100	10	-
8.	Menyelenggarakan pembelajaran digital		70%	100	10	-
9.	Memenuhi standar kualitas pembelajaran dan menghasilkan program pelatihan dengan nilai validasi A		100	100	10	-
10.	Meningkatkan kualitas implementasi program sertifikasi		80%	100	10	-
11.	Meningkatkan pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC		100%	100	10	-
12.	Memenuhi persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan		96,1%	100	10	-
13.	Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi		95,05	100	10	-
14.	Menyelesaikan program RBTK dan *data analytics*		81,43%	100	10	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ *OUTPUT*	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
15.	Menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN		89,5%	100	10	-
16.	Memenuhi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15		90	100	10	-
17.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran		95,5%	100	10	634,677 M
18.	Memenuhi efektivitas komunikasi publik		3,55 (skala 4)	100	10	-
19.	Memenuhi persentase penyelesaian proyek strategis TIK		87%	100	10	-

Jakarta, 31 Maret 2021

Pejabat Penilai,

Sri Mulyani Indrawati

PNS yang dinillai,

Andin Hadiyanto

NIP 19650609 199012 1 001

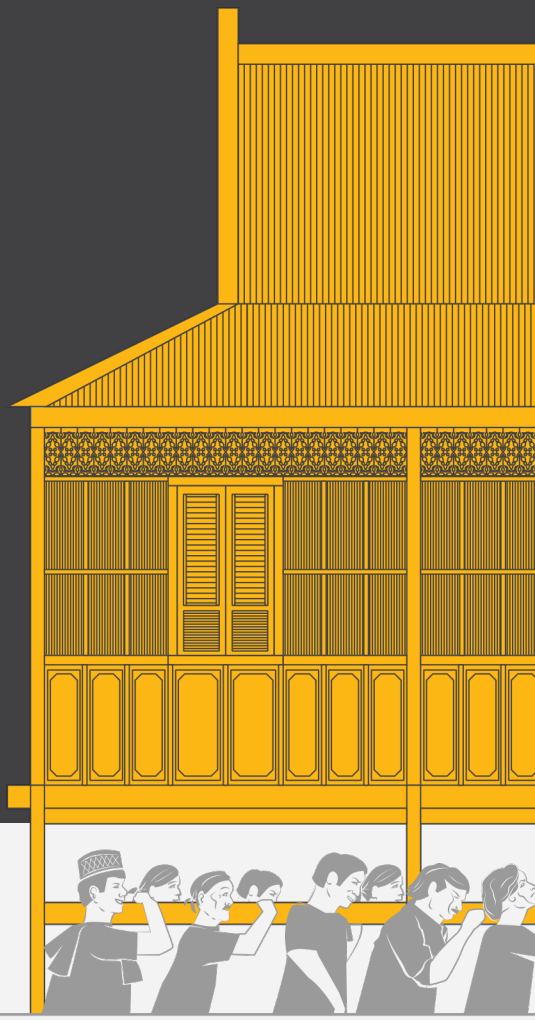

bppk.kemenkeu.go.id

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA